



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH LEMAHNYA ALUTSISTA TNI AL TERHADAP
KEDAULATAN PERAIRAN NKRI**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

H. MUHAMMAD MUTAWALLY

NPM : 0806448655

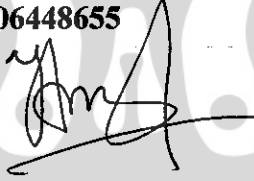
**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEGIK INTELIJEN**

JAKARTA

DESEMBER 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : H. Muhammad Mutawally
NPM : 0806448655
Tanda Tangan : 
Tanggal : 14 Desember 2010

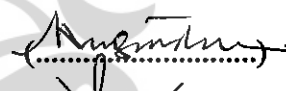
HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : H. Muhammad Mutawally
NPM : 0806448655
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Kekhususan : Kajian Strategik Intelijen
Judul Tesis : Pengaruh Lemahnya Alutsista TNI AL Terhadap
Kedaulatan Perairan NKRI

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister of Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik Intelijen Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Joko Kusnanto Anggoro, Ph.D 

Pembimbing : Laksda TNI (Purn) R. Mangindaan 

Penguji : Andi Widjajanto, MA 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Desember 2010

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Pengaruh Lemahnya Alutsista TNI AL Terhadap Kedaulatan Perairan NKRI”. Penulisan tesis ini bertujuan sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar Magister Sains Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia.

Pemilihan judul tesis dengan fokus Alutsista TNI AL, karena mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan dua pertiga wilayahnya adalah wilayah perairan. Dengan pertimbangan tersebut, Alutsista TNI AL mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di perairan NKRI, serta menunjang dalam mewujudkan pertahanan nasional.

Akhirnya, penyelesaian penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang berupa arahan, bimbingan sumbangan pemikiran, kritikan, bantuan data, fasilitas penulisan dan lain sebagainya hingga terselesaikannya tesis ini dalam waktu yang telah ditentukan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya kepada:

1. Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan, waktu, bimbingan, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Andi Widjajanto MA, Laksda TNI (Purn) Budiman D. Said, Koi. Laut (Purn) Willy F. Sumakul, dan Alman Helvas Ali yang telah memberikan ide, data, referensi dan jalan pemikiran kepada penulis dalam proses awal penyusunan tesis ini.
3. Kolonel Laut (P) Siwi Sukma Aji, Kolonel Laut (E) Ir. Antar Setiabudi, Kolonel Laut Iswinardi, Kolonel Laut Drs. Haris Djoko Nugroho, M.Si, Kol. Laut (T) Rizal M.T.J, dan Johannes Pangihutan yang telah memberikan waktu untuk diskusi, wawancara dan data-data pendukung penyusunan tesis ini.

4. Dra. Fadjar Iriani Sophiaan Yudoyoko, M.Si, Bapak/Ibu dosen, pak Faisal, mas Wing serta staf administrasi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Strategik Intelijen Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
5. Bapak KH.M.Dainawi dan Ibu Hj.Nurkasmawati, kedua orang tua penulis yang terus menerus memberikan dukungan dan doa kepada penulis; serta Imam Haramain, Ahmad Mujtaba, Aunu Athaillah, Hujjatul Balighah, Sibghatun Ni'mah, dan Ahmad Muzaffar adik-adik penulis yang terus menerus memberikan semangat dan supportnya.
6. Sebentuk doa, cinta, semangat dan harapan (Nur Mujaddidah Habibatillah).
7. Sahabat, rekan-rekan seangkatan, dan ade-ade perkumpulan kita, terutama, mas Gun, Bim, Aden, Bu Pudji, Kasek, Eka, Alaf dan Alim terima kasih atas bantuan dan supportnya.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

Namun dengan keterbatasan yang dimiliki penulis, memungkinkan tesis ini belum dapat menyampaikan buah pikiran yang lengkap, sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritikan maupun saran yang membangun dari semua pihak, akan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini di waktu mendatang. Akhirnya, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi masukan bagi TNI AL dalam mendukung kebutuhan Alutsista bagi kedaulatan dan keamanan perairan NKRI, serta berguna bagi pengembangan ilmu di masa yang akan datang, Amien.

Jakarta, 14 Desember 2010

H. Muhammad Mutawally

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Muhammad Mutawally
NPM : 0806448655
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Kekhususan : Kajian Stratejik Intelijen
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

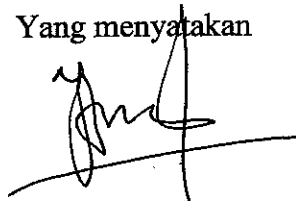
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pengaruh Lemahnya Alutsista TNI AL Terhadap Kedaulatan Perairan NKRI**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Desember 2010

Yang menyatakan



(H. Muhammad Mutawally)

ABSTRAK

Nama : H. Muhammad Mutawally
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Kekhususan : Kajian Strategik Intelijen
Judul : Pengaruh Lemahnya Alutsista TNI AL Terhadap Kedaulatan Perairan NKRI

Tesis ini berusaha menjelaskan peran dan kondisi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam menjaga kedaulatan di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi geografis Indonesia dimana dua pertiganya adalah wilayah perairan dan sebagai negara kepulauan sesuai dengan *United Convention on Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 menyebabkan Indonesia memikul tanggung jawab pengawasan wilayah laut yang semakin luas. Peran laut sebagai aspek pertahanan dan keamanan sangat penting bagi Indonesia dalam menyatukan semua pulau-pulau dan penduduknya sebagai sebuah keutuhan bangsa, sehingga dibutuhkan kesiapan Alutsista TNI AL dalam menjaga kedaulatan di wilayah perairan NKRI. Akan tetapi, dalam kenyataannya kondisi Alutsista TNI AL tidak mampu menjaga kedaulatan dan mengamankan seluruh wilayah yurisdiksi perairan Indonesia, karena sebagian besar Alutsista TNI AL sudah tua dan 60% alat deteksi dan senjatanya tidak siap. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan interpretasi dan analisis kondisi Alutsista TNI AL agar dapat mengetahui dan memahami strategi yang tepat TNI AL menghadapi ancaman kedaulatan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia serta mencoba menjelaskan strategi yang harus dilakukan dengan menggunakan potensi lainnya sehingga dapat mendukung kebutuhan Alutsista TNI AL dalam upaya menjaga kedaulatan perairan NKRI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatoris dan penelitian intelijen strategik. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah bahwa penambahan dan pergantian Alutsista TNI AL tetap harus segera dilakukan melihat potensi ancaman kedaulatan dan keamanan kedepan di wilayah perairan NKRI tidak dapat secara nyata diprediksi. Selain itu, TNI AL dengan menggunakan strategi pemberdayaan intelijen maritim diharapkan dapat mendukung keterbatasan Alutsista TNI AL. Kemampuan intelijen maritim yang baik akan menciptakan kekuatan laut yang kuat, dan secara langsung akan meningkatkan pertahanan nasional.

Kata kunci :
Alutsista, TNI AL, Kedaulatan Perairan

ABSTRACT

Name : H. Muhammad Mutawally
Study Program : National Resilience Study
Speciality : Intellegence Strategic Study
Title : The Effect of The Weaknesses of Indonesian Navi's Main Equipment Armament System (Alutsista) Against the Unitary State of Republic of Indonesia Waters Sovereignty

This thesis attempts to explain the role and the condition of Indonesians Navi's Main Equipment Armament System (Alutsista) in maintaining sovereignty of the Unitary State of Republic of Indonesian's (NKRI) waters. The geographical condition of Indonesia, where two-thirds of its area are waters and as an archipelago in accordance with the United Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, caused Indonesia oversight responsibility for an increasingly broad ocean areas. The role of the ocean as a defense and security aspect is very important for Indonesia in uniting all the islands and their inhabitants as a whole nation. That condition required Alutsista readiness of the Navy in maintaining sovereignty in the territorial waters the Unitary State of Republic of Indonesia. But in fact, the condition of Navy's Alutsista is unable to maintain the sovereignty and jurisdiction to secure the entire area of Indonesian waters, since most Alutsista Navy are old and 60% detection equipment and weapons are not ready. The purpose of this study was to provide interpretation and analysis of the Navy's Alutsista conditions to be aware of and understand the appropriate strategies to face the threat of the Navy's sovereignty and security in the territorial waters of Indonesia and try to explain the strategy that must be performed using other potentials in order to support the needs of the Navy Alutsista in an effort to maintain NKRI waters sovereignty. The study was a qualitative research design with explanatory and strategic intelligence research. The results of this study suggest the government that the additions and changes Navy's Alutsista still must be done immediately. It all because the potential threat to the sovereignty and security at the fore time in the territorial waters of the Unitary State of Republic of Indonesia can not be significantly predicted. In addition, the Navy with a maritime intelligence using the empowerment strategy is expected to support the Navy's Alutisista limitations. A good maritime intelligence capability will create a strong naval forces, and directly will improve national defense.

Key word:

Main Equipment Armament System, Indonesia's Navy, Water Sovereignty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxiii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.5.1.1 Studi Pustaka.....	7
1.5.2 Sumber data.....	7
1.5.2.1 Data Primer.....	7
1.5.2.2 Data Sekunder.....	8
1.5.3 Metode Analisa Data.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
1.7 Alur Pikir.....	10
2. LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Teori Strategi Maritim.....	11
2.1.1 Pandangan Tentang Laut.....	12
2.1.2 Hakekat Hankam dan Kepentingan Nasional di Laut.....	17
2.2 Teori Perang Laut.....	20
2.3 Konsep Kedaulatan Perairan	27
2.4 Teori Pertahanan.....	37
2.5 Teori Intelijen	39
2.5.1 Tugas Pokok.....	40
2.5.2 Fungsi Utama.....	41

3. KEADAAN LINGKUNGAN STRATEGIS.....	45
3.1 Keadaan Strategis Lingkungan Terdekat.....	45
3.1.1 Thailand.....	49
3.1.2 Malaysia.....	51
3.1.3 Singapura.....	56
3.1.4 Filipina.....	60
3.1.5 Vietnam.....	63
3.1.6 Australia.....	65
3.2 Alutsista dan TNI AL.....	70
3.2.1 Sejarah Alutsista TNI AL.....	70
3.2.2 Visi, Misi, Tugas, dan Peran TNI AL.....	73
3.2.3 Kekuatan TNI AL.....	74
3.2.3.1 Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal).....	75
3.2.3.2 Korps Marinir.....	76
3.2.3.3 Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal).....	77
3.3 Alutsista TNI AL Saat ini.....	77
4. INDONESIA DAN KEBUTUHAN ALUTSISTA.....	85
4.1 Kebutuhan Alutsista TNI AL.....	85
4.2 Pemberdayaan Intelijen Untuk Kebutuhan Intelijen Maritim.....	99
5. PENUTUP.....	105
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Saran.....	106
DAFTAR REFERENSI.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Batas Wilayah Indonesia Berdasarkan TZMKO 1939 (Sebelum Deklarasi Djoeanda)	31
Gambar 2.2 Peta Batas Wilayah Indonesia Setelah Deklarasi Djoeanda.....	32
Gambar 2.3 Peta Perairan Indonesia Berdasarkan UU No.6 Tahun 1996	32
Gambar 2.4 Peta Alur Kepulauan Indonesia (ALKI) Berdasarkan PP No.37 Tahun 2002	33
Gambar 2.5 Roda Perputaran Intelijen (RPI)	44
Gambar 2.6 Peta Asia	48

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alutsista Angkatan Laut Thailand.....	50
Tabel 3.2 Alutsista Angkatan Laut Malaysia	53
Tabel 3.3 Alutsista Angkatan Laut Singapura.....	58
Tabel 3.4 Alutsista Angkatan Laut Filipina	61
Tabel 3.5 Alutsista Angkatan Laut Vietnam	64
Tabel 3.6 Alutsista Angkatan Laut Australia	67
Tabel 3.7 Alutsista Angkatan Laut Indonesia	78
Tabel 3.8 Kondisi Teknis Kapal Perang Republik Indonesia	80
Tabel 3.9 Kondisi Kendaraan Tempur TNI AL	81
Tabel 3.10 Kondisi Penerbangan Satuan TNI AL.....	83

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai luas wilayah yang terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km² serta merupakan negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang terdiri dari 17.506 pulau besar dan kecil. Di samping itu, negara Indonesia terletak pada posisi silang diantara dua benua. Selain itu, posisi strategis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menyebabkan laut diantara pulau-pulau menjadi alur laut sangat penting khususnya untuk lalu lintas dalam negeri dan internasional.

Kondisi geografi Indonesia yang diapit dua samudera besar, serta alamnya yang subur, telah menempatkan Indonesia menjadi pusat perniagaan antar negara. Posisi strategis ditambah dengan suburnya alam Indonesia membuat negara-negara lain tertarik pada Indonesia, sehingga Indonesia yang kala itu terdiri dari kerajaan-kerajaan seperti, Sriwijaya, Majapahit, Samudra Pasai, dan Kerajaan Demak memiliki hubungan dagang, politik, dan budaya dengan negara lain di kawasan Asia dan Eropa. Kebesaran dan kejayaan suku-suku bangsa di nusantara tersebut berkat kekuatan laut yang kuat berupa angkatan laut kerajaan dan armada kapal perniagaan.¹ Kondisi seperti itu bertahan sampai sekarang dengan digunakannya perairan Indonesia sebagai jalur lalu lintas dunia, juga sebagai *life line* (garis penghubung laut).²

Dalam pembagian *area of responsibility* secara geografis, Indonesia terbagi atas empat kompartemen strategis yang didasarkan pada pembagian tiga ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) di barat, tengah, dan timur (dengan kecabangannya). Dari empat kompartemen strategis tersebut, ada kompartemen

¹ Dispensal. *TNI AL yang besar, kuat dan Profesional*, Jakarta: 2004. h.2

² Wawancara dengan Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, 13 Oktober 2010

strategis yang merupakan perpaduan antara wilayah daratan dan perairan, ada pula kompartemen strategis yang didominasi oleh wilayah perairan. Dari semua kompartemen strategis, setidaknya ada satu kesamaan yaitu berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga sekawasan yaitu (1) India, (2) Thailand, (3) Malaysia, (4) Singapura, (5) Vietnam, (6) Philipina, (7) Palau, (8) Papua New Guinea, (9) Timor Leste dan (10) Australia. Melihat kondisi wilayah seperti ini, rawan menimbulkan konflik antar negara. Ditinjau dari perkembangan lingkungan strategis, ada kompartemen strategis yang berhadapan langsung dengan kekuatan-kekuatan regional, ada pula kompartemen strategis yang berinteraksi langsung dengan kekuatan adidaya. Selain itu, Indonesia mempunyai empat dari sembilan *choke points* dunia yaitu, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Wetar yang merupakan rute pelayaran penting di dunia di samping terusan Zues dan terusan Panama. Pentingnya posisi Indonesia menjadikan kawasan ini sebagai tempat pertarungan kepentingan negara-negara besar seperti Amerika, China, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara di kawasan Asia Pasifik lainnya. Negara-negara itu membutuhkan perairan Indonesia sebagai jalur pelayaran yang harus aman karena merupakan jalur pengangkutan minyak dari Timur Tengah.

Letak strategis geografi Indonesia juga menjadi perhatian dan terkesan dicampuri oleh kepentingan kekuatan negara maju. Stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri akan menjadi sorotan negara-negara yang mempunyai kepentingan dengan perdagangan dan lalu lintas mereka. Sekarang negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga menghadapi kebangkitan negara China. Industri dan perdagangan luar negeri China membutuhkan jalur pelayaran Asia Tenggara, disamping kebutuhan sumber daya alam terutama minyak bumi sebagai pengganti bahan bakar utama industri mereka yaitu batubara, selama ini. Kepulauan *Spratly* di laut China Selatan yang menjadi rebutan negara-negara sekitarnya juga menjadi sasaran China. Hal ini merupakan ancaman kedaulatan Indonesia, karena selain cadangan minyak bumi yang sangat besar, laut China Selatan ini juga merupakan pintu gerbang sebelah timur dari jalur pelayaran selat Malaka.

Upaya untuk mengamankan dan mempertahankan Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi makin sulit karena luasnya wilayah air dan darat yang

menyebarkan yang menjadikan wilayah Indonesia rawan terhadap berbagai ancaman. Apalagi, Indonesia harus memberikan wilayah airnya sebagai jalur lalu lintas laut internasional. Ini tentu tidak akan mudah diatasi oleh Indonesia. Masalah lainnya adalah perlunya perlindungan terhadap aset strategis untuk kepentingan ekonomi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia mengalami kerugian sangat besar dari beroperasinya secara ilegal kapal-kapal penangkap ikan asing.³ Tidak terhitung kerugian-kerugian lain yang ditimbulkan oleh lemahnya kontrol di wilayah kelautan Indonesia.

Kekayaan sumber daya alam kelautan yang berada di ribuan pulau di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana tertera pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU No. 17/1985, tentang pengesahan UNCLOS 1982. Secara eksplisit UNCLOS 1982 menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Perairan laut yang ada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan laut nusantara (*Mare Nostrum*). Wilayah ini merupakan wilayah kedaulatan mutlak negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dikenal sebagai *Archipelagic State*.

Selain itu, UNCLOS 1982 menyebabkan wilayah kedaulatan negara Indonesia menjadi sangat luas terutama di wilayah perairan yang memiliki banyak sumber daya alam kelautan dan perikanan. Konsekuensi perairan yang sangat luas, mengandung kekayaan laut dan strategis tersebut seharusnya Indonesia memiliki Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang terbaik untuk mengamankan wilayah yang sangat luas tersebut, karena bisa menimbulkan dampak negatif atau ancaman bagi kedaulatan negara, seperti penguasaan sebagian perairan Indonesia oleh pihak asing, pencurian ikan (*illegal fishing*), kejahatan transnasional (*transnasional crime*), penyelundupan, penebangan liar (*illegal logging*), penjualan manusia (*trafficking*), dan pencurian bahan tambang (*illegal mining*). Apalagi Indonesia memiliki tetangga yang terpisah oleh laut

³ Edy Prasetyono, *Seminar Pertahanan: Analisa dan Persepsi Ancaman Terhadap NKRI*, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 29 Agustus 2006

(berseberangan, *oposite*) atau yang berdampingan dalam satu daratan (*adjasent*). Sebagai negara kepulauan dimana sebagian besar wilayahnya adalah laut, seharusnya ancaman dalam konteks kedaulatan/eksistensi diwilayah laut diimbangi dengan kesiapan Alutsista yang baik.

Akan tetapi, berdasarkan paparan hasil audit di hadapan Komisi I DPR, Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono menyebutkan Alutsista berupa kendaraan tempur TNI Angkatan Darat 61,81%, kapal perang TNI angkatan laut 16,55%, dan kesiapan pesawat tempur TNI Angkatan Udara sekitar 30,88%. Jika dirata-rata hasil audit menyebutkan kesiapan rata-rata Alutsista TNI hanya 35%. Dari hasil audit juga tergambar keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan Alutsista mengakibatkan TNI masih melakukan kanibalisme dan memperpanjang usia pakai pada suku cadang tertentu guna memenuhi kebutuhan operasional. keterbatasan anggaran yang berujung pada kesiapan Alutsista itu berpengaruh terhadap latihan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Keterbatasan anggaran juga menyebabkan berkurangnya alokasi untuk membeli Alutsista baru. Padahal Alutsista baru sangat diperlukan dalam usaha mengamankan wilayah Indonesia dari berbagai ancaman dari darat, laut dan udara yang semakin modern. Khususnya wilayah perairan Indonesia yang lebih besar ternyata Alutsista TNI Angkatan Laut (AL) paling kecil kesiapannya dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia. Keterbatasan kesiapan TNI AL tersebut sangat mengkhawatirkan karena banyak sekali titik rawan di wilayah perairan yang dapat mengancam dan merugikan kedaulatan Indonesia. Dari praktik penangkapan ikan ilegal saja telah menjadi permasalahan yang serius. Ekonomi Indonesia mengalami kerugian serius akibat praktik ini, yang mencapai Rp 30 triliun per tahun.⁴

Dengan keterbatasan anggaran tersebut tidaklah mungkin untuk melakukan kebijakan *preemptive self defence*⁵ seperti yang dilakukan Amerika

⁴ Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan, *Refleksi 2008 dan Outlook 2009*, Jakarta: DKP, 2008, h. 2

⁵ W. Michael Reisman and Andrea Armstrong, *The Past and Future of the Claim of Preemptive Self-Defense*, *The American Journal of International Law*, Vol. 100, No. 3 (Jul., 2006), pp. 525-550.

Serikat untuk mempertahankan keamanan negaranya. Padahal tujuan utama negara dan bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV berbunyi “pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. UUD 1945 alinea IV tersebut mewajibkan negara untuk menciptakan atau mewujudkan keamanan nasional.

Keamanan nasional (*Nasional Security*) merupakan kebutuhan mutlak suatu negara, baik dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Upaya untuk memperoleh dan mempertahankan keamanan nasional tersebut merupakan tugas utama militer, terutama yang berkaitan dengan ancaman dari luar (Dewi Fortuna, 2004). Dalam hal ini, kekuatan militer, khususnya TNI AL memainkan peranan penting sebagai instrument politik kepentingan nasional.⁶ Selain itu, R.S. Cline menjelaskan bahwa *power* sebuah negara tidak hanya di bentuk oleh kekuatan ekonomi, strategi, sasaran, dan *critical mass* saja, faktor militer turut memainkan peranan.⁷ Melihat bagaimana besarnya peran TNI AL dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan perairan Indonesia akan tetapi, dilain sisi kesiapan Alutsista dalam pengamanan sangat terbatas.

Sejalan dengan perkembangan ini, dan dipicu oleh upaya perang melawan terorisme, bahkan saat ini negara-negara di dunia telah mengembangkan senjata rudal dan pencegahannya⁸, di Indonesia lahir berberapa masalah yaitu, perbatasan wilayah perairan, keamanan jalur perdagangan laut dan kontrol atas barang-barang yang diangkut yang kemudian melahirkan ISPS (*International Ship and Port Security*), PSI (*Proliferation Security Initiative*), MSI (*Maritime Security Initiatives*), dan CSI (*Container Security Initiative*). Masalah-masalah ini juga menjadi salah satu pemicu lahirnya berbagai bentuk intervensi dan inisiatif oleh

⁶ Vladimir Plotnikov, Headquarter of Russian Airborne Troop dalam *Use of Force in Resolving Military Conflict: Ways to Increase Efficiency*. h. 115

⁷ Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.h. 40

⁸ Stephen L. Quackenbush, *National Missile Defense and Deterrence, Political Research Quarterly*, Vol. 59, No. 4 (Dec., 2006), pp. 533-541

negara-negara besar untuk memainkan peran di kawasan sekitar Indonesia. Tidak dapat dipungkiri kedaulatan perairan NKRI dan keamanan maritim akan menjadi isu transnasional paling dominan.

1.2 Perumusan Masalah

Tantangan keamanan laut Indonesia membuat negara kepulauan ini memerlukan Alutsista angkatan laut yang kuat. Berbagai kasus yang timbul di perairan Indonesia dalam segi kedaulatan dan segi keamanan dari sangketa perbatasan perairan, keamanan jalur perdagangan laut, perebutan kepentingan, dan permasalahan lainnya memberikan pertanyaan besar pada kekuatan Alutsista Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Peran intelijen dalam memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini untuk memperkuat kekuatan Alutsista TNI AL sangat diperlukan. Oleh karena itu, beberapa pertanyaan sebagai masukan untuk pemerintah antara lain:

1. Bagaimana strategi TNI AL yang tepat dalam menghadapi berbagai ancaman kedaulatan di perairan Indonesia dihadapkan dengan lemahnya Alutsista TNI AL?
2. Bagaimana strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan potensi lainnya untuk mendukung kebutuhan Alutsista TNI AL?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang melatar belakangi untuk dilakukan penelitian ini. Untuk itu penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui dan memahami strategi tepat TNI AL menghadapi berbagai ancaman kedaulatan di perairan Indonesia dengan menggunakan Alutsista yang lemah serta mencoba menjelaskan strategi yang harus dilakukan dengan menggunakan potensi lainnya sehingga dapat mendukung kebutuhan Alutsista TNI AL dalam upaya mengamankan kedaulatan perairan NKRI.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk mempertahankan dan mengamankan kedaulatan perairan Indonesia dan bagaimana intelijen mampu memberikan *Warning, Forecasting dan Problem Solving* dalam melihat lemahnya Alutsista TNI AL. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat dijadikan bahan referensi untuk studi lanjutan.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatoris yang didasarkan pada kondisi dan kenyataan yang sedang berlangsung pada objek penelitian. Hasilnya dapat dijadikan dasar dalam penulisan penelitian ini serta dapat dijadikan sebagai acuan.

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

1.5.1.1 Studi Pustaka

Studi pustaka dengan mengumpulkan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang dijadikan topik penelitian ini. Artikel tersebut didapat dari buku-buku, website, dan dari sumber lainnya yang mungkin diperoleh sebagai landasan dalam pembahasan masalah.

1.5.2 Sumber Data

1.5.2.1 Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berasal dari diskusi, wawancara dan elisitasi dengan pejabat TNI AL dan pejabat Kementerian Pertahanan.

1.5.2.2 Data Sekunder

Merupakan data-data yang diperoleh dengan *literature* yang berhubungan dengan penulisan ini.

1.5.3 Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis terhadap strategi objek penelitian. Analisis ini meliputi terhadap faktor internal maupun eksternal. Analisis faktor internal yaitu terkait Alutsista TNI AL. Sedangkan untuk analisis eksternal meliputi analisis terhadap kondisi Alutsista negara sekawasan dan berbatasan serta, analisa strategi objek penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun rencana dari sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I

Bab ini merupakan pendahuluan menguraikan tentang: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori mengenai strategi objek penelitian yang meliputi: Teori Strategi Maritim, Teori Perang Laut, Konsep Kedaulatan Perairan, Teori Pertahanan dan Teori Intelijen.

BAB III

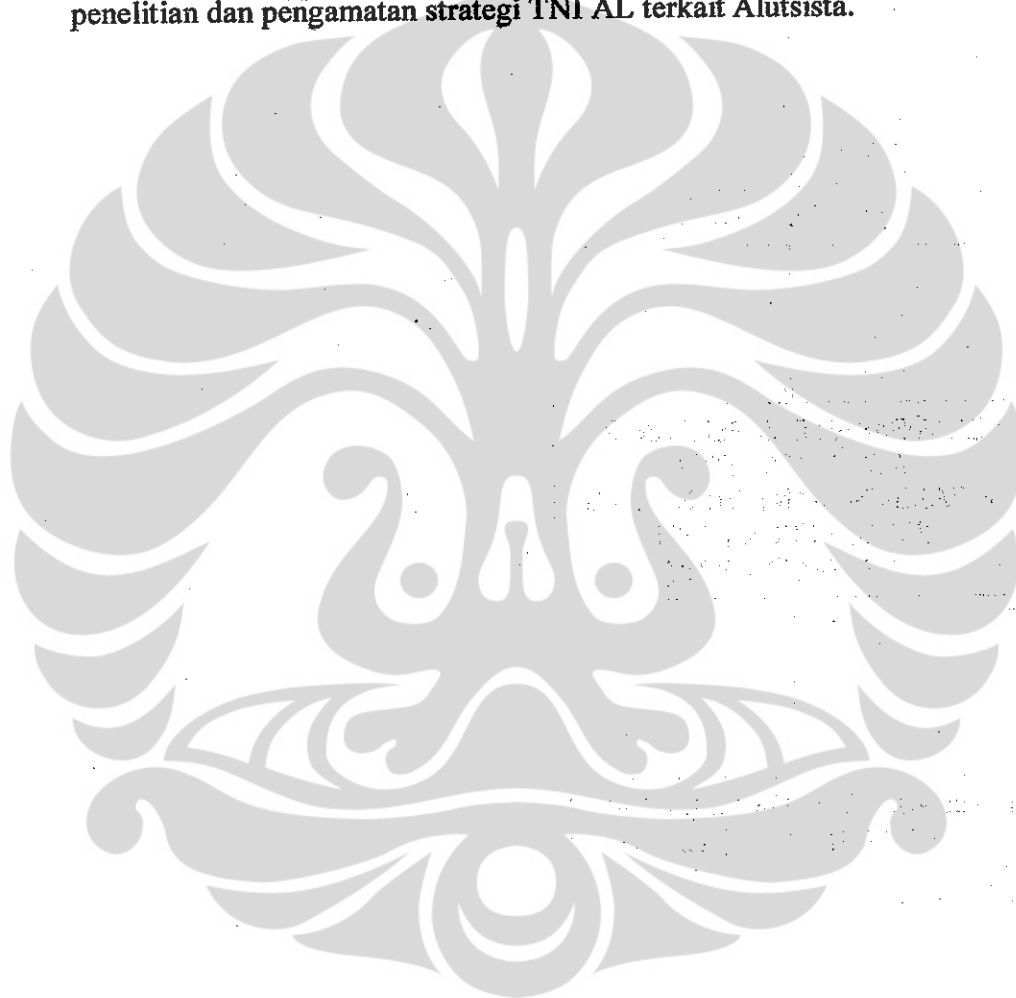
Dalam bab ini menjelaskan mengenai keadaan umum objek penelitian yang terdiri atas : Keadaan Lingkungan Strategis yang dihadapi Indonesia, data Alutsista negara dalam lingkungan terdekat dan Kondisi Alutsista TNI AL saat ini.

BAB IV

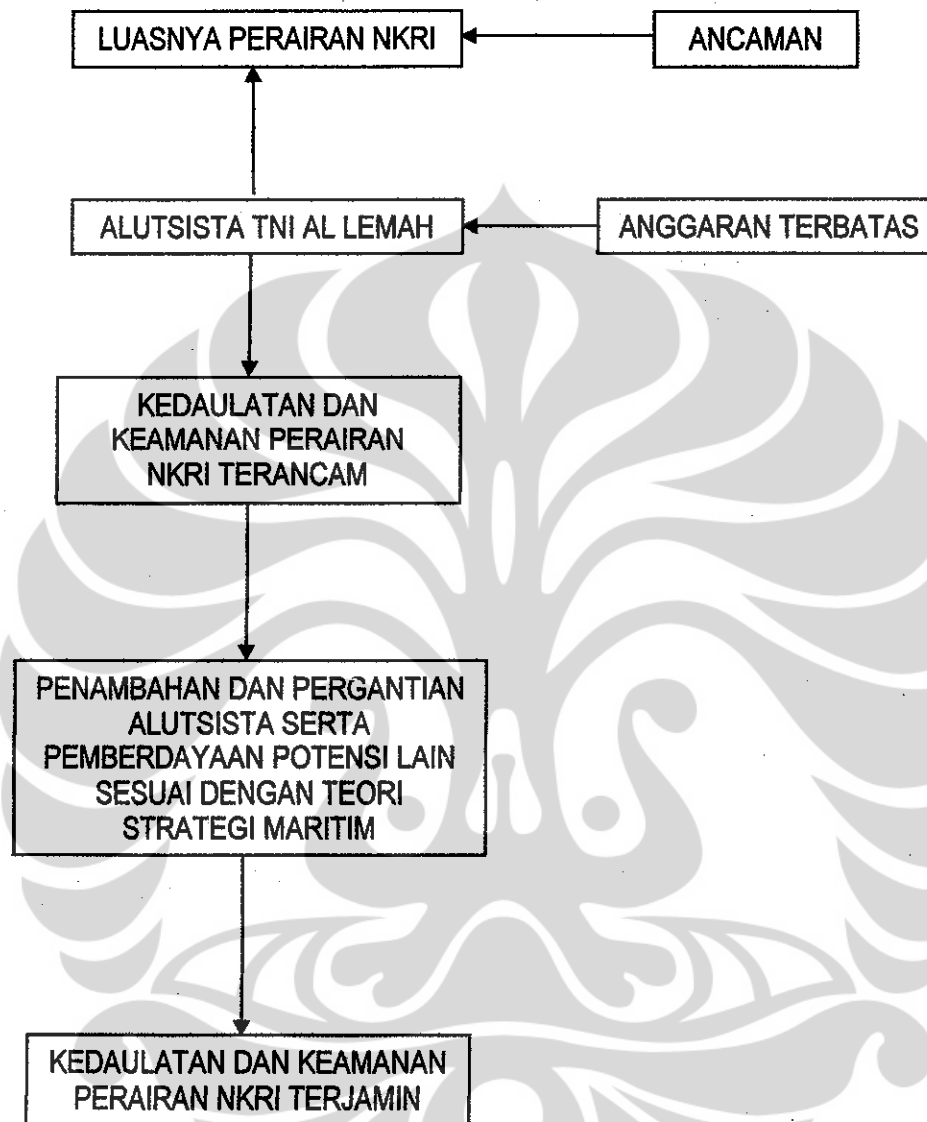
Dalam bab ini berisi tentang analisis terhadap strategi TNI AL kedepan terkait Alutsista.

BAB V

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil penelitian dan pengamatan strategi TNI AL terkait Alutsista.



1.7 Alur Pikir



BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 TEORI STRATEGI MARITIM

Pada mulanya kata strategi hanya dikenal dan digunakan dikalangan terbatas yaitu dikalangan militer saja, karena memang selalu berkonotasi dengan perang, oleh sebab itu sering didefinisikan dengan sesuatu yang berhubungan dengan sarana militer, kekuatan militer, medan tempur dan sebagainya. Sebagai contoh, Clausewitz mendefinisikan sebagai; penggunaan pertempuran untuk mendapatkan tujuan akhir dari perang. Liddell Harts⁹ mendefinisikan; seni menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan politik. Sedangkan, menurut Napoleon strategi diartikan sebagai taktik besar (*grand tactic*). Dalam perkembangannya selama berabad-abad sampai dengan perang moderen saat ini, salah seorang pemikirnya yaitu Admiral. Henry E.Eccles (*US Naval War College*)¹⁰, memformulasikan; *Strategy is the Art of comprehensive direction of Power to control situations and areas in order to attain objectives.*

Dari berbagai contoh definisi diatas sekalipun telah berkembang sedemikian rupa sejalan dengan perkembangan jaman, strategi selalu mengandung 3 (tiga) elemen dasar yang membangunnya yaitu, ada Tujuan (*Ends*), ada Sarana (*Means*) dan ada Cara (*Ways*) untuk mencapainya.¹¹ Akan tetapi, berbicara tentang strategi tidak terlepas dari strategi sebagai inti ajaran Sun Tzu, yakni mengenali musuh dan diri sendiri, memusatkan kekuatan untuk memusnahkan musuh, menaklukkan musuh tanpa bertempur, memilih panglima handal, dan berperang demi keadilan. Pengertian tentang Strategi memang sangat bervariasi maka formulasi dari Yarger¹² bisa dijadikan rujukan dimana strategi adalah

⁹ Willy F. Sumakul, *Seni Operasi Dalam Praktek di Indonesia*, Jakarta:FKPM, 2009. h. 13

¹⁰ Willy F. Sumakul, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Menyusun Strategi Maritim Di Indonesia*, Jakarta:FKPM, 2010. h. 9

¹¹ Willy F. Sumakul, *Strategi Maritim, Postur Angkatan laut RI dan Tantangan Masa Kini*, Jakarta:FKPM, 2010. h. 2

¹² Budiman Djoko Said, *Menuju Konsep Strategi*, Jakarta:FKPM, 2009. h. 11

penggunaan instrumen atau elemen kekuatan nasional (politik, diplomatik, ekonomi, militer, dan informasi) untuk mencapai tujuan nasional.

Strategi militer dan strategi matra (angkatan), adalah merupakan penjabaran ke bawah dari Strategi Besar, yang disusun dan dilaksanakan bersama-sama dengan strategi bidang-bidang yang lain. Bedanya sarana (*means*) yang digunakan adalah murni kekuatan militer oleh karena itu, menurut Dennis M. Drew, Strategi Militer didefinisikan sebagai: *The Art and Science of coordinating the development, deployment, and employment of military forces to achieve national security objectives*, dengan kata lain, strategi militer adalah aplikasi dari strategi besar (*grand strategy*) dibidang Militer.¹³

Melihat sejarah dan perkembangan beberapa negara maritim maju dimana tradisi angkatan lautnya begitu kuat seperti Inggris, tidak tampak adanya perbedaan antara strategi maritim dan strategi angkatan laut, karena seluruh potensi bangsa dan negara dibidang maritim diarahkan untuk mencapai kepentingan keamanan nasional di laut. Adanya kekuatan angkatan laut yang kuat akan memelopori dan mengkoordinasikan kekuatan maritim yang lain untuk menyusun cara terbaik dan aplikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga tidak perlu diperdebatkan perbedaan antara strategi maritim dan strategi angkatan laut.

2.1.1 Pandangan Tentang Laut

Dalam membahas tentang laut tidak bisa dipisahkan dengan pandangan Mahan¹⁴, menurutnya laut adalah jalan raya (*Highway*) untuk dapat bergerak bebas dalam memenuhi kebutuhan hidup suatu bangsa, karena laut merupakan hal essential bagi kesejahteraan dan keamanan suatu bangsa. Untuk dapat bergerak bebas di lautan dibutuhkan empat syarat dasar yaitu:

- 1) Harus memiliki produksi dan mengadakan pertukaran produk dengan negara lain.

¹³ *Ibid* h. 4

¹⁴ A.T. Mahan, *The Influence of Sea Power Upon History 1630-1788*, Dover Publication, New York:1980. h. 24-59

- 2) Harus terdapat perkapalan sebagai sarana untuk pertukaran produksi
- 3) Pangkalan-pangkalan tempat-tempet bersandar kapal-kapal asing harus dijaga/diamankan untuk menjamin lancarnya pasaran produksi dan lalu lintas kapal.
- 4) Harus ada angkatan bersenjata (angkatan laut) untuk menjaga keamanan masyarakat dan pangkalan-pangkalan di dalam negeri.

Setiap negara tidak mempunyai potensi sama untuk memiliki kekuatan laut. Menurut Mahan, harus ada enam faktor yang merupakan kondisi alamiah untuk mewujudkan suatu kekuatan laut, yaitu:

- 1) Posisi geografis. Posisi geografis suatu negara yang terdiri dari laut akan menguntungkan bagi konsentrasi kekuatan-kekuatan angkatan lautnya, tetapi juga memberikan keuntungan strategis sebagai posisi sentral dan suatu basis yang baik untuk operasi-operasi terhadap musuh.
- 2) Keadaan fisik wilayah. Keadaan wilayah sangat menentukan dalam transaksi masyarakatnya dengan dunia luar. Pelabuhan merupakan sumber kekuatan laut, apalagi dengan pelabuhan yang terletak dekat pantai dapat memberikan fasilitas konsentrasi dalam kegiatan perdagangan dalam negeri, sebaliknya juga dapat menimbulkan kerawanan sebagai sumber kelemahan pada waktu perang jika tidak mempunyai kekuatan laut yang baik.
- 3) Luas wilayah. Panjang garis pantai dan sifat-sifat pelabuhan menjadi titik perhatian. Panjangnya garis pantai memungkinkan untuk dibangun pelabuhan-pelabuhan, sehingga rakyat dapat bergerak bebas dalam memajukan perdagangan dan perkapalan.
- 4) Jumlah penduduk. Jumlah penduduk produktif dan mengerti tentang maritim sangat mendukung dalam mengembangkan kekuatan laut.
- 5) Sifat-sifat rakyat. Kemauan keras rakyat dalam perdagangan dan kemaritiman memberikan peluang bagi suatu negara untuk membangun suatu kekuatan laut.

- 6) Sifat pemerintah. Struktur pemerintah, administrasi, keinginan politik, dan kepemimpinan nasional sangat mempengaruhi perkembangan kekuatan laut suatu negara.

Soewarso¹⁵, memandang laut sebagai lingkungan hidup yang harus dipelihara guna menjamin kepentingan manusia di darat. Pandangannya berdasarkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk daratan, sedangkan manusia menggunakan laut untuk menjamin kelangsungan hidupnya sebagai makhluk daratan. Jadi dalam tingkat nasional, suatu bangsa menggunakan laut didasarkan pada persepsi mengenai laut sebagai lingkungan yang harus dijaga untuk kepentingan darat. Untuk menjamin eksistensi makhluk daratan tersebut, Gretton¹⁶ menilai setidaknya ada tiga hal yang masih relevan terkait laut yaitu, kekuatan, keamanan, dan transportasinya. Dari ketiga hal tersebut, Gretton menguraikannya dengan membagi prinsip-prinsip strategi maritim pada masa damai dan perang :

1) Prinsip pada masa damai.

- a) Kebutuhan untuk mempertahankan kekuatan dengan kapal besar sehingga dapat menyeimbangkan dengan kekuatan musuh yang potensial.
- b) Kebutuhan untuk memelihara kekuatan dari kapal-kapal dan pesawat untuk mempertahankan perdagangan yang secara potensial banyak mengalami ancaman-ancaman.
- c) Kebutuhan untuk memelihara kapal-kapal termasuk kapal kecil untuk melindungi kekuatan-kekuatan militer.
- d) Kebutuhan untuk memberikan keamanan pada basis yang membutuhkan dukungan operasi angkatan laut.
- e) Mendukung pelaksanaan hukum laut Internasional.

¹⁵ Soewarso, dalam *Cipta Selecta Masalah Pertahanan*, Jakarta: 1982

¹⁶ Sir P Gretton, *Maritim Strategy, A Study of British Defence Problem*, Cassel, London: 1965. h. 23-24

2) Prinsip pada masa perang.

- a) Kebutuhan untuk menyerang atau melumpuhkan armada utama musuh.
- b) Kebutuhan untuk mencegah invasi terhadap wilayah pulau dengan kekuatan kelautan daripada dengan pengerahan tentara yang banyak.
- c) Penggunaan laut untuk mempertahankan posisi daratan dari serangan musuh.
- d) Kebutuhan untuk memutuskan komunikasi melalui laut dari musuh, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi musuh.
- e) Kebutuhan yang memadai dengan pertahanan udara sehingga dapat menangkai pembom dari udara.
- f) Kebutuhan untuk digunakan sebagai pengawal kapal dagang.

Sam J. Tangredi¹⁷ dalam pandangannya menyatakan kekuatan laut memerlukan setidaknya 4 (empat) elemen atau unsur yaitu:

- 1) Penguasaan atas perdagangan dan perniagaan Internasional.
- 2) Penggunaan dan penguasaan atas sumber daya laut
- 3) Kemampuan operasi angkatan laut dalam waktu perang
- 4) Penggunaan angkatan laut dan kekuatan ekonomi maritim sebagai instrumen diplomasi serta pencegahan pengaruh politik dimasa damai.

Walaupun perdagangan laut, kegiatan pelabuhan laut sumber daya alam bawah laut, armada perikanan, dan bentuk-bentuk lain perniagaan dan komunikasi melalui *medium* cair dilihat secara integral sebagai kekuatan laut bangsa dan negara, tetapi angkatan laut jelas merupakan elemen bersenjata paling penting sebagai kekuatan laut.

Dalam arti yang lebih luas, Tangredi mengatakan, kekuatan laut moderen dapat didefinisikan sebuah kombinasi kemampuan suatu negara bangsa untuk perdagangan maritim internasional dan menggunakan sumber daya kelautan dengan kemampuan untuk proyeksi kekuatan militer di laut, dalam tatanan untuk mempengaruhi daratan dengan kekuatan angkatan laut. Pentingnya kekuatan laut

¹⁷ Sam J. Tangredi, *Globalization and Maritime Power*, INSS-NDU, Ft. Mc. Nair: 2002. h. 30

didasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya; 70 persen permukaan dunia ditutupi oleh lautan, 90 persen perdagangan internasional baik berat maupun volume diantar melalui laut, mayoritas kota-kota utama di dunia dan populasi urban membentang dalam radius 200 km dari garis pantai, hukum internasional menyediakan kebebasan dalam pelayaran di laut. S.W. Roskill¹⁸ dalam bukunya tentang “*The Strategy of Sea Power*” menyatakan, bahwa fungsi daripada suatu kekuatan laut adalah untuk memenangkan dan menjamin pengendalian laut untuk kepentingan penggunaan sendiri serta mencegah penggunaannya oleh lawan. Sementara peranannya untuk menciptakan kemakmuran dilaksanakan dengan pertukaran dan perdagangan barang-barang melalui suasana damai. Sedangkan, Sergei G. Gorshkov¹⁹ mengatakan, bahwa esensi kekuatan laut pada suatu negara adalah seberapa jauh kemampuan dari negara untuk membuat lebih efektif menggunakan samudera dunia (*word ocean*) dalam suatu kepentingan negara secara menyeluruh, khususnya keberadaan angkatan laut sejak keberadaan sistem sosial yang berlawanan (*antagonis*) di dunia.

Secara alamiah kekuatan angkatan laut bersama-sama dengan komponen-komponen lainnya untuk melindungi negara dari ancaman serangan lewat laut, terutama ancaman militer terbesar pada keamanan laut. Aspek materi dari kekuatan laut, karakteristiknya adalah kemampuan yang nyata dari negara terhadap agresi dari laut, secara tetap berlanjut membangun dan meningkatkan keahlian angkatan laut dalam bagian angkatan bersenjata. Geoffrey Till dalam pandangannya menyatakan, kekuatan laut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu sumber-sumber kekuatan (*sources*) dan unsur-unsur kekuatan (*elements*). Sumber-sumber kekuatan tersebut adalah geografi, sumber daya, sebuah masyarakat maritim, dan gaya pemerintahan (*political will*). Sedangkan, unsur-unsur yang membentuk kekuatan laut, yakni armada perdagangan niaga, pangkalan-pangkalan, dan instrumen kapal perang.²⁰

¹⁸ Soeharto, *Suatu Pemikiran Tentang Strategi Hankam Matra Laut Indonesia dan Implementasinya Menjelang Tahun 2000*, Jakarta: SeskoAL, 1987. h. 18

¹⁹ Sergie Groshkov, *The Sea Power of the State*, Pergamon Press, Oxford: 1979. h. 1

²⁰ Djoko Pramono, *Budaya Bahari*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005. h. 48

Sementara itu, William Ratzel menyatakan, kekuatan maritim adalah sistem menyeluruh dan kompleks yang terdiri dari dua sub sistem, yaitu kekuatan laut dan angkatan laut. kekuatan maritim bertumpu pada lokasi geografi dan masyarakat, sedangkan kekuatan laut terdiri dari kapal-kapal, pangkalan-pangkalan dan sarana pendukungnya.²¹ Dengan adanya angkatan laut yang kuat, maka kekuatan pertahanan diharapkan memiliki tiga kemampuan utama, yaitu daya penggetar (*deterrence*), daya perusak (*fire power*) yang cukup menggigit, serta mampu melakukan perang berkepanjangan (*protracted war*).²²

2.1.2 Hakekat Hankam dan Kepentingan Nasional di Laut

Hakekat Hankam di laut seperti pandangan Parapat²³ adalah sebagai berikut:

- 1) Eksistensi angkatan laut
 - a) Manusia sebagai “makhluk daratan” selalu berjuang untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keamanan serta mendambakan kebahagiaan hidup (di darat) menurut norma-norma atau nilai-nilai yang diinginkan.
 - b) Terdorong oleh tuntutan hidup yang selalu meningkat dari zaman ke zaman akhirnya mereka keluar dari wilayah darat, pergi menyeberang laut mencari nafkah, dan mencari kekayaan kehidupan. Demikian akhirnya laut digunakan sebagai jalur perdagangan, jalur ekonomi dan jalur kehidupan bangsa.
 - c) Setiap bangsa di dunia ingin mewujudkan kesejahteraan dan keamanan karena itulah setiap negara menetapkan tujuan perjuangannya selalu mencakup baik kesejahteraan maupun keamanan. Lahirnya angkatan laut hakekatnya adalah sebagai penjamin kelangsungan kepentingan nasional di atau lewat laut tersebut yang pada gilirannya sebagai sarana penjamin dan pengukuh kelangsungan kesejahteraan dan keamanan di daratan.
 - d) Oleh karena itu, bangsa-bangsa di dunia selalu berpikir bagaimana untuk memiliki kekuatan angkatan laut yang memadai dan bagaimana angkatan laut tersebut disusun demi pengamanan dan pencapaian tujuan perjuangan bangsa.
- 2) Perbedaan asasi medan laut terhadap daratan

²¹ Soewarso, *Tinjauan umum tentang ketahanan nasional*, Jakarta: STTAL, 1981. h. 391-392

²² Robert Mangindaan, *Suatu Wacana Tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara*, dalam *Dharma Wiratama* No. DW/119/2003, h.139

²³ F.M Parapat, PhD, *Pandangan Umum dan Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pengembangan Industri Hankam Bidang Maritim*, Jakarta: TNI AL, 1980. h. 238-240

- a) Di darat kita mengenal adanya gunung, hutan, padang pasir, lembah, sungai dan lain sebagainya. Kondisi medan dapat membawa implikasi dalam penentuan peralatan dan gerakan militer yang disesuaikan dengan kondisi medannya. Pada gerakan militer di darat kita mengenal adanya gerakan *ofensif* dalam murni.
- b) Di laut tidak ada komplikasi medan, seperti halnya di darat, dimana tidak terdapat gunung, hutan, padang pasir dan lain sebagainya. Gerakan operasi tempur laut pada hakekatnya hanyalah bersifat *ofensif* dari gerakan taktis tunggal sampai gerakan kekuatan armada secara umum. Kita mengenal "*Defence at Sea*" dilihat dari segi tujuannya tetapi dalam pelaksanaannya harus bersifat *ofensif* tempur laut.
- c) Material kapal tempur yang digunakan oleh angkatan laut di seluruh dunia pada hakekatnya adalah sama, perbedaannya terletak pada kepentingan dan kemampuan negara yang berlainan. Kapal pada umumnya, kapal pada khususnya, merupakan sarana dan wahana operasi laut yang bersifat abadi. Perbedaannya terdapat pada jenis kemampuan tempur dan daya tempur yang dimungkinkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Material tempur laut yang berupa kapal perang, bersifat sangat peka terhadap kemajuan teknologi.

Sementara itu, hakekat perairan Indonesia bagi kepentingan nasional:²⁴

- 1) Perairan Indonesia yang mengelilingi dan berada diantara kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nasional Indonesia, yang sekaligus sebagai faktor penentu terwujudnya kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya dan kesatuan Hankam bangsa Indonesia.
- 2) Perairan Indonesia merupakan sumber kekayaan, hayati, dan non hayati, sarana pelayaran dan perdagangan, baik antar pulau, maupun antar negara. Pada hakikatnya perairan Indonesia merupakan ruang hidup bangsa Indonesia dalam perjuangan mencapai tujuan nasional.
- 3) Peranan Angkatan Laut
 - a) Kekuatan angkatan laut merupakan penjamin terhadap sistem pertahanan yang memiliki kemampuan proyeksi dan anti proyeksi kekuatan.

²⁴ *Sistem Nasional di Laut dalam rangka Implementasi Wanus*, Jakarta: Dephankam, 1980. h. 15

- b) Sistem pertahanan adalah penjamin kelangsungan kesejahteraan dan keamanan, dan berarti menjamin kepentingan nasional. Dengan demikian tugas angkatan laut menjamin proyeksi kepentingan nasional di dan lewat laut.
- c) Untuk menentukan peranan tersebut, angkatan laut harus menentukan, sasaran strategi yang jelas, pola strategi, dan susunan kekuatan.

4) Sasaran Strategi Laut

- a) Kekuatan angkatan laut ditujukan untuk menjamin proyeksi kepentingan nasional di dan lewat laut yang pada akhirnya sebagai penjamin kesejahteraan dan keamanan kehidupan di darat. Implementasi agar hal tersebut diatas dapat terwujud maka harus mampu mengontrol atau mengendalikan kawasan laut tertentu yang dinilai strategis vital. Setidaknya dalam hal ada ancaman di kawasan laut masih memiliki kemampuan mempertahankan laut dalam pertikaian.
- b) Kemampuan mengontrol atau mengendalikan kawasan laut dan mempertahankan laut dalam pertikaian, masing-masing merupakan sasaran maksimal dan minimal. Apabila sama sekali tidak memiliki kemampuan tersebut, yaitu kemampuan pengendalian laut dalam pertikaian, maka keamanan dan keutuhan wilayah nasional sebagian atau seluruh wilayah nasional tersebut terbuka bagi gangguan pihak lawan.

5) Pola Strategi Laut

Pola strategi laut tergantung pada kemampuan nasional suatu negara, dimana negara tersebut dapat menganut pola strategi Armada Tempur, Armada Siaga, dan Armada Perburuan.

6) Kekuatan Angkatan Laut

- a) Kekuatan angkatan laut ditentukan oleh kapal yang diukur dengan persenjataannya, jenisnya, jumlahnya, dan mutu personilnya yang secara keseluruhan mencerminkan daya kemampuan operasi tempurnya yang berlanjut.

- b) Pola perkembangan mutakhir menghendaki Sistem Sejata Armada Terpadu (SSAT) dengan komponen yang terdiri dari Kapal, Marinir, Pesawat Udara, dan pangkalan dengan fasilitas labuh, pemeliharaan dan perbaikan kapal, serta perbekalan dan perawatan personil.

2.2 TEORI PERANG LAUT

Laut selain berfungsi sebagai media transformasi dan media pemersatu, juga berfungsi sebagai media perang di laut. Medan perang dilaut sangat spesifik disebabkan sifat-sifat alamnya khas. Air laut berhubungan satu dengan yang lain, tidak mempunyai batas alam dan tidak mungkin dibuatkan pagar pembatas, sehingga di laut tidak dikenal adanya pembagian medan-medan pertahanan berlapis, karena seluruh laut bebas di muka bumi merupakan medan perang bagi pihak-pihak berperang.²⁵ Begitu juga dengan sejarah perang dunia I dan perang dunia II juga menggunakan laut bebas dalam pertempuran antar negara.

Peperangan di laut merupakan suatu pertikaian antara dua pihak atau lebih dimana paling sedikit satu pihak yang bertentangan tersebut beroperasi di laut dengan menggunakan kapal-kapal permukaan, kapal-kapal selam dan pesawat terbang yang berpangkalan di laut (kapal induk pesawat terbang). Dimensi peperangan meliputi permukaan, bawah permukaan dan udara.²⁶ Dalam pandangan Mahan tujuan politik dari perang laut adalah penghancuran atau netralitas armada lawan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan salah satu atau gabungan antar sarana diantaranya, pertempuran di laut yang sebesar-besarnya, blokade di pelabuhan, dan blokade jarak jauh pelabuhan dengan maksud agar lawan terpaksa terjun dalam pertempuran besar. Dalam strategi angkatan laut, Mahan mengatakan, laut harus dikuasai karena kesejahteraan suatu negara tergantung kepada penguasaan laut. Selain itu, penguasaan laut dapat mendorong kekuatan politik suatu negara. Dalam penekanannya dalam perang laut dikatakan bahwa tugas utama angkatan laut adalah penghancuran kekuatan terorganisir lawan sehingga tercapainya kuasa atas laut. Dengan kata lain, secara strategi dan

²⁵ Wahyono S. K, *Indonesia Negara Maritim*, Jakarta:Teraju, 2009. h. 137

²⁶ Haryono, *Peperangan Laut Pada Abad XXI dan Antisipasi Bagi Armada RI*, Jakarta: Sesko AL, 1995. h. 1

taktik angkatan laut harus digunakan dengan cara *ofensif*, dimana kemampuan *ofensif* maksimum hanya bisa didapat dengan pemusatan bukan dengan memecah-mecah kekuatan (*Never divide the fleet*). Mahan membagi strategi laut kedalam empat bidang, yaitu:

- 1) Konsentrasi kekuatan
- 2) Perlunya posisi-posisi atau garis-garis pusat
- 3) Perlunya garis dalam dari gerakan relatif terhadap posisi pusat
- 4) Jaring komunikasi ditinjau dari kemampuan kekuatan untuk memelihara dan menggunakannya.

Selain itu, di laut terdapat dua jenis titik strategi yang menentukan, yaitu pangkalan dan tempat yang dikuasai oleh satuan armada. Sedangkan, Corbett setuju dengan konsep Clausewitz bahwa perang adalah penggunaan kekerasan untuk mengamankan tujuan politik yang dikehendaki. Tujuan perang laut harus diarahkan secara langsung atau tidak langsung, baik untuk mengamankan penguasaan laut atau untuk mencegah lawan mengamatkannya. Penguasaan laut adalah pengendalian perhubungan maritim untuk tujuan tertentu. Pengendalian dalam hal ini berarti kemampuan untuk bergerak melintas laut tanpa gangguan atau perlawanan yang berarti dan kemampuan untuk mencegah lawan melakukan gerakan tersebut. Pada waktu perang laut, operasi angkatan laut dapat diklasifikasikan untuk memperoleh penguasaan laut, mempertahankan penguasaan laut, dan melaksanakan pengendalian laut. Pengendalian laut juga bisa dengan mengendalikan perairan-perairan tertentu. Corbett mengajukan konsep strategi yang lebih fleksibel sehingga untuk melaksanakan pengendalian secara efektif kita harus mempunyai berbagai jenis kapal, baik kapal besar dan kapal kecil yang lincah dimana akan digunakan untuk kebutuhan penyebaran dan pembagian sebagaimana juga konsentrasi/pemusatan.²⁷

²⁷ Soewarso, *Evolusi Pemikiran Masalah keangkatan lautan*, Jakarta: Sesko AL 1998. h. 15-20

Dalam perang dilaut tidak mengenal adanya daerah pertempuran (*battle fronts*), atau garis pertempuran (*front lines*) yang memisahkan antara pihak yang menyerang dengan pihak yang bertahan. Perang di laut juga tidak mengenal adanya titik-titik pertahanan yang diperkuat (*strongholds*), seperti yang terjadi dalam perang darat. Seluruh laut dan samudera merupakan padang perburuan, baik bagi yang menyerang maupun bagi yang bertahan. Perang di laut pada dasarnya adalah perang *ofensif*, karena masing-masing berusaha untuk menyerang lebih dulu karena sama-sama menghadapi medan terbuka. Dalam medan terbuka tersebut akan terjadi perang yang meliputi:²⁸

- 1) Peperangan anti Udara
- 2) Peperangan anti kapal selam
- 3) Peperangan anti kapal permukaan
- 4) Peperangan gempuran
- 5) Peperangan ranjau
- 6) Peperangan amfibi
- 7) Peperangan perbantuan
 - a) Peperangan khusus
 - b) Pengamatan samudera
 - c) Intelijen
 - d) Komando, Kendali dan Komunikasi (K3)
 - e) Peperangan elektronik
 - f) Logistik

Untuk mendukung perang dilaut suatu negara tentunya sangat bertumpu pada kekuatan Alutsista angkatan lautnya, karena Alutsista merupakan komponen terpenting bagi postur pertahanan, seperti diungkapkan Ikrar Nusa Bakti bahwa dalam kamus perang modern kekuatan suatu pasukan adalah tergantung kepada persenjataan yang dimiliki selain dari kekuatan personil.²⁹

²⁸ Haryono, *Op cit*, h. 3

²⁹ Dalam tesis Chairul Walid, *Analisis Anggaran Pertahanan Negara Periode 2001-2005 dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Nasional*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006. h. 65

Menurut *The Military Balance* kategorisasi persenjataan angkatan laut didasarkan pada peran operasional, kelayakan senjata, dan daya peluncuran. Kelas kapal diidentifikasi dengan nama kapal pertama, kecuali bila kelas itu dikenali dengan nama lain. Bila kelas itu didasarkan pada rancangan luar negeri atau sudah diakuisisi dari negara lain, nama kelas orisinil diberikan dalam kurung. Istilah “kapal besar (*ship*)” mengacu kepada kapal laut dengan kapasitas muat 1000 ton yang lebih dari 60 meter panjangnya; Kapal laut (*vessels*) dengan kekuatan yang lebih kurang, namun panjangnya 16 meter atau lebih diistilahkan dengan “*craft*”. Secara umum, untuk membantu perbandingan antar armada (*fleets*), dapat digunakan definisi berikut ini:³⁰

- 1) Kapal Selam (*Submarines*). Semua kapal laut (*vessel*) yang dilengkapi untuk operasi militer dan dirancang untuk operasi dibawah permukaan laut.
- 2) Kapal Tempur Laut Utama (*Principal Surface Combatant*). Istilah ini meliputi semua kapal laut dengan bobot 1000 ton dan sistem senjata dengan proteksi diri. Semua kapal tersebut diasumsikan memiliki kemampuan anti kapal laut. Mereka terdiri dari: *Aircraft Carrier* [Kapal Induk/Kapal angkut pesawat udara]; *Cruiser* [Penjelajah, lebih dari 8000 ton] dan *Destroyer* [Penghancur, kurang dari 8000 ton], keduanya memiliki peran anti udara dan juga memiliki kapabilitas anti kapal selam; dan *Frigates* [Perusak, kurang dari 8000 ton] yang secara normal memiliki peran anti kapal selam. Hanya kapal Laut Utama dengan dek penerbangan yang melebihi diatas 2/3 panjang kapal *vessel* diklasifikasikan sebagai *Aircraft Carriers*. Kapal Laut dengan dek penerbangan lebih pendek disebut sebagai *Helicopter Carriers*.
- 3) Kapal Tempur Pantai dan Patroli (*Patrol and Coastal Combatants*). Ini meliputi kapal utama dan *craft* yang peran utamanya adalah melindungi garis pantai dan laut sebuah negara. Yang terliput adalah: Kapal Korvet [*Corvettes*, 500-1500 ton dengan kapabilitas serang], *Missile Craft* [Craft berpeluru/rudal, dengan perlengkapan peluncur peluru permanen dan perlengkapan kontrol] dan *Torpedo Craft* [Craft bertorpedo, dengan torpedo

³⁰ Dalam Tesis Oman Heryaman, *Postur Militer Negara-Negara Asia Tenggara Dinamika Persenjataan dan Pergeseran Lingkungan Strategis Internasional dari Era ke Pasca Perang Dingin, Bagaimana Supremasi dan Postur Kekuatan Pertahanan Indonesia (TNI)?*, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, 2001. h. 60-62

anti kapal laut]. Kapal Utama dan *Craft* yang diluar definisi ini diklasifikasikan sebaga kapal patroli dan dibagi ke dalam “*offshore/lepas pantai*” (500 ton), “*coastal/pantai*” (75-500 ton), “*inshore/dalam pantai*” (kurang dari 75 ton), dan *riverine/kapal sungai*. Kata sifat “*Fast/Cepat*” menunjukkan bahwa kecepatan kapal tersebut lebih dari 30 knot.

- 4) Kapal Penyapu Ranjau (*Mine Warfare*). Istilah ini meliputi kapal *vessel* yang tugasnya secara primer meletakkan dan menyapu ranjau (seperti *mine-hunters/pemburu ranjau*, *minesweepers/penyapu ranjau* dan kapal dengan kemampuan baik pemburu maupun penyapu/*dual-capable vessels/kapal dengan fungsi ganda*). Kapal-kapal tersebut lebih lajut diklasifikasikan ke dalam *offshore*, *inshore*, *coastal* dan *riverine* dengan deskripsi *tonase/bobot* yang sama.
- 5) Kapal Amfibi (*Amphibious*). Istilah ini meliputi kapal yang secara spesifik dilengkapi dan dikaryakan untuk mendaratkan pasukan dengan perlengkapannya diatas bibir pantai dengan cara mendaratkan *craft* atau helikopter atau secara langsung mendukung operasi amfibi. Istilah “kapal pendarat/*landing ship*” (lawan untuk “*landing craft*”) mengacu kepada *vessel* yang mampu menjelajahi samudera yang mampu mengirimkan pasukan dan perlengkapan yang siap untuk bertempur.
- 6) Kapal Pendukung dan Lainnya (*Support and Miscellaneous*). Istilah ini mencakup kapal laut militer pembantu. Ia meliputi 4 kategori besar: “Pendukung” (misalnya Tanker dan Kapal Penyimpan/Gudang Perlengkapan [*tankers and store ships*]), “Pemeliharaan dan Logistik” (seperti kapal angkut laut [*seallift ships*]), “kapal tujuan khusus” (misalnya kapal tugas intelejen [*intelligence collection ships*]) dan “kapal survei dan riset” (*survey and research ships*).
- 7) Sistem Senjata (*Weapons System*). Senjata didaftar sebagai berikut: *land-attack missiles/LAM*, *anti-surface-ship-missiles/ASM*, *surface-to-air-missiles/SAM*, senjata (*guns*), torpedo, senjata anti kapal selam (*anti-submarine weapons/ASW*) lainnya, helikopter. Misil dengan kemampuan jelajah kurang dari 5 km, dan senjata dengan kaliber kurang dari 76 mm tidak dimasukkan.

Pengecualian mungkin bisa dibuat bila kapal tempur dengan kemampuan kecil dengan persenjataan yang kalibernya lebih kecil juga.

- 8) Pesawat Udara (*Aircraft*). Semua pesawat udara bersenjata, meliputi: Kapal Tempur anti kapal selam (*anti-submarine warfare/ASW*) dan patroli maritim (*maritime reconnaissance/MR*).

Permukaan laut yang datar dan terbuka menjadikan kapal induk (*aircraft carrier*) sangat berperan dalam perang laut dimana besarnya tergantung banyaknya muatan pesawat terbang tempur dan helikopter pengangkut pasukan marinir. Sedangkan, untuk memproyeksikan pasukan darat ke pantai musuh dalam operasi amfibi diperlukan kapal-kapal pendarat pasukan dan tank (*Landing Ship Tank*) dimana sekarang sudah mempunyai dua kemampuan (*Landing Platform Dock*) yaitu, pendaratan horizontal dengan kendaraan lapis baja angkut personil (*Armored Personnel Carrier*) dan tank, serta sekaligus pendaratan vertikal dengan helikopter. Kapal pendarat pasukan yang demikian hampir sama dengan kapal induk helikopter karena juga dilengkapi dengan fasilitas markas komando, yaitu fasilitas *Communication, Command, dan Control (C3)*.³¹

Sedangkan, untuk mengawal 6 juta km² laut Indonesia dibutuhkan 15 *fregat* di laut, 7 *fregat* di pangkalan untuk pemeliharaan agar pada waktunya dapat dikirim ke laut untuk pergantian. Selain itu, diperlukan 9 kapal selam untuk menjaga pintu masuk laut sendiri, menghancurkan perhubungan laut musuh, menggagalkan ekspedisi militer musuh, dan melindungi proyeksi kekuatan sendiri ke daratan musuh. Tugas pokok armada perang adalah untuk memburu dan menghancurkan (*to seek out and destroy*) armada perang musuh. Di masa damai gelar kapal perang di laut tertentu atau berkunjung dan mengadakan latihan bersama dengan kapal perang negara lain, dilaksanakan dalam rangka tugas diplomasi yang dikenal sebagai kehadiran kekuatan di laut (*naval presence*) atau penunjukkan bendera negara kapalnya (*showing the flag*) sebagai simbol

³¹ Wahyono S. K., *Op cit*, h. 138

kedaulatan negara. Penghadiran kekuatan dilaut adalah dalam rangka mendukung kepentingan nasional, menjaga persahabatan, dan stabilitas keamanan regional.³²

Connie Rahakundini Bakrie³³ dalam Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal dikatakan bahwa Alutsista TNI AL yang ideal berdasarkan perimbangan kekuatan militer di Asia Pasifik dan Asia Tenggara didasarkan pada persenjataan dasar yang harus dimiliki yaitu, kapal selam, kapal perang, kapal patroli, dan kapal pendukung. Untuk kapal selam TNI AL idealnya dilengkapi dengan 10 unit kapal selam kategori taktikal dengan tipe minimal SSN (*Attack Submarine Nuclear Powered*) dan 4 kapal selam berkategori strategik yang dilengkapi dengan SLBM (*Submarine Launch Ballistic Missile*) dimana perhitungannya didasarkan pada pembagian wilayah pertahanan ideal yang dibaginya menjadi empat wilayah pertahanan (Kowilhan), untuk kapal perang dibutuhkan kapal tipe *Destroyer* dan *Cruiser* masing-masing sebanyak 14 unit, *Aircraft Carrier* (CV) yang bisa menampung 50 pesawat, satu *Helipad*, dan RAM (*Rolling Airframe Missile*) SAM sebanyak 9 unit, *Aircraft Carrier Nuclear Powered* (CVN) sebanyak 4 unit, *Helicopter Carrier* dengan kapasitas 50 helikopter dan RAM SAM sebanyak 1 unit, dan 98 unit *Corvett* (1.000 ton) dengan kemampuan serang yang dilengkapi dengan SAM, Torpedo, maupun senjata dengan kaliber 57 mm. Dengan penambahan kapal perang tersebut, tentu akan *Naval Aviation* TNI AL akan diperkuat mengingat satu unit CVN mampu menampung 15 unit pesawat tempur jenis FTR (*Fighter*), 30 unit pesawat tempur jenis FGA (*Fighter Graoun Attack*), 2 unit Helikopter SAR (*Search and Rescue*), 2 unit pesawat intai (*Recce*) dan 1 unit pesawat *support*. Sedangkan, CHV mampu mengangkut 30 unit helikopter jenis ATT (*Attack Helicopter*), 10 unit helikopter ASW, 5 unit helikopter SAR, 2 unit pengintai, dan 3 unit *Support heli*. Untuk kapal pendukung dibutuhkan 28 unit LHD, 10 unit *Landing Craft Assaul*(LCA) dan 3 unit *Armoured Combat Vehicle* (ACV) yang dilengkapi dengan RAM SAM. Dengan dibutuhkan 28 LCA per-LHD, maka kebutuhan LCA sebanyak 280 unit dengan kapasitas 100 prajurit atau 2 unit MBT per-LCA, 10 unit jenis AORH kapal tengker, dan 10 unit *Repair Ship*. Untuk pasukan khusus TNI AL dibutuhkan sebanyak 63.000 personil

³² *Ibid.*, h. 139-142

³³ Connie Rahakundini Bakrie, *Op cit.*, h. 178-195

marinir, dan 840 unit MBT. Sedangkan, untuk *Naval Aviation* dibutuhkan pesawat jenis FTR sebanyak 210 unit dan jenis FGA sebanyak 420 unit, helikopter SAR sebanyak 28 unit, pesawat intai sebanyak 28 unit, 14 unit pesawat *Support*, 27 unit pesawat patroli, 15 unit pesawat transport, 30 unit pesawat training, 310 *Attack Helicopter*, 290 *Anti Submarine Helicopter*, 28 unit *Helicopter SAR*, 3 *Support* heli, dan 22 unit *Utility* heli.

Walaupun, konsep dan sarana peperangan laut terus berkembang, akan tetapi elemen strategi tidak pernah berubah esensinya yang mengandung empat kunci pokok yaitu, Komando dan pengendalian, pengamatan dominasi ruang, proyeksi kekuatan serta dukungan terhadap kekuatan.³⁴

2.3 KONSEP KEDAULATAN PERAIRAN

Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Dalam hukum konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yuridiksi hukum sendiri. Salah satu unsur atau syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu negara adalah pemerintahan yang berdaulat atau kedaulatan. Istilah kedaulatan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli kenegaraan berkebangsaan Perancis yang bernama Jean Bodin (1539-1596). Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan ini sifatnya tunggal, asli, dan tidak dapat dibagi-bagi. Tunggal berarti hanya ada satu kekuasaan tertinggi, sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Asli berarti kekuasaan itu berasal atau tidak dilahirkan dari kekuasaan lain. Sedangkan, abadi berarti kekuasaan negara itu berlangsung terus-menerus tanpa terputus-putus. Maksudnya pemerintah dapat berganti-ganti, kepala negara dapat berganti atau meninggal dunia, tetapi negara dengan kekuasaannya berlangsung terus tanpa terputus-putus. Kedaulatan juga dilukiskan oleh Max Huber, *Arbitrator dalam Island of Palmas*

³⁴ Haryono, *Op cit*, h. 27-28

Arbitration, sebagai kemerdekaan dalam berhubungan antar negara-negara menandakan kemerdekaan. Kemerdekaan berkaitan dengan suatu bagian dari muka bumi adalah hak untuk melaksanakan di dalamnya, terlepas dari negara lain, fungsi-fungsi suatu negara.³⁵

Kedaulatan atau *sovereignty* adalah ciri atau atribut hukum dari negara, dan sebagai atribut negara sudah lama ada, bahkan ada yang berpendapat bahwa *sovereignty* itu mungkin lebih tua dari konsep negara itu sendiri (Dahlan Thaib, 1989:9). Perkataan *sovereignty* (bahasa Inggris) mempunyai persamaan kata dengan *Souvereneteit* (bahasa Belanda) yang berarti tertinggi. Jadi secara umum, kedaulatan atau *sovereignty* itu diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang mempunyai wewenang untuk mengatur penyelenggaraan negara. Setelah adanya negara di jaman modern, maka merumuskan kembali kedaulatan menjadi suatu yang sangat penting. Harold J. Laski dalam hal ini mengatakan, *"the modern state is a sovereign state. It is, therefore, independent in the face of other communities. It may infuse its will towards them with a substance which need not be affected by the will of any external power. It is, moreover, internally supreme over the territory that it control"* Kedaulatan merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh negara yang ingin independen atau merdeka dalam menjalankan kehendak rakyat yang dipimpinnya, sehingga kedaulatan merupakan hal yang mempengaruhi seluruh kehidupan bernegara. Kedaulatan adalah suatu keharusan tertinggi dalam suatu negara, dimana kedaulatan dimiliki oleh negara dan merupakan ciri utama yang membedakan organisasi negara dari organisasi yang lain di dalam negara, karena kedaulatan adalah wewenang tertinggi yang tidak dibatasi oleh hukum dari pada penguasa atas warga negara dan orang-orang lain dalam wilayahnya.³⁶

Melihat kondisi geografis Indonesia dimana hampir dua pertiganya adalah wilayah perairan, maka kedaulatan di wilayah perairannya juga merupakan suatu keharusan tertinggi, dimana sebuah negara tidak perlu mendapat atau meminta izin/persetujuan dari negara lain dalam menjaga kedaulatan di perairan pedalaman

³⁵ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. h. 211

³⁶ Anton Praptono S.H, "Teori Kedaulatan" (<http://click-gtg.blogspot.com/search/label/hukum>), diakses pada 16 Maret 2009

(*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*), dan laut teritorial (*territorial sea*). Dalam kamus besar bahasa Indonesia perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau. Perairan ini dapat merupakan perairan tawar, payau, maupun asin (laut). Dalam UU No. 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia di sebutkan bahwa perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur selebar 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Sedangkan, perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup pada mulut sungai, kuala, teluk, anak laut, dan pelabuhan.

Kepentingan bangsa Indonesia di perairan Indonesia pada hakikatnya memanfaatkan perairan Indonesia sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia. ini berarti kedaulatan Republik Indonesia yang mencakup untuk ;³⁷

- a) Memanfaatkan dan mengelola seluruh kekayaan perairan Indonesia serta mempergunakan perairan Indonesia sebagai sarana dan media perdagangan, baik antar pulau, wilayah maupun antar negara bagi kepentingan bangsa Indonesia.
- b) Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan umum, khususnya tenaga-tenaga matra laut.
- c) Mewujudkan kepulauan dan perairan Nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, hukum, dan ekonomi.
- d) Mewujudkan pertahanan dan keamanan kepulauan dan perairan Indonesia untuk mencegah dan atau menggagalkan usaha lawan lewat laut yang bertujuan subversi, infiltrasi, invasi, penyelundupan dan pelanggaran hukum lainnya.

³⁷Dephankam, *Op cit*, h. 15

Tegaknya kedaulatan NKRI di Perairan Indonesia adalah tujuan maksimal, sedangkan tujuan minimalnya terwujudnya pengendalian perairan Indonesia sebagai prasyarat tercapainya tujuan nasional. Pengendalian perairan Indonesia yang belum mantap atau masih terbatas, merupakan kondisi yang dapat menghambat tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Bynkershoek (1703) memperingatkan semua negara yang memiliki wilayah laut bahwa kedaulatan suatu negara di laut sangat tergantung kepada kemampuan negara tersebut melakukan pengawasan secara fisik terhadap wilayah laut yang dikuasainya itu. Semakin luas wilayah laut yang dikuasai oleh suatu negara akan semakin besar pula tanggung jawab negara tersebut mengawasinya.³⁸

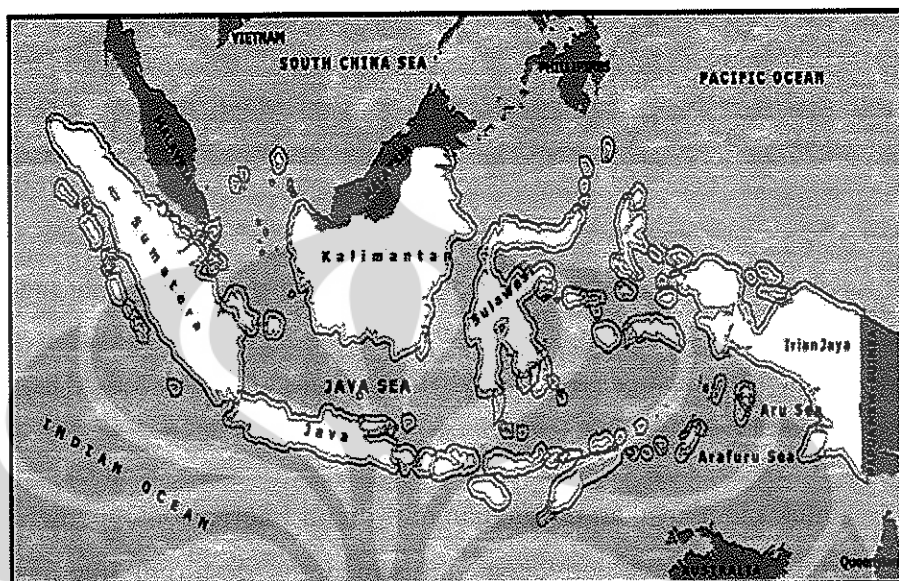
Dekrit Juanda yang dinyatakan melalui Pengumuman Pemerintah 13 Desember 1957 merupakan konsep kewilayahan perairan Indonesia, yang menjadikan wilayah daratan dan wilayah perairan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang melatar belakangi dikeluarkannya Pengumuman Pemerintah ini salah satu diantaranya adalah atas dasar pertimbangan, bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial jaman Hindia Belanda sebagaimana termaktub dalam *Teritorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie* (TZMKO) 1939 tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (1) *Ordonantie* 1939 tersebut menyatakan, bahwa laut teritorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis pangkal air rendah (*laag waterlijn*) dari pada pulau-pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan dari Indonesia.³⁹

Konsekuensi cara pengukuran laut teritorial menuntut *Ordonatie* 1939, yaitu secara teoritis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, setiap pulaunya mempunyai laut teritorial sendiri-sendiri. Dapat dibayangkan bahwa keadaan itu tidak menjamin keamanan Indonesia dan tidak menunjukkan persatuan Indonesia. Hal yang demikian itu juga mempersulit pelaksanaan tugas pengawas laut dengan sempurna karena susunan daerah atau pulau-pulau harus diawasi sedemikian sulitnya. Kantong-kantong laut lepas ditengah-tengah diantara pulau-pulau atau

³⁸ Muchtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Binacipta, 1978

³⁹ Atje Misbach Muhjiddin, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Bandung: Alumni, 1993

diantara wilayah daratan Indonesia tunduk pada rejim hukum laut lepas yang bebas dilayari oleh semua negara.

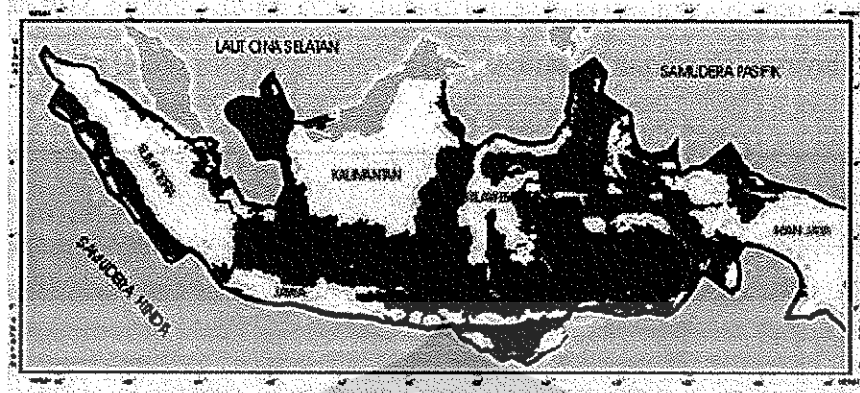


**Gambar 1. Peta Batas Wilayah Indonesia Berdasarkan TSMKO 1939
(sebelum Deklarasi Djoeanda)**

*Sumber : <http://rovicky.wordpress.com/2010/09/02/ingat-13-desember-hari-deklarasi-djoeanda/>
Diakses 2 September 2010

Akan tetapi, dengan dikeluarkannya Pengumuman Pemerintah 13 Desember 1957, cara mengukur laut teritorial Indonesia diukur dari titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar, cara pengukuran yang demikian ini menyebabkan laut lepas tidak ada lagi diantara pulau-pulau karena telah menjadi perairan nusantara. Oleh karena itu, Pengumuman Pemerintah ini mempunyai akibat hukum yang penting bagi pelayaran Internasional, karena bagian laut lepas yang tadinya bebas dilayari untuk pelayaran internasional dijadikan bagian laut wilayah dan perairan nusantara, yang berada di bawah kekuasaan hukum Indonesia.⁴⁰ Hal ini menyebabkan Indonesia memikul tanggung jawab pengawasan wilayah laut yang semakin luas, dimana 60% luas wilayah Indonesia merupakan wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan NKRI.

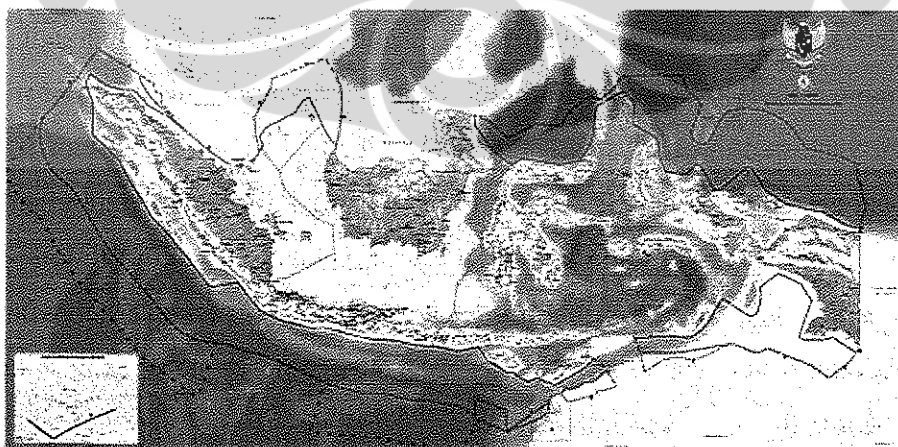
⁴⁰Rosmi Hasibuan, SH. MH, *Hak Lintas Damai ("Right Of Innocent Passage") Dalam Pengaturan Hukum Laut Internasional*, Medan: Fakultas Hukum USU, 2003



Gambar 2. Peta Batas Wilayah Indonesia Setelah Deklarasi Djoeanda.

*Sumber : <http://rovicky.wordpress.com/2010/09/02/ingat-13-desember-hari-deklarasi-djoeanda/>
Diakses 2 September 2010

Untuk mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional, pemerintah Orde Baru (Orba) melakukan perjuangan terus-menerus di forum Internasional dan regional, sehingga pada tahun 1982 di teluk Montego, Jamaika telah ditandatangani Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 oleh 119 negara juga *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Pada konvensi tersebut juga memuat tentang prinsip Negara Kepulauan dimana menyatakan bahwa laut bukan sebagai alat pemisah, melainkan sebagai alat yang menyatukan pulau-pulau satu dengan lainnya. Pengakuan dunia Internasional ini ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dengan diterbitkannya UU Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (KLH)1982.



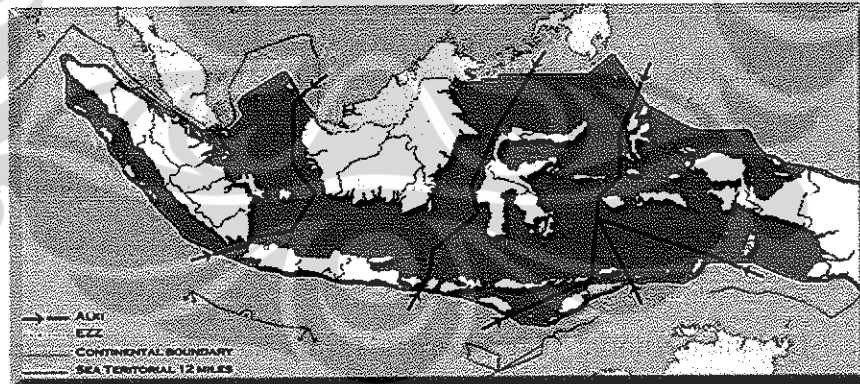
Gambar 3. Peta Perairan Indonesia Berdasarkan UU No.6 Tahun 1996.

*Sumber : <http://www.dkp.go.id/index.php/archives/c/33/51/peta-batas-negara-kepulauan-republik-indonesia/> Diakses 27 Desember 2010

Berdasarkan KLH 1982, perairan dalam yuridiksi nasional dapat dikelompokkan sesuai rejim hukumnya, sebagai berikut:⁴¹

1. Perairan di bawah kedaulatan penuh (*Sovereignty*), meliputi:
 - a. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*).
 - b. Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*).
 - c. Laut Teritorial (*Territorial Sea*)
2. Perairan di bawah yuridiksi (*Jurisdiction*) tertentu dan hal-hal berdaulat (*Sovereignty right*), meliputi:
 - a. Zona Tambahan (*Contiguous Zone*)
 - b. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*)
 - c. Landas Kontinen (*Continental Shelf*).

Beberapa ketentuan berkaitan dengan penegakkan hukum di perairan dalam yuridiksi nasional berdasarkan KLH 1982 sesuai rejim hukum yang berlaku, antara lain:



Gambar 4. Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
Berdasarkan PP No. 37 Tahun 2002.

*Sumber : <http://rovicky.wordpress.com/2010/09/02/ingat-13-desember-hari-deklarasi-djoeanda/>
Diakses 2 September 2010

⁴¹ Dewan Kelautan Indonesia, *Analisa Kebijakan Tentang Pembentukan Badan Penegakan Hukum, Keamanan dan Keselamatan Laut*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008. h. 6-11

1. Di perairan Indonesia (perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial) dimana berlaku rejim hukum kedaulatan penuh (*Sovereignty*), terdapat beberapa ketentuan hukum antara lain:
 - a. Di perairan pedalaman, ketentuan hukum nasional berlaku sepenuhnya, tidak ada hak bagi kapal asing di Perairan Pedalaman.
 - b. Di perairan kepulauan, ketentuan hukum nasional berlaku sepenuhnya, akan tetapi ada beberapa hak/kepentingan internasional yang harus dihormati, antara lain:
 - 1) Hak lintas damai (*Right Innocent Passage*) kapal asing melewati Perairan Kepulauan.
 - 2) Hak Lintas Alur Kepulauan (*Right of Archipelagic Sea Lanes Passage*) yaitu fasilitas/kelonggaran yang diberikan kepada kapal asing untuk berlayar melewati Perairan Kepulauan melalui alur-alur laut kepulauan yang telah ditentukan (ALKI).
 - 3) Hak penangkapan ikan secara tradisional (*Traditional Fishing Right*), yaitu hak yang diberikan kepada nelayan-nelayan tradisional negara tetangga untuk menangkap ikan secara tradisional di perairan kepulauan tertentu berdasarkan perjanjian bilateral.
 - 4) Hak akses dan komunikasi, yaitu hak yang diberikan kepada kapal-kapal negara tetangga terdekat untuk berlayar dari bagian tertentu perairan kepulauan ke bagian lain perairan kepulauan berdasarkan perjanjian bilateral.
 - c. Di Laut Teritorial yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan, Indonesia mempunyai hak dan kewenangan sepenuhnya. Akan tetapi ada beberapa hak atau kepentingan internasional yang harus dihormati, antara lain:
 - 1) Hak lintas damai (*Innocent Passage*) kapal-kapal asing untuk berlayar melewati Laut Teritorial Indonesia sesuai peraturan yang ditetapkan Indonesia dan ketentuan-ketentuan HLI.

2) Hak lintas transit (*Transit Passage*) bagi kapal-kapal asing di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional (*Strait Used for International Navigation*).

2. Di Zona Tambahan (*Contiguous Zone*) yang lebarnya 24 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia tidak mempunyai kedaulatan penuh, melainkan yuridiksi tertentu dimana Indonesia berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan dan menegakkannya di bidang-bidang tertentu sesuai ketentuan KHL 1982 yaitu di bidang bea cukai (*custom*), imigrasi (*immigration*), fiskal (*fiscal*), dan di bidang kesehatan kelautan (*sanitary*).

3. Di Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE (*Exclusive Economic Zone/EEZ*).

a. Indonesia tidak mempunyai kedaulatan penuh, melainkan hak-hak berdaulat dan yuridiksi, yaitu:

1) Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi serta konservasi/pelestarian sumberdaya alam (SDA), baik SDA hayati maupun non hayati terutama SD Perikanan, Pembangkit Tenaga dari Air, Arus dan Sungai.

2) Yuridiksi yang berhubungan dengan:

a) Pembangunan dan penggunaan pulau-pulau buatan serta instalasi-instalasi lainnya.

b) Penelitian ilmiah kelautan.

c) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

b. Kewajiban. Disamping hak-hak berdaulat dan yuridiksi tersebut diatas, Indonesia mempunyai kewajiban-kewajiban, antara lain:

1) Kebebasan pelayaran

2) Kebebasan penerbangan

3) Pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa di bawah laut

4) Khusus di bidang perikanan, Indonesia berkewajiban:

a) Menetapkan jumlah ikan yang boleh ditangkap (*Total Allowable Catch/TAC*)

b) Menetapkan kemampuan tangkap (*Capacity To Harvest/CTH*).

c) Melestarikan jenis-jenis ikan tertentu (*Maximum Sustainable Yield/MSY*)

- d) Memberikan *surplus* kepada negara-negara lain dengan syarat-syarat tertentu dalam hal terdapat kelebihan dari selisih jumlah ikan yang boleh ditangkap dan kemampuan tangkap (TAC-CTH).
4. Di Landas Kontinen (*Continental Shelf*) Indonesia juga tidak mempunyai kedaulatan penuh, melainkan hak-hak berdaulat dan hak eksklusif seperti di ZEEI, serta yuridiksi tertentu. Rejim hukum yang berlaku di Landas Kontinen adalah sebagai berikut:
- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Sumber daya alam non hayati seperti gas, minyak bumi, bahan-bahan tambang lainnya seperti tembaga, mangan, *cobalt*, dan lain-lain. Sedangkan, sumber daya alam hayati antara lain jenis-jenis ikan tertentu yang hidupnya menempel di dasar laut (jenis sendentari).
 - b. Yuridiksi dalam pemberian ijin eksplorasi dan eksploitasi bagi pihak asing di Landas Kontinen Indonesia.
 - c. Yuridiksi mengenai pembuatan terowongan-terowongan di dasar laut.
 - d. Menghormati hak-hak negara lain untuk memasang kabel-kabel dan pipa-pipa di dasar laut dengan seijin Indonesia.
 - e. Menghormati kebebasan pelayaran kapal-kapal asing di permukaan laut, demikian juga penerbangan di atas Landas Kontinen. Hal ini karena status hukum permukaan Landas Kontinen tidak mempengaruhi status hukum permukaan laut dan ruang udara di atasnya.
 - f. Berbeda dengan KHL 1958 yang menggunakan kriteria 200 m kedalaman laut di luar Laut Teritorial atau sepanjang masih dimungkinkan hanya eksploitasi di Landas Kontinen, maka dalam KHL 1982 digunakan kriteria yang berbeda dalam menentukan batas Landas Kontinen, yaitu:
 - 1) Sampai batas terluar tepian kontinen (*Continental margin*).
 - 2) Sampai jarak 200 mil kearah laut dari garis pangkal apabila batas terluar tepian kontinen kurang dari 200 mil.
 - 3) Sampai jarak maksimum 350 mil kearah laut dari garis pangkal, apabila batas terluar tepian kontinen melebihi 200 mil.

- 4) Sampai jarak 100 mil kearah laut dari garis zona dalam 2500 m (*isobath*) apabila batas terluar tepian kontinen melebihi 200 mil.
- g. Melakukan pembayaran atas kontribusi atas eksploitasi sumberdaya alam non hayati Landas Kontinen di luar 200 mil dari garis pangkal melalui otorita (Daerah Dasar Laut Internasional/*International Sea Bed Authority*). Indonesia pernah menetapkan UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, tetapi Undang-undang ini berdasarkan kepada kriteria Landas Kontinen KHL 1958. Dengan adanya kriteria baru mengenai Landas Kontinen berdasarkan KHL 1982, maka UU ini harus disesuaikan dengan ketentuan KHL 1982. Sampai sekarang UU Landas Kontinen baru berdasarkan KHL 1982 belum terwujud.

2.4 TEORI PERTAHANAN

Menurut Menteri Pertahanan RI, Prof. Jowono Soedarsono⁴², pertahanan dan keamanan adalah masalah bersama sebagai bangsa dan berlaku prinsip, “*Anyone, anywhere, anytime*”. Pertahanan dan keamanan harus disadari sama pentingnya dengan prasarana umum lainnya seperti listrik, bandara, pelabuhan, jalan raya, layanan kesehatan masyarakat, air minum dan pendidikan. Meskipun demikian, tidak seperti prasarana umum lainnya, dalam soal pertahanan dan keamanan dituntut tingkat kecermatan dan keterampilan yang manusiawi dalam membangun TNI dan Polri secara baik dan benar. Sayidiman⁴³ mendefinisikan, konsep pertahanan atau konsepsi perang merupakan dasar bagi perencanaan untuk persiapan perang. Konsepsi pertahanan adalah pikiran umum tentang siapa musuh, dimana akan terjadi perang, bilamana perang itu mungkin pecah, bagaimana perang akan dilakukan. Menurut Andi Widjayanto⁴⁴ pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan sistem pertahanan negara

⁴² Connie Rahakundini Bakrie, *Op cit*, h. 49

⁴³ Dalam tesis Chairul Walid, *Op cit*, h. 24

⁴⁴ Andi Widjayanto, *Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Jakarta: Pro Patria, 2004. h. 99

adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Kemudian, sistem ini dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Joko Kusnanto Anggoro⁴⁵ mendefinisikan sistem pertahanan adalah sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara untuk menghadapi ancaman kekerasan dengan menggunakan kemampuan (kekuatan, keahlian, gelar) militer. Lebih lanjut Anggoro menyebutkan bahwa konseptualisasi keamanan nasional seharusnya bertolak dari anggapan bahwa pertahanan hanya merupakan salah satu bagian dari sistem keamanan nasional (*national security system*). Sektor pertahanan, dengan militer sebagai dimensi utama, berada bersama dengan sektor ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan hidup. Peneliti senior LIPI, Dr. Indira Samego mengatakan, sistem pertahanan negara membutuhkan perangkat lunak (ideologi) seperti yang telah digariskan dalam UU No.20/1982 mengenai pokok-pokok Pertahanan dan Keamanan yang berisi "Upaya pertahanan keamanan negara Republik Indonesia mencakup pembentukan dan penggunaan sumber daya manusia, pengamanan, serta pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan segenap prasarana fisik dan prasarana psikis bangsa dan negara".⁴⁶

Sedangkan, Ahli Peneliti Utama PPW LIPI dan *Associate Director for Reseaches, The Habibie Center*, Dr. Dewi Fortuna Anwar dalam pandangannya tentang konsep pertahanan negara pasca Orde Baru mengatakan, tetap berpegang pada Doktrin Sishankamrata, Doktrin Wawasan Nusantara, dan Doktrin Ketahanan Nasional. Ketiga doktrin tersebut merupakan cerminan khas ke-Indonesiaan sebagai dasar pembangunan pertahanan negara dalam 5-10 tahun ke depan, tetapi pada tataran implementasinya masih perlu dilakukan berbagai penyesuaian, seperti misalnya penghapusan Kodam.⁴⁷ Sementara itu, Letjen (Purn) TNI Agus Widjojo mengatakan, secara umum pembangunan wawasan

⁴⁵ Chairul Wahid, *Op cit*, h. 24

⁴⁶ Connie Rahakundini Bakrie, *Op cit*, h. 50

⁴⁷ *Ibid*, h. 51

pertahanan negara, perlu diperhatikan tiga hal penting sebagai berikut; (a) segi konseptual dalam memperhitungkan berbagai faktor; (b) segi legalitas yang mempertanyakan apakah tata hukum Indonesia sudah lengkap dan cukup, dan; (c) bagaimanakah kondisi ancaman faktual yang dihadapi oleh bangsa saat ini.⁴⁸

2.5 TEORI INTELIJEN

Intelijen secara alamiah sudah ada bersama dengan perkembangan peradaban manusia. Sejalan dengan kemajuan peradaban manusia termasuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, intelijen mengalami perkembangan dan kemajuan, serta spesialisasi yang cenderung berlanjut walaupun hakekat intelijen tidak pernah berubah. Ensiklopedia *Britanica* mengemukakan, bahwa intelijen adalah mengumpulkan informasi tentang musuh, bahkan sampai koalisinya, atau tentang negara yang netral serta pengamanan rahasia yang khusus pada negara itu sendiri.⁴⁹

Berbicara mengenai badan intelijen suatu negara tidaklah terlepas dari pemahaman mendasar bahwa intelijen itu adalah pengetahuan (*knowledge*), intelijen itu adalah kegiatan untuk mencari pengetahuan yang diinginkan (*activity*), dan intelijen itu adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi (*organization*).⁵⁰ James Der Derian dalam bukunya *Anti Diplomacy*, sebagai berikut: “ketiga pemahaman dasar tersebut diwujudkan dalam:⁵¹

- a. Pengumpulan, analisis, produksi, penyebaran, dan penggunaan informasi yang berhubungan dengan suatu pemerintah, kelompok politik, partai, militer, gerakan, atau perkumpulan lain yang diyakini berhubungan dengan keamanan suatu kelompok atau pemerintah tertentu;

⁴⁸ *Ibid*, h. 51

⁴⁹ Y. Wahyu Saronto dkk, *Intelijen Teori, Aplikasi, dan Modernisasi*, Jakarta: PT. Ekalaya Saputra, 2004

⁵⁰ Robert Mangindaan, *Op cit*, 2010

⁵¹ Aa Kustia, *Intelijen Dilema dan Tantangan*, Jakarta: CSICI, 2007. h. 14

- b. Menggagalkan kegiatan serupa dilakukan oleh kelompok pemerintah atau gerakan lain;
- c. Kegiatan yang dilakukan untuk mengubah komposisi dan sikap suatu kelompok atau pemerintah lain.”

Selain itu, intelijen adalah suatu pernyataan yang sangat berarti dinilai dari isi informasi yang sudah diseleksi, dievaluasi, diinterpretasi, dan akhirnya berguna dalam penyelesaian masalah kebijakan nasional yang sedang dihadapi. Definisi ini menjelaskan tentang perbedaan antara informasi mentah dan informasi intelijen. Setiap badan intelijen terdiri dari berbagai bidang dalam upayanya memberikan masukan informasi kepada *user*nya, sebagai dasar pembuatan kebijakan (*policy*), memberi peringatan dini atau *early warning* dan perkiraan keadaan (*estimasi*) dalam hal ini presiden maupun perdana menteri untuk membantu *user* dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan negaranya, berbagai informasi yang dibutuhkan *user* diperoleh dari dalam maupun luar negeri sehingga pada umumnya badan intelijen mempunyai daerah operasi di dalam maupun luar negeri.

Menurut Brigjen TNI (Purn) dr. Taheri Noor, MA secara berurutan Anatomi Intelijen adalah :⁵²

2.5.1 Tugas Pokok

- a) Peringatan dan penemuan dini segala bentuk ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan terhadap kepentingan Nasional Indonesia. Mengetahui apa yang hendak dan/atau dapat diperbuat oleh musuh/lawan/asing terhadap kita.
- b) Melumpuhkan kekuatan dan kemampuan musuh/lawan/asing melakukan niatnya yang diperkirakan merugikan kita.
- c) Melawan dan menggagalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi intelijen oleh musuh/lawan/asing terhadap kita.

⁵² M.D. La Ode, *Peran Militer Dalam Ketahanan Nasional: Studi Kasus Bidang Hankam di Indonesia tahun 1967-2000*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006. h. 60-64

- d) Menciptakan kondisi yang menguntungkan kita dengan cara-cara penggalangan.

2.5.2 Fungsi Utama

a) Penyelidikan.

Adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan mengenai pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran bahan-bahan keterangan serta penyebarannya, untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan/tindakan secara diperhitungkan terlebih dahulu oleh si pemakai intelijen.

- 1) Pengumpulan dilakukan dengan cara terbuka, menggunakan sumber-sumber terbuka dan cara tertutup menggunakan sumber-sumber tertutup.
- 2) Pengolahan, melalui metode Roda Perputaran Intelijen (*Intelligence Cycle*).
- 3) Penafsiran, untuk menentukan dengan keterangan lainnya yang telah ada.
- 4) Penyebaran, dalam bentuk distribusi produk-produk Intelijen baik produk insidental maupun produk periodik.

b) Pengamanan.

Dalam terminologi Intelijen adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk melawan dan menggalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi Intelijen oleh musuh lawan/asing terhadap negara kita. Meliputi usaha-usaha:

- 1) Pengamanan keterangan terhadap *spionage*
- 2) Pengamanan material terhadap sabotase, dan
- 3) Pengamanan personil terhadap perang urat syaraf.

Untuk pengamanan dilakukan dalam tiga macam bentuk kegiatan, yaitu:

- 1) Pengamanan pencegahan (*preventif*)
- 2) Pengamanan pengusutan/ penggulangan (*detektif/represif*), dan
- 3) Pengamanan pengelabuan (*desertif*).

Ketiga macam bentuk kegiatan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan sinergis, satu sama lain erat hubungannya, saling melengkapi dalam mencapai

tujuan pengamanan. Pelaksanaanya dibagi dalam dua kelompok kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan intern, disebut security intern (*internal security*), dan
- 2) Kegiatan yang diselenggarakan di luar lingkungan intern ditujukan ke masyarakat/ penduduk sekitar, untuk menemukan dan menggulung agen-agen intelijen musuh yang terdapat atau bersembunyi di kalangan penduduk. Kegiatan ini disebut security eksternal (*eksternal security*), dilakukan oleh satuan-satuan Kontra Intelijen.

c) Penggalangan.

Adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan, untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan dalam mencapai suatu tujuan. Di wilayah nasional (dalam negeri), tujuan penggalangan dalam operasi intelijen adalah untuk melumpuhkan kekuatan perlawanan pemberontak, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) dan gerakan-gerakan sejenis. Dilakukan baik sebagai operasi intelijen itu sendiri maupun untuk membantu/memperkuat operasi tempur.

Tujuan penggalangan dalam operasi intelijen adalah untuk menciptakan perlawanan masyarakat terhadap musuh, baik masyarakat kita di daerah penduduk musuh maupun masyarakat musuh di daerah teritorial musuh. Dalam pelaksanaanya mengikuti metode dan teknik atau prosedur yang sudah ditentukan untuk itu.

d) Pengolahan.

Pengolahan kegiatan intelijen mengikuti suatu sistem yang dinamakan Roda Perputaran Intelijen atau Lingkaran Perputaran Intelijen (*Intelligence Cycle*) meliputi empat rangkaian usaha yaitu, pengarahan, pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan. Poros dimana roda atau lingkaran itu berputar adalah tugas yang dibebankan kepada badan intelijen itu. Sebagaimana halnya sebuah roda atau lingkaran yang tidak tentu dimana ujung dan pangkalnya, dimana tidak dapat ditentukan secara permanen, dimana titik permulaan dan dimana titik akhir dari perputaran roda perputaran intelijen itu. Penentuannya tergantung kepada keadaan sebagai berikut:

- 1) Kehendak dari sipemakai intelijen (*user*)
- 2) Macam dan corak keterangan yang diperlukan, dan
- 3) Situasi sekeliling yang mempunyai pengaruh (waktu, tempat, dan keadaan).

Dengan pertimbangan tersebut telah ditentukan titik permulaan, maka perputaran seterusnya adalah mengikuti rentetan rangkain kegiatan yang telah ditetapkan.

a. Pengarahan

Adalah pengendalian usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan pengumpulan informasi untuk penyediaan intelijen aktual yang dibutuhkan yang meliputi tiga macam kegiatan yaitu:

- 1) Penentuan unsur-unsur utama keterangan (*Essential Element of Information*) di singkat UUK. UUK adalah kebutuhan Intelijen aktual dalam pemecahan suatu masalah, yang bagi pemakai Intelijen diperlukan untuk pembuatan suatu rencana atau pengembalian suatu keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 2) Penyusunan rencana penyelidikan adalah hasil perencanaan pekerjaan, kegiatan, dan usaha dibidang penyelidikan, dengan menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar tuntutan untuk penyelenggaraan penyelidikan. Rencana penyelidikan memuat pengarahan kegiatan-kegiatan penyelidikan, menentukan jenis-jenis keterangan yang harus dikumpulkan, badan-badan pengumpul atau sumber-sumber yang akan dipergunakan, kapan, dimana dan bagaimana keterangan-keterangan tersebut disampaikan. Suatu rencana penyelidikan minimal memuat lima pokok, pertama : UUK, kedua: analisis UUK menjadi sejumlah indikasi, ketiga: memperinci indikasi menjadi sejumlah jenis-jenis keterangan, keempat: penentuan badan-badan pengumpul, kelima: penentuan jangka waktu dan tempat pelaporan.

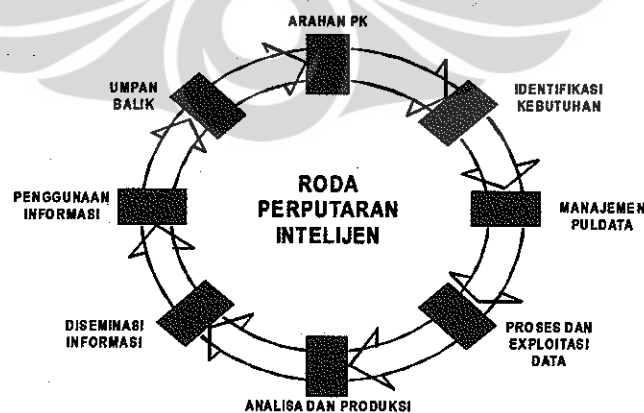
3) Pengeluaran instruksi dan permintaan informasi serta pengawasan atas pelaksanaan, merupakan langkah akhir dalam tahap pengarahan. Instruksi atau perintah pengumpulan informasi ditujukan kepada organisasi/satuan-satuan bawahan. Permintaan pengumpulan informasi ditujukan kepada organisasi/satuan atasan/satuan samping. Instruksi, perintah dan permintaan informasi adalah pelaksanaan (pengoprasian) rencana penyelidikan yang sudah dipersiapkan.

b. Pengumpulan

Pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber sebagai berikut, penelitian atau riset, dan buku-buku perpustakaan; monitoring radio, tv, telepon, wawancara, dan introgasi; pengamatan (*observasi*); deteksi dengan penggunaan alat-alat elektronik; pengumpulan tertutup dengan cara-cara penyusupan (Infiltrasi dan Penetrasi).

c. Pengolahan.

Kegiatan untuk menghasilkan intelijen dari informasi-informasi yang tersedia melalui pencatatan, penilaian, penafsiran dan kesimpulan. Pengolahan merupakan tahap ketiga dari roda perputaran intelijen. User/pemakai intelijen (pimpinan/kepala berwenang) mengharapkan Intelijen dari staff Intelijennya, bukan semata-mata informasi (bahan mentah).



Gambar 5. Roda Perputaran Intelijen (RPI)

BAB 3

KEADAAN LINGKUNGAN STRATEGIS

3.1 KEADAAN STRATEGIS LINGKUNGAN TERDEKAT

Berakhirnya perang dingin dimana Amerika Serikat (AS) menjadi kekuatan tunggal di dunia tidak menjamin terealisasinya keamanan, kedamaian, dan kesetabilan yang diharapkan masyarakat dunia. Apalagi AS telah menggeser strategi keamanannya dari pola *containment* ke pola *pre-emptive attack* diikuti dengan kebijakan unilateralisme dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang mengancam hegemoni AS di dunia khususnya dalam melawan terorisme dan mengamankan pasokan energi mereka.

Adanya gagasan *preventive* diplomasi dalam kerja sama antar negara dalam menjamin kesinambungan perdamaian dunia dan *agenda for peace* yang gencar dipromosikan oleh PBB tetap menimbulkan kekhawatiran akan adanya perang antar negara dalam mengamankan kepentingan negaranya. Apalagi PBB sebagai barometer organisasi tingkat dunia dalam menyelesaikan permasalahan dunia hanya dijadikan AS sebagai instrumen legitimasi terhadap tindakan arogansinya. Akibatnya berbagai konflik terbuka masih berpeluang menjadi perang. Untuk mengantisipasi terancamnya kepentingan, untuk klaim teritorial dan kemungkinan perang tersebut beberapa negara khususnya AS dan China secara utuh menerapkan adagium *ci vis pacem parabellum* dengan menaikkan anggaran belanja pertahanan secara signifikan.

Selain mempertahankan hegemoni, kenaikan anggaran pertahanan kedua negara tersebut dimaksudkan untuk menopang dan mengamankan kepentingan nasional mereka seperti, menguasai sumber kekayaan alam yang berkaitan dengan energi dan mineral strategis, mengamankan garis penghubung laut, dan untuk menopang klaim teritorial. Perimbangan kekuatan AS dan China tersebut telah berkembang ke kawasan Asia Pasifik. Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di kawasan ini setidaknya bisa melihat perspektif perimbangan kekuatan kedua negara tersebut bagi penetapan strategi pertahanan nasional, apalagi negara

tetangga seperti Australia telah ikut memposisikan dirinya sebagai *deputi sheriff* AS di kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik mempunyai dinamika tersendiri dalam sudut pandang keamanan, karena karakteristik yang berbeda dengan kawasan lainnya di dunia. Di kawasan ini hubungan antar aktor negara bersifat sangat kompleks, dimana kerja sama dan konflik selalu mewarnai hubungan antar aktor negara. Apapun dinamika keamanan yang terjadi di kawasan Asia Pasifik selalu tidak terlepas dari karakteristik maritim dimana sebagian besar wilayah ini didominasi oleh perairan, sehingga ancaman dan tantangan pada domain maritim semakin dinamis.

Di kawasan Asia Pasifik terdapat dua masalah krusial, pertama bersifat laten dan kedua bersifat fluktuasi. Yang bersifat laten adalah masalah berkaitan dengan konflik teritorial, antara lain: Spratley, Paracel, China dan Taiwan, Klaim teritorial China (*9 dotted lines*), semenanjung Korea, India-Pakistan, dan antara rumpun bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Sedangkan, yang bersifat fluktuasi antara lain, masalah *sea robbery* dan *piracy*, *maritime terrorisme* dimana berkaitan dengan *proliferasi* senjata pemusnah massal, *transnational crime* dimana spektrumnya menjadi luas mencakup *illicit small arms and light weapon traffick* hingga *illegal trafficking of woman and children*.⁵³ Kedua masalah krusial tersebut tentunya bersinggungan dengan wilayah laut. Oleh karena itu, berbagai inisiatif dikembangkan di kawasan ini diantaranya, *Regional Maritime Security Initiative (RMSI)*, *Ploliferation Security Initiative (PSI)*, *Maritime Security Operations (MSO)*, dan *Pasific Defence*. Berbagai inisiatif tersebut bukan hanya untuk wilayah Asia Pasifik, akan tetapi juga terhadap wilayah perairan Asia Tenggara khususnya Indonesia, karena beberapa pandangan yang menyebut bahwa wilayah perairan Indonesia merupakan *dangerous water*.

Tujuan berbagai inisiatif tersebut disatu sisi sangat bermanfaat dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan di wilayah perairan Asia Tenggara khususnya dalam mengamankan *choke point* dan keselamatan navigasi, akan tetapi disisi lain bagi bagi negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia adanya inisiatif tersebut dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan NKRI, karena

⁵³ Robert Mangindaan, *Keamanan Maritim: New Era Requirement*, Jakarta:FKPM, 2010. h. 2

kekuatan luar dengan memanfaatkan berbagai aturan inisiatif tersebut dapat bebas memasuki wilayah kedaulatan perairan negara-negara Asia Tenggara yang mana dua pertiga (perairan) kawasan ini adalah wilayah yuridiksi Indonesia.

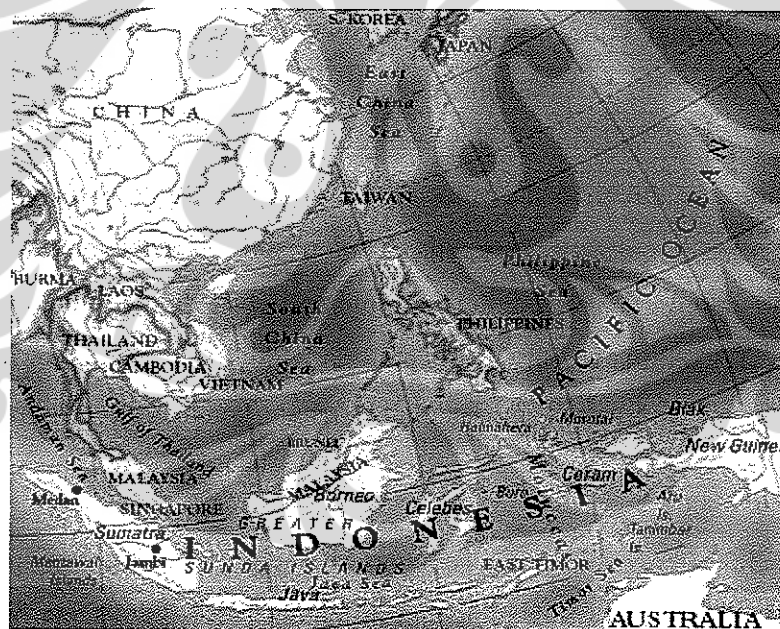
Dalam peta dunia, secara tradisional Asia Tenggara merupakan sub-kawasan dari kawasan Asia. Sub-kawasan Asia lainnya adalah: Asia Timur (Timur Jauh), Asia Selatan, Asia Barat (termasuk Persia dan Timur Tengah bagian Asia), dan Asia Tengah. Tetapi, dalam pemetaan geografis baru, Asia Tenggara sekarang lebih sering disebut sebagai bagian dari kawasan Asia-Pasifik.⁵⁴ Berdasarkan administratif pemerintahan, Asia Tenggara terdiri atas sepuluh negara: enam berada di daratan benua Asia, yaitu Kamboja, Laos, Vietnam (disebut kawasan Indocina), Thailand, Malaysia dan Myanmar (dahulu Burma), dan empat negara berada di pulau dan kepulauan sekitarnya, yaitu Singapura, Brunei, Indonesia, dan Filipina. Dari segi ideologi dan politik kesepuluh negara ini terdapat perbedaan karakter yang kadangkala begitu kontras antara negara yang satu dengan lainnya. Barangkali hanya Asia Tenggara yang memiliki hampir semua corak pemerintahan, dari sistem kerajaan absolut (Brunei), kerajaan konstitusional (Thailand, Malaysia), demokrasi liberal (Filipina), demokrasi “sosialisme” (Vietnam dan Laos), diktator militer (Myanmar), quasi demokrasi (Singapura), demokrasi Pancasila (Indonesia), dan demokrasi transisional (Kamboja dan Indonesia).⁵⁵ Setelah referendum 1999, Timor Timur (sekarang Timor Leste) semula merupakan bagian dari Indonesia kemudian menjadi negara sendiri dalam wilayah Asia Tenggara dengan menganut sistem pemerintahan republik.

Letak geografis Asia Tenggara berada di antara tiga perairan, yaitu, Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Sedangkan, Luas wilayah Asia Tenggara beserta

⁵⁴ Teuku May Rudy, *Studi Kawasan: Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia*, Bandung: Bina Budhaya, 1997. h. 25

⁵⁵ Syamsul Hadi, *Memajukan Budaya ASEAN sebagai Landasan Kerjasama Regional*, Analisis CSIS Tahun XXV No. 5 (September-Oktober 1996), h. 369

wilayah perairannya adalah sekitar 4.511.167 km^{2.56} Dalam lingkungan terdekat Asia Tenggara Indonesia mempunyai luas wilayah terbesar baik daratan dan perairannya. Sebagai bagian dari wilayah Asia Pasifik, wilayah Asia tenggara dengan masalah baik laten maupun *fluktuatifnya* terkait ada masalah *national interest* terikat satu sama lain dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, terutama dalam bidang keamanan, ada masalah menyangkut klaim teritorial dan batas wilayah nasional, dan ada *imbalance of power* yang sangat kompleks di wilayah Asia Tenggara. Melihat potensi ancaman kedaulatan bagi perairan NKRI dan kompleksitas permasalahan di Asia Pasifik khususnya berkaitan dengan wilayah perairannya, Indonesia setidaknya berkepentingan untuk berperan menjaga perairan di wilayah Asia Pasifik, khususnya lingkungan terdekat Asia Tenggara. Untuk itu, dipandang perlu untuk melihat batas perairan negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara khususnya keadaan terkini Alutsista negara-negara berpotensi mengancam kedaulatan perairan NKRI.



Gambar 6. Peta Asia

*Sumber : <http://beatifulindonesian.blogspot.com/2009/11/indonesian-map.html> Diakses 2 September 2010

⁵⁶ Ratimin Subianto, *Geografis dan Penduduk Asia Tenggara*, Program Studi Geografi, Universitas Kanjuruhan, Malang, 2010

3.1.1 THAILAND

Sebagai salah satu negara besar dan mempunyai kekuatan angkatan laut yang kuat di wilayah Asia Tenggara, Thailand juga mempunyai wilayah perbatasan perairan dengan Indonesia. Didasarkan atas hasil persetujuan dengan Indonesia yang ditandatangani pada 17 Desember 1971 di Bangkok telah ditetapkan batas landas kontinen antara Indonesia dan Thailand di perairan Selat Malaka bagian utara di laut Andaman. Persetujuan ini disahkan dengan Keppres RI No.21 tahun 1972, tentang "Persetujuan antara Pemerintahan RI dan Thailand tentang Penetapan suatu garis batas landas kontinental kedua negara di bagian utara Selat Malaka dan laut Andaman" tertanggal 11 Maret 1972. Melanjutkan persetujuan pada tahun 1971 Indonesia dan Thailand menandatangani persetujuan lain tentang penetapan perbatasan landas kontinen di laut Andaman pada 11 Desember 1975 di Jakarta. Perjanjian ini disahkan pemberlakuannya dengan Keppres RI No.1 tahun 1977, tentang "Persetujuan antara Pemerintah RI dan Thailand tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut antara kedua Negara di Laut Andaman" tertanggal 31 Januari 1977.⁵⁷

Pada 22 Juni 1978, Pemerintah RI, Pemerintah India, dan Pemerintah Thailand membuat persetujuan mengenai titik pertemuan tiga garis batas dan penetapan garis batas landas kontinen di laut Andaman. Perjanjian ini ditandatangani di New Delhi dan pemberlakuannya disahkan dengan Keppres RI No.24 tahun 1978, tentang "Persetujuan antara Pemerintah RI, India, dan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas ketiga Negara di Laut Andaman" tertanggal 1978.⁵⁸ Walaupun, antara Indonesia dan Thailand penetapan landas kontinen telah disetujui dan penetapan untuk batas ZEE dalam proses perundingan, Thailand tetap menjadi potensi ancaman di wilayah kedaulatan perairan Indonesia.

⁵⁷ I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antar Negara, Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Yogyakarta: UGM Press, 2007. h. 140

⁵⁸ *Ibid*, h. 141

Untuk kekuatan angkatan lautnya Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang mempunyai Alutsista AL yang kuat seperti tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 : Alutsista Angkatan Laut Thailand

Jenis Alutsista	Jumlah
Air craft	54
Fighter ground attack	7
Maritime Patrol	12
reconnaissance	9
Training	16
Transport	2
Utility	8
Aircraft Carrier	1
Helicopter	1
Amphibious	41
Assault Vehicle	33
Landing Ship, Medium	
Landing Ship, Tank	6
Landing ship	2
Anti Tank	24
Anti tank missile	24
Corvettes	9
Corvettes	7
With guide missile	2
Frigates	10
Frigate	2
With guide missile	8
Helicopter	8
Anti submarine warfare	6
utility	
Anti submarine/anti surface warfare	2
Landing Craft	13
Medium	
Utility	13
Vehicles and personnel	
Mine Warfare, Counter	19
Counter measure, support	1
Counter measure, Vessel	2
Hunter, Coastal	

Sweeper, Coastal	2
Sweeper, inshore	
Counter measure, Coastal	2
Mine sweeper	12
Patrol and Coastal Combatants	87
Fast Patrol craft with SSM	6
Fast Patrol craft, torpedo	
Fast Patrol craft, Coastal	3
Patrol craft	6
Patrol Craft offshore	
Patrol craft, coastal	3
Patrol craft, inshore	47
Patrol craft, riverine	6
Patrol Hydrofoil with torpedo	
Patrol boat, inshore	
Patrol boat riverine	16
Personel carrier	24
Armored personnel carrier	24
Submarines, Tactical	
Submarine, diesel with ASW capability	

Sumber : Diolah dari *Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2010* (London: Routledge, 2010), *Center for Strategic and International Studies (CSIS) Washington, DC, The Military Balance In Asia:1990-2010 A Quantitative Analysis*, dan *Naval Forces, Source Book 2010, International Forum For Maritim Power, Germany*

3.1.2 MALAYSIA

International Boundaries Research Unit (IBRU) di Universitas Durham mengidentifikasi bahwa dewasa ini masih terdapat ratusan perbatasan maritim internasional yang belum disepakati negara-negara yang berbatasan. Walaupun banyak diantara pertentangan tersebut hanya berlangsung pada tataran diplomasi, tidak tertutup kemungkinan hal itu memburuk dan terekskalasi menjadi konflik bersenjata. Masalah perbatasan antar negara merupakan ancaman yang konstant bagi perdamaian dan keamanan internasional, karena menyangkut kedaulatan yang sifatnya seringkali tidak dapat dinegosiasikan (*non-negotiable*), konflik

teritorial ini tergolong pertentangan yang sulit dipecahkan. Didalam konteks perbatasan laut, Malaysia-Indonesia memiliki masalah perbatasan yang belum disepakati di empat kawasan yakni, permasalahan klaim tumpang tindih di wilayah zona ekonomi eksklusif di kawasan selat Malaka bagian utara (peta sepihak Malaysia 1979), belum ditetapkannya garis laut teritorial di kawasan bagian selat Malaka bagian selatan, belum ditetapkannya wilayah ZEE di kawasan Laut China Selatan, dan klaim Malaysia pada wilayah Ambalat di kawasan Laut Sulawesi (setelah kasus Sipadan-Ligitan).⁵⁹

Apalagi Malaysia sering melakukan pelanggaran kedaulatan dan manuver militer di wilayah yuridiksi perairan Indonesia, diantaranya pada 24 Mei 2009 KRI Hasanuddin 366 mengusir KD Baung 3509 dan Heli Malaysian *Maritime Enforcement Agency* serta pesawat *Beecharft* yang mencoba memasuki wilayah blok Ambalat, pada 25 Mei 2009 kapal perang tentara laut Diraja Malaysia KD Yu 3508 mencoba memasuki wilayah perairan blok Ambalat, pada 30 Mei 2009 kapal perang Malaysian jenis *Fast Attack Craft* Malaysian KD Baung 3509 terdeteksi KRI memasuki wilayah perairan Indonesia di wilayah blok Ambalat sejauh 7,3 mil laut, dan terbaru pada 13 Agustus 2010 kapal polisi Diraja Malaysia mengeluarkan tembakan dan mencegat kapal Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau di perairan utara pulau Bintan dan menangkap 3 petugas DKP, padahal petugas DKP tersebut baru saja menangkap tujuh nelayan Malaysia yang masuk ke perairan Indonesia.⁶⁰

Malaysia dalam peta wilayahnya menerapkan prinsip-prinsip penarikan garis pangkal lurus kepulauan, padahal seperti diketahui Malaysia bukan merupakan negara kepulauan menurut konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982. Hal tersebut mengakibatkan sebagian ZEE Indonesia masuk menjadi laut teritorial Malaysia yang disebabkan penerapan dari prinsip garis pangkal lurus kepulauan antara pulau Jarak dengan pulau Perak yang jaraknya 123 mil laut, dan kemudian dijadikan garis pangkal dalam penetapan laut teritorial. Penggunaan Suar Horsburg yang terletak pada pintu masuk selat Singapura dari arah timur

⁵⁹ Dian Megaputri, *Indonesia-Malaysia, Perbatasan Tanpa Batas*, Media Indonesia, 31 Agustus 2010.

⁶⁰ *Arogansi Asing Akibat Pemerintah Abaikan Aturan*, Media Indonesia, 19 Agustus 2010

sebagai titik dasar juga menjadi masalah batas laut teritorial Malaysia-Indonesia di selat Singapura antara Johor Timur (Malaysia) dan pulau Bintan (Indonesia) dimana Malaysia menetapkan batas laut teritorialnya sampai jarak 3,3 mil laut dari pulau Bintan.⁶¹

Masih adanya permasalahan batas maritim dan untuk memantapkan klaim mereka terhadap wilayah berbatasan maritim dengan Indonesia di Asia Tenggara serta klaim sebagian wilayah di Laut China Selatan, dalam 10 tahun terakhir kekuatan Laut Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) mengalami peningkatan yang signifikan seperti tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 : Alutsista Angkatan Laut Malaysia

Jenis Alutsista	Jumlah
Air craft	
Maritime Patrol	
Transport	
Amphibious	
Assault Vehicle	
Landing platform, dock	
Landing platform, Helicopter	
Landing ship, tank	
Corvettes	10
Corvettes	2
With guide missile	8
Frigates	2
Frigate	
With guide missile	2
Helicopter	12
Anti submarine warfare	
Support	
utility	6
Anti submarine/anti surface warfare	6
Landing Craft	115
Heavy	
Medium	115
Utility	

⁶¹ I Made Andi Arsana, *Op cit*, h. 142-143

Mine Warfare, Counter	4
Counter measure, Vessel	4
Hunter, Coastal	
Sweeper, Coastal	
Sweeper, Drone	
Counter measure, Coastal	
Patrol and Coastal Combatants	8
Fast Patrol craft with SSM	8
Fast Patrol craft, Coastal	
Patrol craft	
Patrol Craft offshore	
Patrol craft, coastal	
Patrol craft, riverine	
Patrol boat	
Patrol craft, torpedo	
Personel carrier	
Armored infantry fighting vehicle	
Armored personnel carrier	
Reconnaissance	
Submarines, Tactical	2
Submarine, diesel with ASW capability	2

Sumber : Diolah dari *Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2010* (London: Routledge, 2010), *Center for Strategic and International Studies (CSIS) Washington, DC, The Military Balance In Asia:1990-2010 A Quantitative Analysis*, dan *Naval Forces, Source Book 2010, International Forum For Maritim Power, German*

Malaysia secara bertahap terus memperkuat kekuatan militernya melalui pengadaan Alutsista dari sejumlah negara, termasuk pula Alutsista TLDM. Dalam Rencana Malaysia (*Malaysia Plan*) akan melakukan pengadaan enam kapal korvet kelas Meko A-100 dari Jerman, dua kapal selam kelas *Scorpene* dan satu kapal selam bekas Agosta A-70 dari Prancis senilai US\$ 972 juta. Selain, pengadaan kapal perang, Malaysia juga membangun sejumlah pangkalan baru TLDM, seperti di Lumut dan Sabah. Untuk memperkuat pertahanan laut di sekitar laut Sulu, Laut Sulawesi dan Laut China Selatan, Malaysia mengembangkan pangkalan angkatan laut di teluk Sepanggar, Sabah. Pangkalan angkatan laut Teluk Sepanggar dirancang menjadi pengkalan kapal selam kelas *Scorpene* dan sekaligus menjadi

Markas Besar Komando TLDM wilayah II, dimana Malaysia menghabiskan US\$ 284 juta untuk membangun pangkalan tersebut.⁶²

Disamping itu, TLDM memiliki empat pangkalan lain di Sabah yaitu, Sandakan, Labuan, Semporna, dan Tawau. Pangkalan Sandakan merupakan pangkalan angkatan laut terbesar kedua yang dimiliki Malaysia setelah pangkalan Teluk Sepanggar. Adapun pangkalan Tawau saat ini sedang dibangun ulang diharapkan menjadi pangkalan terbesar ketiga. Setelah pengadaan kapal selam, program pembangunan kekuatan TLDM ke depan akan memfokuskan diri pada peningkatan kemampuan anti kapal selam (AKS) dan peperangan udara. Sebagai realisasi dari program tersebut, kekuatan laut Malaysia tengah mengakuisisi enam Korvet Meko A-100 yang dalam susunan tempur TLDM dinamakan *Next Generation Patrol Vessel* (NGPV) kelas Kedah. Setelah menerima dua Korvet gelombang pertama kelas Kedah yang dikategorikan sebagai "*Specially Focused Mission*", Korvet gelombang kedua telah *dicommissioning* pada Agustus 2009 dirancang sebagai kapal anti kapal selam. Sedangkan, Korvet gelombang ketiga akan memiliki fungsi asasi pada peperangan udara. Untuk melengkapi kemampuan anti kapal selam, TLDM dalam beberapa tahun kedepan akan mengakuisisi enam heli anti kapal selam.⁶³

TLDM juga merencanakan akan menambah dua lagi kapal *Fregat* kelas Jebat. Selama ini telah terdapat dua kapal perang kelas *Fregat* dalam susunan tempur TLDM, yaitu KD Lekiu dan KD Jebat. Direncanakan penambahan dua *Fregat* akan dilaksanakan melalui kerja sama antara BAE System dengan Labuan *Shipbuilding and Engineering* (LSE). Program pembangunan kekuatan TLDM tidak luput menyentuh pula isu *Revolution in Military Affairs* (RMA). Isu RMA yang menjadi fokus kekuatan laut Malaysia adalah teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam peperangan informasi. Pembangunan kekuatan laut juga ditunjang pula oleh pembangunan kekuatan udara Malaysia melalui pengadaan pesawat tempur jenis F/A-18 Hornet, Su-27 SKM dan Su-30 MKM, dimana merupakan pesawat yang dapat dioperasikan dalam jarak jauh, seperti SU-

⁶² Alman Helvas Ali, *Pembangunan Kekuatan Laut Malaysia: Implikasi dan Respon Indonesia*, Jakarta:FKPM, 2009. h. 3

⁶³ *Ibid*, h. 3

27/Su-30 yang radius operasional sekitar 3.500 Km (satu sorti). Secara teoritis, eksistensi pesawat-pesawat tersebut di antaranya untuk mendukung operasi TLDM melalui pemberian payung udara.⁶⁴

3.1.3 SINGAPURA

Kepemimpinan Singapura sejak 1965 hingga saat ini terus mengembangkan “mentalitas terkepung” yang memandang Singapura selalu dalam ancaman terus menerus dari negara-negara tetangganya. Dengan komposisi penduduk 75,18 persen etnis Cina, sementara etnis Melayu hanya 13, 62 persen serta secara geografis sangat kecil dan sempit dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, dimana wilayah perairannya hanya sekitar 16 mil saja. “Mentalitas terkepung” Singapura akan terus dipelihara demi kelangsungan hidup negara ini. Terkait dengan hubungan dengan Indonesia, hubungan kedua negara selalu mengalami pasang surut terutama dalam menyangkut masalah perbatasan dan keamanan maritim. Sampai saat ini, segmen perbatasan kedua negara yang belum disepakati adalah di segmen timur mulai dari utara Nongsa pulau Batam hingga pulau Pedra Branca (karang *Horsburgh*). Sedangkan terkait masalah keamanan maritim, sebagai negara pulau yang urat nadi ekonominya sangat tergantung pada keamanan selat Malaka, Singapura mempunyai kecenderungan lebih mempercayai keterlibatan kekuatan ekstra kawasan dalam penanganan keamanan maritim di selat Malaka. Kecenderungan Singapura tersebut berlawanan dengan aspirasi dua negara berkepentingan di selat Malaka yaitu, Indonesia dan Malaysia yang tidak ingin ada campur tangan langsung pihak asing dalam penanganan perairan strategis tersebut.⁶⁵

Di tengah lingkungan strategis yang kurang bersahabat tersebut, mau tidak mau Singapura terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kekuatan angkatan militernya. Saat ini Angkatan Bersenjata Singapura statusnya hampir mencapai *Third Generation Force* dengan mempertahankan keunggulan kualitatif kekuatan pertahanannya dibanding negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

⁶⁴ *Ibid*, h. 3

⁶⁵ Alman Helvas Ali, *Analisis Terhadap Kebijakan Pertahanan Singapura*, Jakarta:FKPM, 2010. h. 5-6

Dalam strategi pertahanannya Singapura menerapkan *porcupine strategy* sebagai pengembangan dari *poisonous shrimp strategy* yang didasarkan pada anggapan bahwa negara kecil dengan kemampuan pertahanan yang dihormati akan dapat menangkal agresor potensial. Untuk dapat melaksanakan strategi pertahanan yang telah dirancang, Singapura mengkombinasikan pemenuhan sistem senjata melalui pemenuhan dari sumber industri pertahanan lokal dengan industri pertahanan asing. Untuk persenjataan angkatan lautnya, selain membuat beberapa sistem senjata di dalam negeri, Singapura juga mengandalkan pada Alutsista buatan Eropa dan Israel. Seperti, kapal *fregat* asal Prancis dan kapal selam buatan Swedia, sedangkan persenjataan kapal permukaan khususnya rudal sebagian dipasok dari Israel.⁶⁶

Industri pertahanan lokal Singapura seperti *ST Engineering* berkontribusi besar terhadap pembangunan militer Singapura, khususnya bagi angkatan lautnya dalam kemampuan memelihara berbagai kapal perang. Melalui anak usahanya *ST Marine* mampu menyuplai kebutuhan kekuatan angkatan laut Singapura terutama untuk kebutuhan kapal patroli, kapal penyapu ranjau, dan kapal LST. Selain mendukung kebutuhan kekuatan pertahanan Singapura, industri lokalnya juga telah menjadi salah satu pemain di kancah bisnis Internasional. Terkait dengan industri pertahanan, Singapura telah mengadopsi *Revolution in Military Affairs* (RMA), sehingga setiap sistem senjata yang diproduksi oleh industri pertahanan Singapura merupakan kebutuhan nyata angkatan bersenjata, sehingga spesifikasi teknis, *operational requirement* dan lain-lain sesuai dengan keinginan calon konsumen. Dalam sistem senjata tersebut ditanamkan teknologi-teknologi yang terkait dengan aplikasi RMA dengan keterlibatan dari *Defence Science and Technology Agency* (DSTA) dan *Defence Science Organization* (DSO). Esensi dari upaya-upaya teknologi pertahanan yang terkait dengan RMA berfokus pengadaan, pengembangan, dan integrasi teknologi untuk komando dan kendali dengan sistem intelijen, pengamatan, dan pengintaian, serta dengan senjata-senjata kendali presisi. Tujuannya adalah agar satuan-satuan tempur Angkatan Bersenjata Singapura mampu menentukan lokasi, sasaran dan

⁶⁶ *Ibid*, h. 6

menghancurkan sasaran secara efektif dalam konteks kekuatan gabungan dan operasi-operasi gabungan sepanjang waktu.⁶⁷

Dengan menadopsi RMA serta dukungan kuat dari industri pertahananya, kekuatan pertahanan Singapura merupakan yang termmodern di kawasan Asia Tenggara, bahkan Singapura sudah mempunyai kemampuan memimpin operasi multinasional. Kekuatan pertahanan modern Singapura tentunya sangat berimplikasi terhadap kemampuan pengkalannya. Untuk komposisi Alutsista angkatan laut Singapura dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 : Alutsista Angkatan Laut Singapura

Jenis Alutsista	Jumlah
Air craft	
Fighter ground attack	
Maritime Patrol reconnaissance	
Training	
Transport	
Utility	
Aircraft Carrier	
Helicopter	
Amphibious	
Assault Vehicle	4
Landing Ship, Medium	
Landing Ship, Tank	4
Landing ship	
Anti Tank	
Anti tank missile	
Corvettes	
Corvettes	
With guide missile	6
Frigates	
Frigate	
With guide missile	6
Helicopter	
Anti submarine warfare	
utility	
Anti submarine/anti surface	

⁶⁷ *Ibid*, h. 6

warfare	
Landing Craft	34
Medium	
Utility	34
Vehicles and personnel	
Mine Warfare, Counter	4
Counter measure, support	
Counter measure, Vessel	
Hunter, Coastal	4
Sweeper, Coastal	
Sweeper, inshore	
Counter measure, Coastal	
Mine sweeper	
Patrol and Coastal Combatants	23
Fast Patrol craft with SSM	
Fast Patrol craft, torpedo	
Fast Patrol craft, Coastal	
Patrol craft	
Patrol Craft offshore	11
Patrol craft, coastal	
Patrol craft, inshore	
Patrol craft, riverine	
Patrol Hydrofoil with torpedo	
Patrol boat, inshore	12
Patrol boat riverine	
Personel carrier	
Armored personnel carrier	
Submarines, Tactical	4
Submarine, diesel with ASW capability	4

Sumber : Diolah dari *Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2010* (London: Routledge, 2010), *Center for Strategic and International Studies (CSIS) Washington, DC, The Military Balance In Asia:1990-2010 A Quantitative Analysis*, dan *Naval Forces, Source Book 2010, International Forum For Maritim Power, Germany*

3.1.4 FILIPINA

Filipina mempunyai batas maritim yang belum tuntas disepakati dengan Indonesia, akan tetapi berbagai negosiasi terus berlangsung untuk membicarakan batas maritim diantara kedua negara. Pada awalnya, ada dua permasalahan utama dalam penentuan batas (*delimitasi*) maritim antar kedua negara. Permasalahan pertama adalah berlaku dan dianutnya Traktat Paris 1898 dan Traktat 1930 oleh Filipina yang menyebabkan wilayah maritim Filipina berupa kotak, tidak menganut prinsip jarak dari garis pangkal seperti ditegaskan oleh hukum internasional. Hal ini menyulitkan negosiasi, karena dasar hukum yang digunakan Filipina berbeda dengan Indonesia yang cenderung mengacu pada UNCLOS.⁶⁸

Permasalahan kedua adalah kepemilikan pulau Palmas atau oleh Indonesia disebut Pulau Miangas. Sebelum adanya kesepakatan akan kepemilikan pulau ini, Filipina telah memuat seluruh bagian wilayah Filipina yang didasarkan pada perjanjian-perjanjian terdahulu yang pada intinya bahwa pulau Miangas termasuk ke dalam wilayah Filipina. Dasar hukum yang digunakan adalah:

- 1) Traktat Paris, 10 Desember 1898, khususnya pasal III yang dibuat antara Amerika Serikat dan Spanyol.
- 2) Traktat Washington, 7 November 1900 antara Pemerintahan Amerika Serikat dan Spanyol.
- 3) Traktat 2 Januari 1930 antara Amerika Serikat dan Inggris.

Dengan berpedoman pada keputusan Mahkamah Arbitrasi Permanen pada 1928 di Den Haag. Indonesia berusaha untuk membuktikan klaim Filipina tersebut. Berdasarkan proses Arbitrasi tersebut Spanyol tidak bisa membuktikan kepemilikan pulau Miangas sampai saat penyerahannya kepada Amerika Serikat. Sementara Belanda dapat membuktikan secara administratif penguasaannya atas pulau tersebut sejak 1677 sehingga pulau Miangas menjadi wilayah kedaulatan NKRI, begitu juga persoalan wilayah maritim Filipina yang berbentuk kotak juga sudah terselesaikan dimana Filipina menyepakati untuk mengacu pada aturan

⁶⁸ *Ibid*, h. 148

UNCLOS, akan tetapi untuk kawasan perairan antara pantai utara pulau Sulawesi dengan pantai selatan pulau Mindanao, serta dasar laut pulau Balut, Filipina dengan pantai laut Sulawesi belum menemukan titik temu, karena adanya perbedaan pandangan dalam mewujudkan batas maritim yang “adil” atau *equitable*.⁶⁹ Selain itu, kabupaten Sangihe, Talaud, dan Sitaro (Satas) berbatasan dengan wilayah selatan Filipina dan merupakan tempat perdagangan lintas batas yang dikenal sebagai “jembatan” atau tempat strategis mobilitas tokoh-tokoh gerakan radikal, seperti terorisme. Jalur perairan di wilayah Satas juga dikenal sebagai jalur perdagangan ilegal, seperti senjata api.⁷⁰

Adanya hasil studi Kementerian Kelautan Filipina yang menyatakan, Laut China Selatan mengandung sepertiga dari keseluruhan biodiversitas laut dunia. Dari perdagangan, lebih dari 50% *tonase* tahunan kapal-kapal dagang dunia melintas kawasan Laut China Selatan. Ditambah adanya cadangan minyak senilai 7,7 miliar barel dan cadangan gas alam sejumlah 266 triliun kaki kubik.⁷¹ Melihat hasil studi tersebut, tidak mengherankan Filipina juga memperkuat angkatan lautnya untuk mengamankan perairan lautnya di Asia Tenggara dan terlibat dalam klaim di wilayah Laut China Selatan. Kekuatan Alutsista angkatan laut Filipina tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 : Alutsista Angkatan Laut Filipina

Jenis Alutsista	Jumlah
Air craft	6
Fighter ground attack	
Maritime Patrol	
reconnaissance	
Training	
Transport	6
Utility	
Aircraft Carrier	
Helicopter	
Amphibious	92
Assault Vehicle	85

⁶⁹ *Ibid*, h. 149

⁷⁰ *sebuah 'jalur' Teroris dan Perdagangan*, Kompas, 28 April 2010

⁷¹ *Was was karena Konvensi Perbatasan tidak Jelas*, Media Indonesia, 24 Agustus 2010

Landing Ship, Medium	
Landing Ship, Tank	7
Landing ship	
Anti Tank	
Anti tank missile	
Corvettes	
Corvettes	
With guide missile	
Frigates	1
Frigate	1
With guide missile	
Helicopter	5
Anti submarine warfare	
utility	5
Anti submarine/anti surface warfare	
Landing Craft	39
Medium	30
Utility	3
Vehicles and personnel	6
Mine Warfare, Counter	
Counter measure, support	
Counter measure, Vessel	
Hunter, Coastal	
Sweeper, Coastal	
Sweeper, inshore	
Counter measure, Coastal	
Mine sweeper	
Patrol and Coastal Combatants	62
Fast Patrol craft with SSM	
Fast Patrol craft, torpedo	
Fast Patrol craft, Coastal	1
Patrol craft	
Patrol Craft offshore	13
Patrol craft, coastal	14
Patrol craft, inshore	34
Patrol craft, riverine	
Patrol Hydrofoil with torpedo	
Patrol boat, inshore	
Patrol boat riverine	
Personel carrier	24
Armored personnel carrier	24
Submarines, Tactical	

Submarine, diesel with ASW capability	
---------------------------------------	--

Sumber : Diolah dari *Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2010* (London: Routledge, 2010), *Center for Strategic and International Studies (CSIS) Washington, DC, The Military Balance In Asia:1990-2010 A Quantitative Analysis*, dan *Naval Forces, Source Book 2010, International Forum For Maritim Power, Germany*

3.1.5 VIETNAM

Vietnam saat ini terus meningkatkan pembangunannya. Begitu juga dengan pembangunan angkatan lautnya, apalagi Vietnam berambisi untuk mengklaim sebagian wilayah Laut China Selatan berdasarkan landas kontinen dan ZEE, hal tersebut terlihat dari pendudukan 20 Pulau di kepulauan Spratley dan bersengketa dengan China yang mereka tuduh mengambil secara paksa kepulauan Paracel pada 1974.⁷² Sedangkan, dengan Indonesia semenjak masih di bawah pemerintahan Vietnam Selatan telah melakukan perundingan mengenai landas kontinen sejak tahun 1975. Pada perundingan tingkat teknis ke-7 tahun 1984, Vietnam tetap berpegang teguh pada usul bahwa "*Disputed Area*" harus dibagi berdasarkan prinsip *equity* (keadilan). *Disputed area* adalah daerah yang terletak diantara "garis tengah" sebagai usul Indonesia dan "*harmonized line*" atas usul Vietnam.

Indonesia sendiri berpendapat bahwa dengan membagi dua "*dispute area*" tersebut akan merugikan Indonesia, karena Vietnam menuntut sistem *deep channel* atau sistem aliran palung yang akhirnya letak perbatasan sampai jarak 15 mil dari Sekatung. Perbedaan persepsi ini antara pulau Sekatung (utara Natuna, Indonesia) dan pulau Kondor (Vietnam), perbedaan persepsi ini berlangsung sangat alot hingga memakan waktu sekitar 25 tahun. Walaupun, saat ini pemerintah Vietnam dan Indonesia telah satu suara dalam kesepakatan seperti diberitakan *Jakarta post* pada 14 februari 2007. Akan tetapi, persetujuan diantara

⁷² *China Panaskan Kawasan*, Media Indonesia, 29 Oktober 2010

kedua negara tersebut harus segera diratifikasi terutama untuk memperkuat kedudukan Indonesia sehubungan dengan klaim sepihak Vietnam terhadap sebagian wilayah gugusan Natuna milik Indonesia yang kaya minyak.⁷³

Terkait pengamanan daerah perairannya dan ambisi terhadap klaimnya terhadap sebagian wilayah di Laut China Selatan, Vietnam mempunyai Alutsista angkatan laut yang cukup kuat seperti tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 : Alutsista Angkatan Laut Vietnam

Jenis Alutsista	Jumlah
Air craft	
Fighter ground attack	
Maritime Patrol	
reconnaissance	
Training	
Transport	
Utility	
Aircraft Carrier	
Helicopter	
Amphibious	
Assault Vehicle	6
Landing Ship, Medium	3
Landing Ship, Tank	3
Landing ship	
Anti Tank	
Anti tank missile	
Corvettes	
Corvettes	6
With guide missile	6
Frigates	
Frigate	5
With guide missile	
Helicopter	
Anti submarine warfare	
utility	
Anti submarine/anti surface warfare	
Landing Craft	
Medium	23
	18

⁷³ I Made Andi Arsana, *Op cit*, h. 144-145

Utility	5
Vehicles and personnel	
Mine Warfare, Counter	14
Counter measure, support	
Counter measure, Vessel	5
Hunter, Coastal	
Sweeper, Coastal	7
Sweeper, inshore	2
Counter measure, Coastal	
Mine sweeper	
Patrol and Coastal Combatants	38
Fast Patrol craft with SSM	10
Fast Patrol craft, torpedo	3
Fast Patrol craft, Coastal	
Patrol craft	
Patrol Craft offshore	
Patrol craft, coastal	
Patrol craft, inshore	16
Patrol craft, riverine	
Patrol Hydrofoil with torpedo	5
Patrol boat, inshore	
Patrol boat riverine	4
Personel carrier	
Armored personnel carrier	
Submarines, Tactical	
Submarine, diesel with ASW capability	

Sumber : Diolah dari *Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2010* (London: Routledge, 2010), *Center for Strategic and International Studies (CSIS) Washinton, DC, The Military Balance In Asia:1990-2010 A Quantitative Analysis*, dan *Naval Forces, Source Book 2010, International Forum For Maritim Power, Germany*

3.1.6 AUSTRALIA

Sebagai sekutu dekat AS di Asia Pasifik, Australia merupakan ancaman potensial bagi Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat sejarah diplomasi dan militer sejak masa penjajahan Belanda, perang kemerdekaan Indonesia, konfrontasi dengan Malaysia hingga lepasnya Timor-Timur (sekarang Timor Leste) Australia

selalu berusaha mengambil kepentingan yang merugikan Indonesia. Sikap tidak bersahabat Australia ini dikarenakan Australia selalu menganggap Indonesia merupakan ancaman bagi Australia di kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara. Penuturan dari mantan Menteri Luar Negeri, Mochtar Kusumatmadja dapat dijadikan rujukan sikap tidak bersahabat Australia tersebut, karena menurut Mochtar, secara Historis nelayan Bugis pada masa kerajaan Gowa Makasar sekitar tahun 1650 sudah terlebih dahulu mendarat di Australia sebelum kapal-kapal Inggris yang mendarat kemudian. Nelayan-nelayan Bugis tersebut menyebut Australia sebagai *Tanah Arnhem* sebagai *Marege*, dan bagian daerah barat lautnya sebagai Kayu Jawa⁷⁴, hal inilah yang selalu menjadi kekhawatiran Australia akan klaim Indonesia atas wilayah daratan Australia, sehingga sistem pertahanan Australia selalu memproyeksikan kemungkinan datang ancaman keamanan dari utara (Indonesia).

Terkait permasalahan batas maritim Australia dan Indonesia telah memulai perjanjian sejak 18 Mei 1971, akan tetapi dengan kemerdekaan Timor Leste pada 2002, maka perjanjian antara Indonesia dan Australia menjadi urusan tiga negara yaitu, Indonesia, Australia, dan Timor Leste. Untuk perjanjian antara Australia dan Indonesia menggunakan prinsip *ekuidistan*, sehingga berada pada garis tengah antara Australia dan Indonesia, sayangnya kedua negara belum meratifikasi kesepakatan perjanjian tersebut.⁷⁵ Padahal antara Australia dan Indonesia masih terdapat masalah perbatasan perairan terkait dasar laut pulau Roti, Indonesia dan pulau Ashmore, Australia dan kawasan laut antara pulau Christmas, Australia dan pantai Jawa Barat, Indonesia yang jaraknya hanya 118 mil.⁷⁶

Untuk memainkan peran di kawasan Asia Pasifik dan mengantisipasi ancaman dari Indonesia yang disebutnya sebagai ancaman *riil* bagi sistem pertahanannya, Australia mempersiapkan kekuatan militernya dengan tangguh, khususnya Alutsista angkatan lautnya. Seperti di tabel dibawah ini:

⁷⁴ H.S. Kirbiantoro, dan Dody Rudianto, *Rekontruksi Pertahanan Indonesia, Potensi, Tantangan, dan Prospek*, Jakarta: Golden Terayon Press, 2010. h. 40

⁷⁵ I Made Andi Arsana, *Op cit*, h. 147

⁷⁶ *Koordinasi di Laut Amburadul*, Media Indonesia, 24 Agustus 2010

Tabel 3.6 : Alutsista Angkatan Laut Australia

Jenis Alutsista	Jumlah
Air craft	
Maritime Patrol	
Transport	
Amphibious	3
Assault Vehicle	
Landing platform, dock	
Landing platform, Helicopter	2
Landing ship, tank	1
Corvettes	
Corvettes	
With guide missile	
Frigates	12
Frigate	8
With guide missile	4
Helicopter	40
Anti submarine warfare	16
Support utility	24
Anti submarine/anti surface warfare	
Landing Craft	27
Heavy	6
Medium	21
Utility	
Mine Warfare, Counter	11
Counter measure, Vessel	
Hunter, Coastal	6
Sweeper, Coastal	2
Sweeper, Drone	3
Counter measure, Coastal	
Patrol and Coastal Combatants	14
Fast Patrol craft with SSM	
Fast Patrol craft, Coastal	
Patrol craft	
Patrol Craft offshore	14
Patrol craft, coastal	
Patrol craft, riverine	
Patrol boat	
Patrol craft, torpedo	
Personel carrier	
Armored infantry fighting vehicle	

Armored personnel carrier	
Reconnaissance	
Submarines, Tactical	6
Submarine, diesel with ASW capability	6

Sumber : Diolah dari *Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2010* (London: Routledge, 2010), *Center for Strategic and International Studies (CSIS) Washington, DC, The Military Balance In Asia:1990-2010 A Quantitative Analysis*, dan *Naval Forces, Source Book 2010, International Forum For Maritim Power, Germany*

Mengacu pada buku putih pertahanan Australia *Defending Australia In The Asia Pasipic Century: Force 2030* yang diterbitkan pada 2 Mei 2009, salah satu program pembangunan kekuatan angkatan laut Australia adalah pengadaan 12 kapal selam konvensional hingga 2030, 8 (delapan) *fregat* anti kapal selam, dan 24 heli anti kapal selam. Selain itu, terdapat juga program SEA 1000, yaitu pengadaan kapal selam masa depan Australia untuk meningkatkan kemampuan perang bawah air.⁷⁷

Dalam buku putihnya, Australia membangun struktur militernya kekuatan lebih menitikberatkan pada kekuatan maritim, dalam hal ini angkatan laut dan didukung oleh kekuatan udara dan kekuatan darat. Paduan ketiga kekuatan itu dibangun untuk mampu melaksanakan serangan strategis, keunggulan informasi, proyeksi kekuatan serta tugas-tugas domestik dan pertahanan rudal balistik. Strategi maritim adalah tulang punggung dalam pertahanan Australia dengan pertimbangan geografis, pembangunan kekuatan laut difokuskan pada kemampuan peperangan bawah air, dengan tambahan kemampuan peperangan udara dan peperangan amfibi. Untuk merealisasikan strategi tersebut, Australia telah memesan tiga kapal perusak yang akan dilengkapi dengan rudal anti pesawat jarak jauh *Standard Missile 6 (SM-6)*, selain *Aegis Combat System*. Sistem *sensor Cooperative Engagement Capability (CEC)* akan terpasang pula di ketiga kapal

⁷⁷Alman Helvas Ali, *Pembangunan Kekuatan Kapal Selam Australia*, Jakarta:FKPM, 2010. h. 10

tersebut, sehingga nantinya interoperable dengan sensor serupa pada pesawat udara AEW&C yang tengah dipesan oleh *Royal Australia Air Force*.

Sedangkan, untuk kemampuan peperangan amfibi, programnya adalah kelanjutan dari program pemerintahan Partai Liberal. Yaitu pengadaan dua *Landing Helicopter Dock (LHD)* bertonase 27.000 ton dari galangan Navantia, Spanyol. Pengadaan lainnya adalah sejumlah kapal baru yang belum ditentukan jumlahnya, dengan tonase 10.000-15.000 ton, mempunyai landasan helikopter dan mampu menurunkan kendaraan dan kargo lainnya tanpa membutuhkan pelabuhan. Disamping itu, enam *heavy landing craft* dengan kemampuan *ocean going* yang telah ditingkatkan akan turut diakuisisi oleh pemerintah Australia. Selain pembelian heli anti kapal selam, pembangunan maritim ditunjang pula oleh pembelian enam heli MRH-90 guna menggantikan *heli sea King* milik *Royal Australian Navy*. Untuk kepentingan patroli, *survei hidrografi, oceanografi*, lawan peranjauan, direncanakan kekuatan laut Australia akan menerima 20 *offshore Combatant Vessel* serba guna. Kapal dengan tonase 2.000 ini akan menggunakan konsep single modular, sehingga akan memberikan efisiensi operasional yang signifikan. Guna mendukung kemampuan proyeksi kelautan, kekuatan laut Australia akan menerima sebuah kapal bantu logistik baru untuk menggantikan dua kapal suplai. Kapal bantu logistik baru tersebut akan memperkuat kemampuan proyeksi kekuatan Australia di kawasan Asia Pasifik. Pengalaman Australia beroperasi di Timor-Timur sejak 1999 hingga kini menjadi salah satu pertimbangan dalam pengadaan kapal bantu logistik baru.

Peningkatan kemampuan elektronika turut pula mendapatkan prioritas tinggi dari pemerintahan Australia, kedepannya akan didirikan pusat peperangan elektronika gabungan melalui penempatan pada lokasi yang sama terhadap beberapa satuan kerja yang terkait dengan peperangan elektronika di dalam organisasi *Australian Defence Force*, berikutnya pembangunan kemampuan di bidang *network centric warfare* yang mencakup domain maritim, laut, darat, dan *Intelligence Surveillance and Reconnaissance (ISR)* dimana menggabungkan antara sensor, senjata, dan sistem lainnya. Terkait peningkatan ISR yang lebih luas, Australia telah mendorong peningkatan kerja sama dengan Amerika Serikat,

khususnya dengan *U.S. Pasipic Command* untuk wilayah Asia Pasifik sesuai dengan kesepakatan dalam Australia – *United States Ministerial Consultations* (AUSMIN) pada April 2009.

3.2 ALUTSISTA DAN TNI AL

3.2.1 SEJARAH ALUTSISTA TNI AL⁷⁸

TNI AL merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi laut, dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan laut (KSAL). TNI AL berada di bawah komando Markas Besar TNI. Kepala Staf angkatan laut adalah perwira tinggi berbintang empat dengan pangkat Laksamana mengepalangi angkatan laut di bawah Panglima TNI. Sejarah TNI AL dimulai pada 10 September 1945, ketika pemerintah mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut). BKR laut ini dipelopori oleh para pelaut yang pernah bertugas di jajaran *Koninklijke Marine* (AL Belanda) dan *Kaigun* di masa penjajahan Jepang. Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai angkatan laut Republik Indonesia (ALRI), dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Sejumlah Pangkalan angkatan laut terbentuk, kapal-kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diperdayakan, dan personel pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu.

Berakhirnya perang kemerdekaan menandai pembangunan ALRI sebagai angkatan laut modern. Sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), sejak tahun 1949, ALRI menerima berbagai peralatan perang berupa kapal-kapal perang beserta berbagai fasilitas pendukungnya berupa Pangkalan angkatan laut. Selama 1949-1959 ALRI berhasil menyempurnakan kekuatan dan meningkatkan kemampuannya. Di bidang Organisasi ALRI membentuk Armada, Korps Marinir yang saat ini disebut sebagai Korps Komando angkatan laut (KKO-AL), Penerbangan angkatan laut dan sejumlah Komando Daerah Maritim sebagai

⁷⁸ H.S. Kirbiantoro dan Dody Rudianto, *Op cit*, h. 87-91

komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Peralatan tempur ALRI pun bertambah baik yang berasal dari penyerahan angkatan laut Belanda maupun pembelian dari berbagai negara.

Dengan peningkatan kekuatan dan kemampuan tersebut, ALRI mulai menyempurnakan strategi, taktik, maupun teknik operasi laut yang langsung diaplikasikan dalam berbagai operasi militer dalam rangka menghadapi gerakan separatis yang bermunculan pada tahun-tahun 1950 hingga 1959. Dalam operasi penugasan PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi, DI/TII di Jawa Barat, dan RMS di Maluku, ALRI memperoleh pelajaran dalam penerapan konsep operasi laut, operasi amfibi, dan operasi gabungan dengan angkatan lain. Pada saat kondisi negara mulai membaik dari ancaman desintegrasi, pada 1959 ALRI mencanangkan program yang dikenal sebagai Menuju Angkatan Laut yang Jaya. Sampai tahun 1965 ALRI mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini dilatarbelakangi oleh politik konfrontasi dalam rangka merebut Irian Barat yang dirasa tidak dapat diselesaikan secara diplomatis. Berbagai peralatan tempur angkatan laut dari negara Eropa Timur memperkuat ALRI dan menjadi kekuatan dominan pada saat itu. Beberapa mesin perang yang terkenal di jajaran ALRI antara lain kapal penjelajah (*cruiser*) RI Irian, kapal penghancur (*destroyer*) klas 'Skory', perusak (*fregat*) klas 'Riga', Kapal selam klas 'Whisky', kapal tempur cepat berpeluru kendali klas 'Komar', pesawat pembom jarak jauh Ilyushin IL-28, dan Tank Amfibi PT-76. Dengan kekuatan tersebut pada era tahun 1960-an ALRI disebut-sebut sebagai kekuatan angkatan laut terbesar di Asia.

Ada beberapa operasi laut selama operasi pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan sebutan Operasi Trikora itu. Pada awal Trikora digelar, kapal-kapal cepat torpedo ALRI harus berhadapan dengan kapal-kapal perusak, *fregat*, dan pesawat angkatan laut Belanda di Laut Aru pada 15 Januari 1962. Komodor Yos Soedarso beserta RI Macan Tutul tenggelam pada pertempuran laut tersebut. Peristiwa yang kemudian dikenang sebagai Hari Dharma Samudera itu memacu semangat untuk merebut Irian Barat secara militer. Pada saat itu ALRI mampu mengorganisasikan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Tidak kurang dari 100 kapal perang dan

16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut. Gelar kekuatan tersebut memaksa Belanda kembali ke meja perundingan dan dicapai kesepakatan untuk menyerahkan Irian Barat ke pangkuan RI.

Sejak 1966 ALRI yang kemudian disebut dengan TNI AL mengalami babak baru dalam perjalanan sejarahnya seiring dengan upaya integrasi ABRI. Dengan adanya integrasi ABRI secara organisatoris dan operasional telah mampu menyamakan langkah pada pelaksanaan tugas di bidang pertahanan dan keamanan sehingga secara doktrinal, arah pengembangan kekuatan dan kemampuan setiap angkatan menjadi terpusat. Kegiatan operasi yang menonjol pada kurun waktu 1970-an adalah Operasi Seroja dalam rangka integrasi Timor-Timur kepada RI. TNI AL berperan aktif dalam operasi pendaratan pasukan, operasi darat gabungan, dan pergeseran pasukan melalui laut.

Mulai dasawarsa 1980-an TNI AL melakukan langkah modernisasi peralatan tempurnya, kapal-kapal perang buatan Eropa Timur yang telah menjadi inti kekuatan TNI AL era 1960 dan 1970-an dinilai sudah tidak memenuhi tuntutan tugas TNI AL. Memburuknya hubungan RI - Uni Sovyet pasca pemerintahan Presiden Soekarno membuat terhentinya kerja sama militer kedua negara. Oleh karena itu, TNI AL beralih mengadopsi teknologi Barat untuk memodernisasi kekuatan dan kemampuannya dengan membeli kapal-kapal perang dan peralatan tempur utama lainnya dari berbagai negara, diantaranya korvet berpeluru kendali kelas 'Fatahillah' dari Belanda, *fregat* berpeluru kendali klas '*Van Speijk*' eks-AL Belanda, Kapal selam klas 209/1300 buatan Jerman Barat, Kapal tempur cepat berpeluru kendali klas '*Patrol Ship Killer*' buatan Korea Selatan, dan Pesawat Patroli Maritim '*Nomad-Searchmaster*' eks-Angkatan Bersenjata Australia. Selama dasawarsa 1990-an TNI AL mendapatkan tambahan kekuatan berupa kapal-kapal perang jenis korvet klas '*Parchim*', kapal pendarat tank (LST) klas '*Frosch*', dan Penyapu Ranjau klas Kondor. Untuk kedepanya dalam memenuhi kebutuhan Alutsistanya TNI AL menerapkan kebijakan menuju kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) sebagai kekuatan yang disusun berdasarkan kemampuan yang diperlukan (*capability design*) untuk

menghadapi segala bentuk ancaman dalam rangka menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan NKRI dengan segala resiko yang dihadapi.

3.2.2 VISI, MISI, TUGAS, DAN PERAN TNI AL⁷⁹

1) Visi TNI AL

TNI AL yang profesional, tangguh dan berwibawa serta dicintai rakyat.

2) Misi TNI AL

- a) Melindungi dan menjaga keutuhan dan integritas bangsa dan negara
- b) Menegakkan kedaulatan dan hukum di laut
- c) Mengamankan dan memperlancar pembangunan nasional khususnya pembangunan kelautan.
- d) Mewujudkan Postur TNI AL yang Profesional, Tangguh, Berwibawa, dan Sejahtera.
- e) Ikut mewujudkan perdamaian dunia melalui diplomasi angkatan laut

3) Tugas TNI AL

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, pasal 9, tugas TNI AL adalah:

- a) Melaksanakan tugas TNI matra Laut di bidang pertahanan.
- b) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- c) Melaksanakan tugas diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah
- d) Melaksanakan tugas TNI dan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut.
- e) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

⁷⁹ *Ibid*, h. 91-100

4) Peran TNI AL

a) Peran Militer

b) Peran Konstabulari (Penegakan Hukum)

c) Peran Diplomasi

3.2.3 KEKUATAN TNI AL⁸⁰

Kekuatan angkatan laut ditentukan oleh kapal yang diukur dengan persenjataannya, jenisnya, jumlahnya, dan mutu personilnya yang secara keseluruhan mencerminkan daya kemampuan operasi tempurnya yang berlanjut. Untuk Indonesia dikembangkan pola strategi Sistem Sejata Armada Terpadu (SSAT) dengan komponen yang terdiri dari Kapal, Marinir, Pesawat Udara, dan pangkalan dengan fasilitas labuh, pemeliharaan dan perbaikan kapal, serta perbekalan dan perawatan personil. Pola strategi tersebut disesuaikan dengan kondisi khas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi inilah menyebabkan Indonesia tidak cocok menggunakan strategi *Green Water Navy* dan Strategi *Blue Water Navy* yang dikemukakan oleh beberapa pihak. Strategi *Green Water Navy* maupun *Blue Water Navy* hanya dikembangkan untuk kemampuan melakukan operasi jangkauan laut jauh (*long distance naval operation*). Dengan memanfaatkan pulau-pulau yang ada Indonesia dapat membangun banyak pengkalan, sehingga ekor logistik menjadi lebih pendek.⁸¹

Indonesia tetap berpotensi untuk mewujudkan strategi *Green Water Navy* dan strategi *Blue Water Navy* jika kepentingan nasional mengharuskan untuk mewujudkannya, akan tetapi melihat tingkat efisiensi, efektivitas, dan *fiscal reality* maka keharusan mengoptimalkan pemanfaatan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dengan membangun banyak pengkalan yang menyebabkan ekor logistik menjadi lebih pendek dapat dilakukan TNI AL sebagai

⁸⁰ *Ibid*, h. 97-104

⁸¹ Wawancara dengan Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, 26 November 2010

strategi dalam menjaga dan mengamankan kedaulatan wilayah yuridiksi perairan NKRI.

Untuk Alutsistanya tetap dikembangkan strategi khas Indonesia dengan pola strategi Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) dengan komponen yang terdiri dari Kapal, Marinir, Pesawat Udara, dan pangkalan dengan fasilitas labuh, pemeliharaan dan perbaikan kapal, serta perbekalan dan perawatan personil yang tentunya disesuaikan dengan kondisi khas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kekuatan TNI AL terbagi dalam komando armada yaitu, Komando Armada Barat berpusat di Tanjung Priok, Jakarta, dan Komando Armada Timur berpusat di Surabaya, serta Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal) dan Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) yang membawahi Korps Marinir. Pada tiap Komando Armada membawahi sejumlah Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal).

3.2.3.1 Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal).

- 1) Lantamal I di Belawan, membawahi 2 Pangkalan angkatan laut, meliputi Sabang dan Sibolga. Satu Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Sabang, dan dua fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (Fasharkan) di Sabang, Belawan.
- 2) Lantamal II di Padang, membawahi 2 Pangkalan meliputi Teluk Bayur dan Dumai.
- 3) Lantamal III di Jakarta, membawahi 7 Pangkalan angkatan laut, meliputi Bengkulu, Palembang, Cirebon, Bandung, Panjang, Banten, dan Bangka Belitung (Babel). Memiliki satu fasilitas pemeliharaan dan perbaikan di Pondok Dayung, Jakarta yang memiliki kemampuan membuat kapal patroli jenis KAL ukuran 28-35 meter.
- 4) Lantamal IV di Tanjung Pinang, membawahi 6 pangkalan angkatan laut, yaitu Batam, Pontianak, Tarempa, Ranai, Tanjung Balai Karimun, dan Dabo Sinkep. Lantamal Tanjung Pinang mempunyai satu Fasharkan di Mentigi yang mempunyai kemampuan membuat kapal Patroli (KAL) ukuran 12, 28,

dan 35 meter. Disamping itu, memiliki 2 Lanudal di Matak, Kepulauan Natuna dan di Tanjung Pinang/Kijang.

- 5) Lantamal V di Surabaya, membawahi pangkalan angkatan laut Tegal, Cilacap, Semarang, Yogyakarta, Malang, Banyuwangi, dan Benoa.
- 6) Lantamal VI di Makasar, membawahi pangkalan angkatan laut Kendari, Palu, Balikpapan, Kotabaru, dan Banjarmasin.
- 7) Lantamal VII di Kupang, membawahi pangkalan angkatan laut Mataram, Maumere, Kupang, Tual, dan Aru. Memiliki 1 Lanudal di Kupang.
- 8) Lantamal VIII di Kota Bitung, membawahi Pangkalan Laut Tarakan, Nunukan, Sangatta, dan Toli-toli. Memiliki 1 Lanudal di Manado.
- 9) Lantamal IX di Ambon, membawahi Pangkalan Laut Ternate.
- 10) Lantamal X Jayapura, membawahi Pangkalan angkatan laut Sorong, Biak, dan Timika serta satu Fashankar di Manokwari yang mampu membuat Kapal Patroli (KAL) ukuran 12 dan 28 meter.
- 11) Lantamal XI di Merauke, Papua (direncanakan)

Penomoran Lantamal diubah menjadi berurutan dari Lantamal I sampai XI sesuai lokasi dari Barat ke Timur pada 1 Agustus 2006 seiring dengan peresmian Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat menjadi Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) II.

3.2.3.2 Korps Marinir

Keberadaan Korps Marinir Republik Indonesia, dulu disebut KKO (Komando Kesatuan Operasi) merupakan kekuatan pemukul dan pendarat TNI AL. Secara garis besar Korps Marinir bertugas merebut kedudukan pantai musuh, mengamankan obyek vital TNI AL dan melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara lainnya. Berdasarkan rencana pengembangan kekuatan TNI AL untuk jangka waktu 2005-2024, kekuatan Korps Marinir (Kormar) akan ditingkatkan baik dari segi struktur maupun kekuatan fisik. Saat ini jumlah personil Marinir sekitar 17.000 orang. Jumlah ini dimasa depan akan ditingkatkan hingga 60.000 orang. Dalam rencana pengembangan, akan ada tiga pasukan Marinir (Pasmar), yaitu, kesatuan induk yang melekat di tiap Komando Wilayah Laut (Kowilla), 2

Brigade marinir berdiri sendiri, 1 Komando latihan Marinir dan 5 pangkalan Marinir ditambah 11 Batalyon Marinir pertahanan pangkalan.

3.2.3.3 Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal)

Puspenerbal merupakan bagian dari TNI AL yang bertugas menyediakan fungsi penerbangan bagi operasi-operasi angkatan laut. Puspenerbal merupakan pengganti dari Dinas Penerbangan TNI AL (Disnerbal) yang diresmikan pada peringatan Hari Ulang Tahun Penerbangan TNI AL ke- 50. Perubahan ini untuk mengefektifkan pembinaan di bidang penerbangan TNI AL yang selama ini masih terjadi duplikasi fungsi, khususnya pada aspek pembinaan material maupun pembinaan kemampuan pangkalan udara. Puspenerbal dibentuk sebagai sentralisasi pembinaan penerbangan TNI AL dalam satu wadah, sehingga memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian.

Sejak awal kelahirannya pada 1956, penerbangan TNI AL telah menunjukkan kemampuannya dalam berbagai operasi militer maupun non militer, seperti dalam operasi Trikora, Dwikora, Jaya Wijaya, Penumpasan PGRS/Parako, Seroja, Surya Bhaskara Jaya, Bantuan Tsunami dan gempa bumi di NAD, Nias, Gempa bumi Yogyakarta serta Jawa Tengah dan lain-lain. Operasi-operasi tersebut didukung pesawat udara sebagai *Fleet Air Wing* dalam setiap pelaksanaan operasi laut dan sekaligus menjadi tulang punggung penerbangan TNI AL yang tergabung dalam SSAT. Keberadaan penerbangan TNI AL senantiasa diperlukan, seperti kemampuan pengintaian udara taktis, anti kapal selam, anti kapal permukaan pendaratan pasukan pendarat lintas heli, angkut taktis serta pengamatan laut terbatas, dan lain sebagainya.

3.3 ALUTSISTA TNI AL SAAT INI

Dilihat dari tanggung jawab TNI AL dalam menjaga dan mengamankan kedaulatan perairan NKRI yang sangat luas dan berbagai upaya pembangunan kekuatan angkatan laut negara lingkungan terdekat, Alutsista TNI AL saat ini sangat terbatas dan terdiri dari berbagai jenis dan tipe yang beragam. Hal ini berpengaruh pada tingkat kesiapan operasional yang cenderung menurun karena

permasalahan pemeliharaannya yang sulit. Tingkat kesiapan unsur umumnya hanya pada tingkat siap berlayar, tidak siap tempur, bahkan beberapa kapal patroli yang dimiliki saat ini juga merupakan kapal yang terbuat dari bahan *fiberglass* dan tidak sesuai dengan spesifikasi militer.

Adapun Jumlah dan Jenis Kekuatan yang dimiliki TNI AL saat ini seperti terlihat ditabel dibawah ini:

Tabel 3.7 : Alutsista Angkatan Laut Indonesia

Jenis Alutsista	Indonesia
Air craft	46
Maritime Patrol	24
Transport	22
Amphibious	32
Assault Vehicle	
Landing platform, dock	4
Landing platform, Helicopter	
Landing ship, tank	28
Corvettes	27
Corvettes	23
With guide missile	4
Frigates	6
Frigate	
With guide missile	6
Helicopter	18
Anti submarine warfare	10
Support	5
utility	3
Anti submarine/anti surface warfare	
Landing Craft	54
Heavy	
Medium	
Utility	54
Mine Warfare, Counter	11
Counter measure, Vessel	
Hunter, Coastal	
Sweeper, Coastal	9
Sweeper, Drone	
Counter measure, Coastal	2

Patrol and Coastal Combatants	44
Fast Patrol craft with SSM	4
Fast Patrol craft, Coastal	4
Patrol craft	
Patrol Craft offshore	8
Patrol craft, coastal	21
Patrol craft, riverine	
Patrol boat	3
Patrol craft, torpedo	4
Personel carrier	134
Armored infantry fighting vehicle	34
Armored personnel carrier	100
Reconnaissance	24
Submarines, Tactical	2
Submarine, diesel with ASW capability	2

Sumber : Diolah dari *Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2010* (London: Routledge, 2010), *Center for Strategic and International Studies (CSIS) Washington, DC, The Military Balance In Asia:1990-2010 A Quantitative Analysis, Naval Forces, Source Book 2010, International Forum For Maritim Power, Germany, serta Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional, Yosron Ihza, Jakarta (Kertas Kerja Asrena KSAL dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI, 2009)*

Dari tabel di atas terlihat jumlah Alutsista yang dimiliki TNI AL saat ini masih sangat kurang bila dihadapkan pada tugas yang harus diemban dan cakupan luas wilayah yang harus diamankan serta kondisi teknis yang masih kurang memadai untuk siap operasi, dimana KRI sebagai unsur *Striking Force*, sebagai unsur *Supporting Force*, dan sebagai unsur *Patrolling Force* 41 % berusia 25-50 tahun dan 5 % berusia di atas 50 tahun. Begitu juga dengan kondisi teknisnya yang rata-rata kesiapan laik laut hanya 70% saja, belum lagi adanya ketidaksiapan untuk alat deteksi dan persenjataan. Kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh KRI, tetapi juga pada Alutsista lainnya seperti pesawat udara baik helikopter atau pesawat sayap putar (*rotary wing*) maupun pesawat sayap tetap (*fixed wing*) usia rata-ratanya mencapai 30 tahun dan peralatan tempur Korps Marinir TNI AL yang usia

rata-ratanya sudah mencapai 40 tahun, seperti tergambar dalam tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 : Kondisi Teknis Kapal Republik Indonesia (KRI)

NO	Jenis	Jumlah	Usia Rata-Rata (tahun)	KONIS		Keterangan
				PLATFORM	SEWACO	
1	Kapal Selam	2	31	SIAP (66%)	SIAP TBT (64%)	
2	Perusak Kapal Rudal	14	30	SIAP (75%)	TDK SIAP (68%)	Alat Deteksi dan Senjata
3	Perusak Kapal	15	25	SIAP (62%)	TDK SIAP (60%)	
4	Kapal Cepat Rudal	4				
5	Kapal Cepat Torpedo	2	25	SIAP (63%)	TDK SIAP (59%)	Senjata
6	Buru Ranjau	6	25	SIAP (69%)	TDK SIAP (69%)	PAP dan Alat Deteksi
7	Patrol Coastal	44	10-15	SIAP (70%)	SIAP (65%)	
8	Landing Platform Dock	4	3-5	SIAP (90%)	SIAP (90%)	
9	Angkut Tank	28	25-60	SIAP TBT (68%)	SIAP TBT (58%)	
10	Bantu Cair Minyak	5	40	SIAP TBT (62%)	TDK SIAP (57%)	
11	Bantu Angkut Personil	8	20-30	SIAP TBT (55%)	TDK SIAP (49%)	
12	Latih	2	57	SIAP (70%)		
13	Hidro Oseanografi	5	45	TDK SIAP (57%)	TDK SIAP (58%)	Alat Deteksi
14	Bantu Rumah Sakit	1	10	SIAP (80%)	SIAP (70%)	

15	Bantu Tunda Samudera	1	10	SIAP (60%)	SIAP (60%)	
16	Markas	1	48	SIAP (60%)	SIAP TBT (60%)	
17	Angkut Serba Guna	2	25	TDK SIAP (35%)	TDK SIAP (40%)	Senjata
18	Bantu Umum	3	45	TDK SIAP (65%)	TDK SIAP (60%)	Senjata

Sumber : *Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional*, Yosron Ihza, Jakarta, 2009
(Kertas Kerja Asrena KSAL dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI, 2009)

Tabel 3.9 : Kondisi Kendaraan Tempur TNI AL

NO	Jenis	Jumlah	Usia Rata-Rata (Tahun)	KONIS	
				PLATFORM	SEWACO
1	TANK BMP-3F				
2	TANK PT-76	68	40	TDK SIAP (30%)	TDK SIAP (20%)
3	TANK PT-76 (M)	54	40	SIAP (85%)	SIAP (80%)
4	TANK AMX 10 PAC	12	30	SIAP (70%)	SIAP (70%)
5	TANK RECOVERY	1	30	TDK SIAP (60%)	TDK SIAP (55%)
6	TANK RECOVERY BREM-2	3	30	SIAP (70%)	SIAP (70%)
7	PANSAM AMX-10P	35	11	TDK SIAP (45%)	TDK SIAP (40%)
8	PANSAM BTR-50P	25	45	TDK SIAP (50%)	TDK SIAP (50%)
9	PANSAM BTR-	69	45	TDK SIAP	TDK SIAP

	50P (M)			(50%)	(50%)
10	PANSAM BTR-50 PK	34	45	SIAP (70%)	SIAP (70%)
11	KAPA K-61	5	45	TDK SIAP (50%)	TDK SIAP (50%)
12	KAPA K-61 (R)	26	45	SIAP (70%)	SIAP (70%)
13	KAPA PTS	9	11	TDK SIAP (50%)	TDK SIAP (50%)
14	PANSROD BTR-152	8	48	TDK SIAP (45%)	TDK SIAP (40%)
15	PANSAM BTR-80A	12	8	SIAP (80%)	SIAP (80%)
16	KPR BM 14/17	27	48	TDK SIAP (40%)	TDK SIAP (40%)
17	SIZU NA-140	1	13	TDK SIAP (40%)	TDK SIAP (40%)
18	BVP-2	21	10	SIAP (70%)	SIAP (70%)
19	BVP-2K	2	10	TDK SIAP (40%)	TDK SIAP (40%)
20	VPV/RECOVERY	2	10	TDK SIAP (40%)	TDK SIAP (40%)
21	ROKET RM-70 CAL-22	9	10	SIAP (70%)	SIAP (70%)

Sumber : *Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional, Yosron Ihza, Jakarta, 2009 (Kertas Kerja Asrena KSAL dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI, 2009)*

Tabel 3.10 : Kondisi Penerbangan Satuan TNI AL

NO	Jenis	Jumlah	Usia Rata-rata (thn)	KONIS	
				PLATFORM	SEWACO
1	PATMAR	24	30	SIAP TBT (79%)	SIAP TBT (79%)
2	ANGKUT (NC-212)	13	30	SIAP (82%)	SIAP (82%)
3	LATIH	9	10-20	SIAP TBT (TBT 72%)	SIAP TBT (72%)
4	HELI AKPA/AKS				
5	HELI ESCORT				
6	HELI INTAI TAKTIS/BO	10	30	SIAP (85%)	SIAP (70%)
7	HELI ANGKUT	5	20	SIAP (90%)	SIAP (70%)
8	HELI LATIH	3	10	SIAP TBT (88%)	SIAP TBT (75%)

Sumber : *Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional, Yosron Ihza, Jakarta, 2009*
(Kertas Kerja Asrena KSAL dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI, 2009)

BAB 4

INDONESIA DAN KEBUTUHAN ALUTSISTA

4.1 KEBUTUHAN ALUTSISTA TNI AL

Secara fisik wilayah NKRI adalah rangkaian 17.506 pulau dengan laut yang lebih luas dari daratan serta telah diakui oleh dunia internasional sebagai negara kepulauan melalui UNCLOS 1982. Indonesia dengan 70% wilayahnya adalah wilayah perairan menyebabkan berbagai program pembangunan nasional tidak mungkin berjalan dengan baik, apabila tidak didukung dengan sistem keamanan yang baik untuk pelayaran dan navigasi transportasi laut dalam menjangkau semua pulau di Indonesia, karena berbagai angkutan barang, orang dan berbagai kepentingan lainnya masih tergantung pada moda transportasi laut.

Dari sudut kepentingan Internasional Indonesia telah menyediakan tiga ALKI, yaitu barat, tengah dan timur dengan kecabangannya. Keberadaan tiga ALKI saja telah membedah Indonesia menjadi empat kompartemen strategis, bahkan tersembunyi tuntutan beberapa pihak dalam hal ini negara besar di dunia yang menginginkan Indonesia menetapkan ALKI timur-barat. Keberadaan unik NKRI pada posisi silang dunia telah menyebabkan kewajiban mengakomodasi kepentingan pihak lain yang akan melintasi wilayah yuridiksi laut Indonesia. Kewajiban tersebut tentu akan berpotongan bahkan tumpang tindih dengan *life lines* lokal. Situasi ini jelas memperlihatkan arti pentingnya keamanan pelayaran, keselamatan navigasi dan kelestarian lingkungan perairan dari polusi kapal yang harus diemban oleh Indonesia. Dalam kenyataannya Indonesia tidak hanya mengamankan pelayaran dan menjaga keselamatan navigasi Indonesia sendiri, tetapi juga untuk kepentingan pihak lain, apalagi pihak lain yang menggunakan wilayah yuridiksi laut Indonesia menginginkan tindakan pengamanan dalam standar internasional yang mengacu pada berbagai konvensi Internasional. Jika pengamanan tersebut kurang ataupun berlebihan maka pihak lain tersebut bisa mengajukan protes dan menawarkan pengamanan Internasional terhadap wilayah yuridiksi laut Indonesia.

Adanya ALKI untuk pelayaran pihak lain tersebut perlu untuk dicermati, karena kehadiran pihak lain tersebut di wilayah perairan Indonesia berlangsung sepanjang tahun dapat dimanfaatkan untuk mencari berbagai data tentang wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan alat penginderaan berteknologi tinggi bahkan memungkinkan untuk mencuri bahkan merusak wilayah perairan Indonesia dalam usaha menginternasionalisasi wilayah perairan Indonesia. Hal tersebut terlihat dari gencarnya beberapa inisiatif yang ingin dikembangkan diantaranya, *Regional Maritime Security Initiatives (RMSI)*, *Proliferation Security Initiatives (PSI)*, dan *Maritime Security Operations (MSO)*. Tujuan *initiative* tersebut mempunyai tujuan mulia untuk mengamankan kawasan maritim dari berbagai ancaman. Akan tetapi, hal tersebut mempunyai pedang bermata dua yang perlu dicermati, karena kemungkinan adanya upaya internasionalisasi wilayah perairan Indonesia dalam rangka mengamankan *choke points*, pengarah bantuan kemanusiaan terhadap daerah-daerah bermasalah di Indonesia, bahkan provokasi untuk mendatangkan pasukan perdamaian di daerah konflik di Indonesia. Semua bentuk operasi tersebut pada akhirnya akan memberikan akses kepada kekuatan luar untuk masuk secara legal dalam wilayah yuridiksi Indonesia atau dengan kata lain secara tidak langsung telah memasuki wilayah kedaulatan NKRI.

Dengan wilayah tanggung jawab (*area of responsibility*) yang meliputi dua pertiga perairan kawasan Asia Tenggara, merupakan suatu tantangan tersendiri bagi armada angkatan laut RI untuk melaksanakan tugas pokoknya. Di kawasan Asia Tenggara, tidak ada armada angkatan laut yang mempunyai wilayah tanggung jawab yang begitu luas, kecuali armada angkatan laut RI. Asia Tenggara sebagai lingkungan terdekat Indonesia mempunyai peran signifikan dalam menjaga keamanan perairan Indonesia. Selain itu, negara-negara di Asia Tenggara dan juga Australia masih mempunyai beberapa permasalahan dengan Indonesia dalam hal klaim teritorial perairan dan batas wilayah nasional, adanya kepentingan nasional dalam hal keamanan, dan adanya ketidakseimbangan Alutsista kompleks di antara negara Asia Tenggara dan Australia dengan Indonesia. Namun di sisi lain, kemampuan Indonesia untuk menggelar kehadiran kapal perang di laut (*naval presence*) terkendala dengan dukungan Alutsista yang tersedia, padahal sebuah adagium klasik mengatakan *ci vis pacem para bellum*

yang berarti jika ingin damai, bersiaplah untuk perang. Apalagi, *International Boundaries Research Unit* (IBRU) di Universitas Durham mengidentifikasi bahwa dewasa ini masih terdapat ratusan perbatasan maritim internasional yang belum disepakati negara-negara yang berbatasan. Walaupun banyak diantara pertentangan tersebut hanya berlangsung pada tataran diplomasi, tidak tertutup kemungkinan hal itu memburuk dan terekskalasi menjadi konflik bersenjata. Masalah perbatasan antar negara merupakan ancaman yang konstant bagi perdamaian dan keamanan internasional, karena menyangkut kedaulatan yang sifatnya seringkali tidak dapat dinegosiasikan (*non-negotiable*), konflik teritorial ini tergolong pertentangan yang sulit dipecahkan.

Semua negara maritim tentunya harus memiliki kekuatan laut yang mampu melindungi kepentingan nasionalnya di laut. Pembentukan kekuatan angkatan laut suatu negara pastinya untuk dapat diberdayakan untuk melindungi, mengendalikan, bahkan menguasai kepentingan nasional di laut. Untuk dapat membentuk kekuatan laut berbagai tokoh yang mengemukakan teori tentang kekuatan laut baik Mahan maupun Geoffrey Till menyatakan bahwa kekuatan laut berasal dari kombinasi berbagai elemen baik keadaan geografi, fisik wilayah, sumber daya, dan sifat rakyatnya. Dari semua syarat untuk mewujudkan kekuatan laut tersebut, sebenarnya Indonesia telah memenuhi syarat untuk mewujudkannya, akan tetapi kekuatan laut tersebut akan sangat sulit terwujud, karena posisi kunci dari pembentukan tersebut adalah adanya *political will* dalam hal ini dukungan optimal dari pihak eksekutif dan legislatif dalam membangun kekuatan laut. Untuk saat ini *political will* dari eksekutif dan legislatif Indonesia masih sangat rendah dalam hal pembangunan kekuatan laut Indonesia dimana tercermin dari minimnya anggaran untuk pemenuhan Alutsista TNI AL, padahal TNI AL harus mengamankan wilayah kedaulatan perairan Indonesia yang luasnya dua pertiga lebih luas dari daratan serta harus mengamankan wilayah ALKI dengan standar Internasional.

Minimnya dukungan anggaran terhadap TNI AL tersebut menyebabkan Indonesia memiliki kekuatan laut dengan kadar kemampuan yang tidak memadai dengan kata lain lemah untuk menjaga kedaulatan dan keamanan kepentingan

nasional di laut. Menurut Till parameteranya mengarah pada tiga elemen operasional yaitu, *Bases*, *Merchant Shipping (armada niaga)*, dan *Fighting Instrumen*. Pengertian *bases* di sini bukan hanya menyangkut pangkalan dan pelabuhan, tetapi menyangkut semua sarana dan prasarana pendukung, seperti industri maritim, pendidikan, kesehatan, dan jasa pelayanan lainnya yang mendukung kinerja *Fighting Instruments* dan *Merchant Shipping*. Mengenai gambaran saat ini dapat dilihat dari bagaimana kondisi nyata galangan kapal, depot logistik, bengkel, balai latihan, dan pendidikan yang mengawatirkan, seperti terjadi kepada Industri Strategis PT. PAL yang seharusnya dapat diberdayakan untuk mendukung pemenuhan Alutsista TNI AL, tetapi pada kenyatannya terus menerus mengalami kerugian hingga Rp.443 miliar, karena PT PAL diminta mencari uang sendiri oleh pemerintah tanpa diberikan *order*, karena pemenuhan Alutsista TNI AL lebih banyak didatangkan dari luar negeri bahkan pemerintah membiarkan PT PAL menghadapi situasi *free fight competition*.

Sama halnya dengan *Merchant Shipping* juga sangat mengawatirkan. Pemerintah sebenarnya telah memberlakukan Inpres No.5/1998 untuk menerapkan azas *Cabotage* secara konsekuen mulai tahun 2010 dengan tujuan memberdayakan industri pelayaran nasional. Dengan azas tersebut angkutan laut yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia wajib menggunakan kapal berbendera merah putih khususnya bagi kapal pengangkut batubara dan pengangkut bahan bakar minyak (BBM). Akan tetapi, pemerintah tidak melengkapinya dengan kebijakan terintegrasi, sehingga menyebabkan operator kapal memilih membeli kapal bekas, karena pemerintah tidak melarang impor kapal bekas. Akibatnya kapal-kapal berbendera asing mendominasi di wilayah perairan Indonesia. Hal ini menyebabkan perusahaan pelayaran nasional gulung tikar. Begitu pula dengan armada perikanan tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan Indonesia menjadi negara pengimpor ikan. Disisi lain praktik penangkapan ikan ilegal tetap saja berlangsung yang mengakibatkan ekonomi Indonesia mengalami kerugian serius mencapai Rp. 30 triliun per tahun.

Sedangkan, mengenai *Fighting Instruments* juga sangat mengawatirkan. Saat ini, kondisi Alutsista yang dimiliki TNI angkatan laut sebagian besar telah

berusia tua sehingga mengakibatkan biaya pemeliharaan tidak sepadan lagi dengan nilai gunanya. Dari jumlah Alutsista yang dimiliki saat ini, 41 % berusia 25-50 tahun dan 5 % berusia di atas 50 tahun. Begitu juga dengan kondisi teknisnya yang rata-rata kesiapan laik laut hanya 70% saja, belum lagi adanya ketidaksiapan untuk alat deteksi dan persenjataannya. Sesuai dengan persyaratan, usia 30 tahun adalah batas usia bagi kapal untuk laik laut, khususnya untuk kapal perang pada usia tersebut menyebabkan kemampuan bertempur kapal perang tersebut menjadi menurun. Ketidaksiapan dan kondisi Alutsista yang semakin tua tentu tidak sebanding dengan peran dan tugas TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan mengamankan perairan NKRI, apalagi saat ini pemerintah dengan nalar politiknya hanya menyiapkan kebijakan menuju kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force/MEF*). Kebijakan tersebut bukanlah suatu opsi ideal dari kebutuhan Alutsista TNI AL, melainkan hanya merupakan permainan kata-kata untuk menutupi kondisi sebenarnya dari kekuatan TNI AL yang dari parameter diatas memperlihatkan kelemahannya. Pembangunan MEF tersebut tidak akan mampu untuk menjaga kedaulatan dan mengamankan seluruh wilayah yuridiksi perairan NKRI, apalagi jika terjadi pendudukan strategis dari armada perang yang ingin menyerang wilayah NKRI melalui laut, maka kekuatan MEF tidak dapat dijalankan, karena teori perang laut dilakukan secara *ofensif* dengan Alutsista maksimum. Pencapaian MEF hanya mampu bertahan dari ancaman militer yang berasal dari satu arah ancaman, tetapi jika terjadi ancaman militer dari segala arah secara bersamaan, maka kekuatan MEF tidak berarti sama sekali, begitu juga dalam menjaga dan mengamankan wilayah pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan tidak dapat berjalan optimal sehingga kekuatan MEF tidak dapat memberikan efek penangkalan dalam menjaga kedaulatan perairan NKRI.

MEF yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Staf angkatan laut No:Perkasal/39/V/2009 tersebut juga berpotensi mengalami kegagalan melihat masih rendahnya *political will* dari DPR dan Pemerintah dalam mendukung pencapaian MEF TNI AL dalam 15 tahun kedepan dimana pemerintah harus setidaknya menyiapkan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 83 trilyun. Dengan adanya *political will* pemenuhan MEF tersebut tidaklah sulit jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan dalam APBN yang tiap tahunnya saja minimal

berkisar pada angka Rp.200 trilyun. Tidak adanya *political will* dalam pembangunan kekuatan TNI AL lewat MEF akan berimplikasi cukup besar terhadap kemampuan TNI AL kedepan baik struktur kekuatan TNI AL, penurunan tingkat kehadiran kapal perang dilaut yang mengakibatkan kerugian material maupun non material di laut, seperti penurunan kemampuan penangkalan, penurunan pembinaan personil yang menyebabkan rendahnya moril personil yang kesemuanya dapat menyebabkan kedaulatan dan keamanan perairan NKRI menjadi terancam, khususnya kesiapan TNI AL dalam menghadapi dinamika keamanan di lingkungan terdekat Asia Tenggara.

Kawasan Asia Tenggara yang dua pertiga wilayah perairannya adalah wilayah yuridiksi Indonesia seharusnya didukung dengan Alutsista TNI AL yang kuat, apalagi dalam jangka 15 tahun kedepan dapat diprediksi negara Malaysia, Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, dan Thailand akan melakukan pembangunan kekuatan angkatan lautnya dalam usaha memainkan perannya di Asia Tenggara dan juga mengantisipasi potensi ancaman dari Indonesia. Di dalam konteks perbatasan laut, Malaysia-Indonesia memiliki masalah perbatasan yang belum disepakati di empat kawasan yakni, permasalahan klaim tumpang tindih di wilayah zona ekonomi eksklusif di kawasan selat Malaka bagian utara (peta sepihak Malaysia 1979), belum ditetapkannya garis laut teritorial di kawasan bagian selat Malaka bagian selatan, belum ditetapkannya wilayah ZEE di kawasan Laut China Selatan, dan klaim Malaysia pada wilayah Ambalat di kawasan Laut Sulawesi (setelah kasus Sipadan-Ligitan). Penggunaan Suar Horsburg yang terletak pada pintu masuk selat Singapura dari arah timur sebagai titik dasar juga menjadi masalah batas laut teritorial Malaysia-Indonesia di selat Singapura antara Johor Timur (Malaysia) dan pulau Bintan (Indonesia) dimana Malaysia menetapkan batas laut teritorialnya sampai jarak 3,3 mil laut dari pulau Bintan. Begitu juga permasalahan terkait dengan Singapura selau bersinggungan dengan masalah keamanan maritim, sebagai negara pulau yang urat nadi ekonominya sangat tergantung pada keamanan selat Malaka, Singapura mempunyai kecenderungan lebih mempercayai keterlibatan kekuatan ekstra kawasan dalam penanganan keamanan maritim di selat Malaka, bahkan keinginan untuk menginternasionalisasi selat Malaka yang sebagian besarnya adalah wilayah

yuridiksi perairan NKRI. Internasionalisasi selat Malaka tersebut sangat bertentangan dengan azas kedaulatan negara, khususnya kedaulatan perairan NKRI. Keinginan Singapura tersebut berpotensi domino dalam menginternasionalisasi keamanan ALKI dan *choke points* lainnya dalam yuridiksi perairan NKRI.

Keberadaan Australia di wilayah selatan Indonesia oleh beberapa pihak juga dipandang merupakan ancaman potensial bagi Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat sejarah diplomasi dan militer sejak masa penjajahan Belanda, perang kemerdekaan Indonesia, konfrontasi dengan Malaysia hingga lepasnya Timor-Timur (sekarang Timor Leste) Australia selalu berusaha mengambil kepentingan yang merugikan Indonesia. Sikap tidak bersahabat Australia ini dikarenakan Australia selalu menganggap Indonesia merupakan ancaman bagi Australia di kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, karena untuk dapat berintegrasi dengan dunia luar Australia harus melewati wilayah kedaulatan NKRI. Untuk memainkan peran di kawasan Asia Tenggara dan mengantisipasi potensi ancaman dari utara, Australia menyiapkan pembangunan kekuatan angkatan lautnya yang tergambar dalam *Defending Australia In The Asia Pasific Century: Force 2030* salah satunya pengadaan 12 kapal selam hingga tahun 2030. Pembangunan angkatan laut Australia tersebut tentunya di proyeksikan dalam mendukung pengaruh dan intraksi dengan dunia luar, khususnya kepentingan terhadap jalur maritimnya khususnya di wilayah timur Indonesia. Seperti diketahui Indonesia memiliki dua *Choke Points* yaitu, Selat Lombok dan Selat Wetar yang merupakan jalur terdekat dengan Australia. Untuk memainkan perannya di wilayah tersebut tentunya Australia akan berusaha optimal untuk melaksanakan pengendalian laut dan proyeksi kekuatan angkatan laut di wilayah-wilayah jalur terdekatnya dengan alasan menjaga kepentingan nasional Australia serta mengamankan stabilitas kawasan yang seharusnya menjadi tugas pokok dari TNI AL sebagai operator dalam memberikan batas *imajiner* di perairan NKRI.

Pembangunan angkatan laut juga dilakukan oleh Singapura. Saat ini Angkatan Bersenjata Singapura statusnya hampir mencapai *Third Generation Force* dengan mempertahankan keunggulan kualitatif kekuatan pertahanannya

dibanding negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, pembangunan pertahanan angkatan lautnya sangat didukung oleh Industri pertahanan dalam negerinya. Dengan kekuatan pertahanannya secara teoritis Singapura mempunyai daya tawar yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Apalagi Singapura memadukan pendekatan pertahanan dan diplomasi dalam rangka mengamankan kepentingan nasionalnya. Hal tersebut terlihat dari peran Singapura walaupun hanya memiliki wilayah perairan sekitar 16 mil sedangkan luas perairan Malaka sekitar 600 mil, tetapi Singapura dengan *bargaining power* didukung kekuatan angkatan lautnya dapat mewujudkan *Regional Cooperation Agreement Anti Piracy* (ReCAP) dengan kendali markas berada di Singapura. Selain itu, dengan postur pertahanan Singapura saat ini, Singapura mampu melaksanakan proyeksi kekuatannya ke kawasan Asia tenggara, termasuk Indonesia. Potensi tersebut perlu dicermati oleh Indonesia, karena dapat memungkinkan terjadinya konflik terbuka apabila Indonesia dipandang telah mengancam kepentingan nasionalnya seperti keamanan di kepulauan Riau yang menjadi pintu keluar masuk Singapura lewat laut dan udara, kelancaran pasokan air dan gas alam, hingga keamanan maritim di selat Malaka.

Seperti hal Singapura, Malaysia juga melakukan pembangunan kekuatan angkatan lautnya. Dalam Rencana Malaysia (*Malaysia Plan*) akan melakukan pengadaan enam kapal korvet kelas Meko A-100 dari Jerman, dua kapal selam kelas *Scorpene* dan satu kapal selam bekas Agosta A-70 dari Prancis senilai US\$ 972 juta. Selain pengadaan kapal perang, Malaysia juga membangun sejumlah pangkalan baru TLDM, seperti di Lumut dan Sabah. Untuk memperkuat pertahanan maritim di sekitar laut Sulu, Laut Sulawesi dan Laut China Selatan, Malaysia mengembangkan pangkalan angkatan laut di teluk Sepanggar, Sabah. Kekuatan laut Malaysia juga tengah mengakuisisi enam Korvet Meko A-100 yang dalam susunan tempur TLDM dinamakan *Next Generation Patrol Vessel* (NGPV) kelas Kedah. Untuk melengkapi kemampuan anti kapal selam, TLDM dalam beberapa tahun kedepan akan mengakuisisi enam heli anti kapal selam. TLDM juga merencanakan akan menambah dua lagi kapal Fregat kelas Jebat melalui kerja sama antara BAE System dengan *Labuan Shipbuilding and Engineering* (LSE). Program pembangunan kekuatan TLDM tidak luput menyentuh pula isu

revolution in military affairs (RMA). Pembangunan kekuatan laut juga ditunjang pula oleh pembangunan kekuatan udara Malaysia melalui pengadaan pesawat tempur jenis F/A-18 Hornet, Su-27 SKM dan Su-30 MKM, dimana merupakan pesawat yang dapat dioperasikan dalam jarak jauh, seperti SU-27/Su-30 yang radius operasional sekitar 3.500 Km (satu sorti). Peningkatan kekuatan laut Malaysia inilah yang menyebabkan Malaysia mulai berani melakukan pelanggaran dan bermanuver militer diwilayah perairan NKRI. Pembangunan kekuatan angkatan laut tidak hanya dilakukan oleh Malaysia, Singapura, dan Australia, tetapi juga telah dilakukan negara lain di Asia Tenggara.

Mengacu pada ancaman kedaulatan dan keamanan perairan NKRI serta pembangunan kekuatan angkatan laut di negara-negara sekitar lingkungan terdekat Indonesia saat ini, secara ideal kebijakan pertahanan Indonesia harus merespon secara proporsional berbagai kecenderungan kebijakan pertahanan negara lingkungan terdekat di kawasan Asia Tenggara, apalagi dari parameter Till negara-negara tersebut melampaui kekuatan angkatan laut Indonesia. Untuk itu, pemangku kebijakan pertahanan Indonesia, khususnya dalam pertahanan wilayah perairan NKRI harus bersikap dengan menggunakan semua potensi kekuatan nasional yang tersedia sehingga dapat menangkal dan menolak (*to deter and deny*) proyeksi ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan perairan NKRI baik dalam masa damai maupun jika terjadi konflik terbuka dengan negara-negara lingkungan terdekat.

Melihat masih adanya masalah wilayah perbatasan perairan antara Indonesia dengan negara tetangga yang diikuti dengan pembangunan kekuatan angkatan laut negara-negara tersebut, maka kekuatan diplomasi tidak akan efektif tanpa didukung *bargaining power* yang kuat. *Bargaining power* tidak mungkin kuat bila efek penangkal pertahanan, khususnya angkatan laut lemah. Efek penangkal akan tetap lemah selama tidak ada kenaikan signifikan dalam pembangunan pertahanan, khususnya kemampuan Alutsista dalam hal ini Alutsista TNI AL. Oleh karena itu, untuk memperkuat upaya diplomasi yang biasanya dijalankan Indonesia dalam menangani berbagai permasalahan, khususnya

terkait perbatasan perairan Indonesia, salah satu jalan yang harus ditempuh adalah dengan memperkuat kemampuan Alutsista TNI AL.

Merujuk pada penelitian Connie Rahakundini Bakrie dalam Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal dikatakan bahwa Alutsista TNI AL yang ideal berdasarkan perimbangan kekuatan militer di Asia Pasifik dan Asia Tenggara didasarkan pada persenjataan dasar yang harus dimiliki yaitu, kapal selam, kapal perang, kapal patroli, dan kapal pendukung. Untuk kapal selam TNI AL idealnya dilengkapi dengan 10 unit kapal selam kategori taktikal dengan tipe minimal SSN (*Attack Submarine Nuclear Powered*) dan 4 kapal selam berkategori strategis yang dilengkapi dengan SLBM (*Submarine Launch Ballistic Missile*) dimana perhitungannya didasarkan pada pembagian wilayah pertahanan ideal yang dibaginya menjadi empat wilayah pertahanan (Kowilhan), untuk kapal perang dibutuhkan kapal tipe *Destroyer* dan *Cruiser* masing-masing sebanyak 14 unit, *Aircraft Carrier* (CV) yang bisa menampung 50 pesawat, satu *Helipad*, dan RAM (*Rolling Airframe Missile*) SAM sebanyak 9 unit, *Aircraft Carrier Nuclear Powered* (CVN) sebanyak 4 unit, *Helicopter Carrier* dengan kapasitas 50 helikopter dan RAM SAM sebanyak 1 unit, dan 98 unit *Corvett* (1.000 ton) dengan kemampuan serang yang dilengkapi dengan SAM, Torpedo, maupun senjata dengan kaliber 57 mm. Untuk kapal pendukung dibutuhkan 28 unit LHD, 10 unit *Landing Craft Assault* (LCA) dan 3 unit *Armoured Combat Vehicle* (ACV) yang dilengkapi dengan RAM SAM. Dengan dibutuhkan 28 LCA per-LHD, maka kebutuhan LCA sebanyak 280 unit dengan kapasitas 100 prajurit atau 2 unit MBT per-LCA, 10 unit jenis AORH kapal tengker, dan 10 unit *Repair Ship*. Untuk pasukan khusus TNI AL dibutuhkan sebanyak 63.000 personil marinir, dan 840 unit MBT. Sedangkan, untuk *Naval Aviation* dibutuhkan pesawat jenis FTR sebanyak 210 unit dan jenis FGA sebanyak 420 unit, helikopter SAR sebanyak 28 unit, pesawat intai sebanyak 28 unit, 14 unit pesawat *Support*, 27 unit pesawat patroli, 15 unit pesawat transport, 30 unit pesawat training, 310 *Attack Helicopter*, 290 *Anti Submarine Helicopter*, 28 unit *Helicopter SAR*, 3 *Support* heli, dan 22 unit *Utility* heli.

Dari segi kuantitas dan kualitas dengan standar perimbangan kekuatan hasil pemikiran dari Connie Rahakundini Bakrie dalam menggambarkan kebutuhan ideal Alutsista TNI AL adalah suatu yang realistis jika melihat kondisi perairan Indonesia yang sangat luas. Terpenuhinya Alutsista TNI AL secara ideal tersebut tentunya akan membuat angkatan laut menjadi kuat dan berwibawa dalam memberikan efek penangkalan tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga dikawasan Asia Pasifik. Walaupun, dalam pemikirannya pemenuhan Alutsista tersebut untuk jangka panjang akan tetapi, dengan rendahnya *political will* dari DPR dan Pemerintah dalam memberikan anggaran pertahanan maka pembangunan angkatan laut dengan pemenuhan Alutsistanya secara ideal seperti pemikiran Connie merupakan proyek ambisius bahkan dapat dikatakan sebuah utopia; karena pemenuhan Alutista berbanding lurus dengan penambahan anggaran, padahal untuk menuju kebutuhan ideal tersebut tentu dibutuhkan anggaran yang sangat besar.

Akan tetapi, penambahan dan pergantian Alutsista TNI AL tetap harus segera dilakukan melihat potensi ancaman kedaulatan dan keamanan kedepan di wilayah perairan NKRI tidak dapat secara nyata diprediksi. Pembangunan Alutsista TNI AL dengan penambahan dan pergantian Alutsista tersebut diharapkan akan meningkatkan pertahanan nasional, dimana menurut Andi Widjayanto pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Serta, selaras dengan Joko Kusnanto Anggoro yang mendefinisikan sistem pertahanan adalah sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara untuk menghadapi ancaman kekerasan dengan menggunakan kemampuan (kekuatan, keahlian, gelar) militer.

Walaupun pemerintah menerapkan kebijakan *zero enemy* dalam memandang ancaman militer dari negara lain, akan tetapi penambahan dan pergantian Alutsista TNI AL tidak akan percuma, karena pembangunan kekuatan bersenjata tidak dapat dilakukan secara singkat dimana hasilnya baru akan dinikmati di masa yang akan datang. Jadi, pembangunan kekuatan angkatan laut adalah investasi amat besar yang ditanam dalam fungsi pertahanan nasional. Untuk itu, selain kebijakan pemenuhan Alutsista TNI AL melalui MEF pemerintah juga harus membuat kebijakan alternatif dalam pembangunan kekuatan TNI AL kedepan dengan mempertimbangkan strategi mengedepankan kepentingan kebutuhan TNI AL yang diselaraskan dengan ciri khas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia tetap berpotensi untuk mewujudkan strategi *Green Water Navy* dan strategi *Blue Water Navy* jika kepentingan nasional mengharuskan untuk mewujudkannya, akan tetapi melihat tingkat efisiensi, efektivitas, dan *fiscal reality* maka keharusan mengoptimalkan pemanfaatan kondisi geografis dengan mengeksplorasi nilai-nilai strategik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dapat dilakukan TNI AL sebagai strategi dalam menjaga dan mengamankan kedaulatan wilayah perairan NKRI.

Untuk Alutsistanya tetap dikembangkan strategi khas Indonesia dengan pola strategi Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) dengan komponen yang terdiri dari Kapal, Marinir, Pesawat Udara, dan pangkalan dengan fasilitas labuh, pemeliharaan dan perbaikan kapal, serta perbekalan dan perawatan personel yang tentunya disesuaikan dengan kondisi khas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Strategi alternatif MEF tersebut saya terminologikan sebagai strategi *Archipelagic Essential Force* (AEF) dengan pengadaan dan pergantian Alutsista TNI AL berbasiskan pertimbangan keuntungan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan mempertimbangkan kondisi teknologi sistem senjata, *combat management system*, dan peralatan elektronik Alutsista untuk proyeksi 15 tahun kedepan. Pengadaan dan pergantian Alutsista berdasarkan kebijakan MEF tetap dilaksanakan, akan tetapi untuk Alutsista TNI AL terbaru seperti korvet kelas Diponegoro sejak dini harus dipikirkan kapan saat yang tepat dilakukan peremajaan dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi,

karena dalam 15 tahun kedepan akan ketinggalan teknologinya setidaknya satu dekade.

Keadaan geografis perairan Indonesia yang tidak homogen, tetapi cenderung heterogen, karena karakteristik perairan Indonesia dengan laut terbuka yang berhubungan langsung dengan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, laut setengah tertutup, dan laut tertutup yang meliputi semua perairan kepulauan Indonesia. Dengan kondisi tersebut dengan melihat efisiensi, efektivitas dan *fiscal reality* maka terminologi *Archipelagic Essential Force* dalam jangka pendek cocok menggunakan pendekatan Corbett dalam pengendalian laut yang tidak hanya memerlukan kapal besar tetapi juga kapal kecil yang lincah untuk fleksibilitas yaitu, lebih mengedepankan pengadaan Alutsista dengan kemampuan *asymetric warfare* seperti, kapal selam Sango kelas *Midged* (mini/300 ton) dan kapal selam Yeono kelas *Midged* (130 ton) milik Korea Utara atau kapal selam mini kelas Nahang yang dilengkapi rudal dan torpedo milik Iran dapat dijadikan alternatif dalam memperkuat Alutsista TNI AL, pengadaan kapal selam mini lain dengan RND yang baik dengan kategori strategik dari Eropa, pengembangan pasukan khusus dengan kapal cepat tipe siluman yang harganya sekitar US\$ 50 juta untuk *maritime combat* yang ditempatkan dipulau-pulau dan perairan tertentu seperti di Sabang, Tarakan, Toli-Toli, Biak, Perairan Natuna, dan Laut Timor bagian selatan dapat digunakan untuk penyusupan, penempatan ranjau, penghancuran lawan didaerahnya sendiri, dan penghancuran kapal-kapal perang lawan di daerah lego jangkarnya, di daerah *choke point* dan litoral juga dapat dijadikan alternatif dalam mendukung kekuatan Alutsista TNI AL. Dengan pertimbangan geografis juga perlu dibangun pangkalan-pangkalan setingkat Lantamal di pulau-pulau yang lebih mengarah ke Zona Tambahan, ZEE, dan Landas Kontinen wilayah yuridiksi perairan NKRI. Pembangunan pangkalan di banyak pulau di Indonesia akan menyebabkan ekor logistik menjadi lebih pendek. Untuk kekuatan udara AL perlu pengadaan pesawat patroli maritim dan pesawat amfibi dengan kemampuan *Multi Mission Aircraft* (MMA) dengan kemampuan utama untuk peperangan anti kapal selam dan anti kapal permukaan, serta pengadaan pesawat nirawak sekelas Orion yang akan digunakan untuk

pengintaian, pengawasan, dan intelijen yang hanya seharga 10 juta US\$ yang lebih murah dari pada MQ-9 *Reaper* senilai US\$ 53,5 juta untuk empat pesawat.

Pembangunan Alutsista dengan strategi *Archipelagic Essential Force* dalam jangka panjang harus diarahkan kepada kepentingan nasional di laut untuk menjaga dan mengamankan seluruh wilayah yuridiksi perairan NKRI sehingga mampu mewujudkan kombinasi Strategi Corbett dan Mahan yaitu, *sea denial, sea assertion, power projection, dan command of the sea* serta memiliki tiga kemampuan utama, yaitu daya penggetar, daya perusak yang cukup menggigit, dan mampu melakukan perang berkepanjangan jika terjadi konflik terbuka dengan negara lingkungan terdekat maupun dari ancaman militer dari negara lain selain negara lingkungan terdekat. Selain itu, untuk masa damai pengadaan dan modifikasi kapal patroli juga perlu dilakukan, karena dengan keterbatasan kapal patrolinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih sangat tergantung dari kapal patroli TNI AL dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia yang merugikan ekonomi Indonesia yang mencapai Rp. 30 triliun pertahun. (wawancara Johannes Pangihutan, Ka.TU. Direktorat Penanganan Pelanggaran, KKP, 23 November 2010).

Pengadaan dan pergantian Alutsista TNI AL dari luar negeri juga mutlak melibatkan kerja sama dengan Industri strategis dalam negeri seperti, PT. Pindad, PT. Dirgantara, PT. LEN, dan PT. PAL, karena pelibatan Industri Nasional melalui transfer teknologi akan sangat berarti untuk memajukan industri strategis tersebut. Selain itu, pelibatnya akan dapat mempercepat kemandirian industri pertahanan dalam memenuhi Alutsista TNI AL. Kemandirian Industri pertahanan diperlukan untuk menghilangkan ketergantungan teknologi dari luar negeri, karena teknologi dari luar negeri bisa saja menjadi bumerang seperti sabotase jika terjadi konflik terbuka dengan negara yang memproduksi Alutsista tersebut.

4.2 PEMBERDAYAAN INTELIJEN UNTUK KEBUTUHAN INTELIJEN MARITIM

Untuk menjadikan suatu negara terhindar dari pendudukan strategis baik dari dalam dan luar negeri yang dapat menyebabkan ancaman yang serius dalam kedaulatan suatu negara, khususnya wilayah perairan Indonesia yang sangat luas maka peranan intelijen memegang peranan penting dalam usaha memberikan *early warning, forecasting* dan *problem solving* bagi pembuat kebijakan negara. Untuk dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan tersebut berbagai proses intelijen yang sesuai dengan fungsinya baik dalam mengumpulkan informasi baik secara terbuka maupun tertutup hingga menghasilkan produk intelijen yang dibutuhkan pembuat kebijakan seharusnya dilakukan dengan kombinasi yang ideal antara *human intelligence (humint)* dan *technical intelligence (techint)*. Hal ini harus dilakukan untuk menjawab berbagai permasalahan yang semakin beragam terkait dengan upaya mempertahankan eksistensi negara.

Melihat perkembangan masalah keamanan yang semakin beragam dan berpotensi menjadi ancaman bagi masyarakat maka intelijen sebagai pilar utama dalam menjamin keamanan nasional dituntut untuk mengimplementasikan peran tersebut seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Seperti tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945 tersebut negara dalam hal ini intelijen mempunyai dua kewajiban yaitu menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat dan masyarakat.

Melihat tidak terlepasnya suatu negara dari suatu permasalahan keamanan maka seharusnya sudah sepantasnya menjadi perhatian dari pemerintah untuk dapat memetakan berbagai dimensi dari keamanan nasional, khususnya keamanan perairan Indonesia yang berhubungan erat dengan kedaulatan negara. Karena keamanan nasional pasti akan berhubungan terhadap terhadap keamanan rakyat

dan masyarakat. Walaupun konsep keamanan nasional masih menjadi konsep yang sangat lentur akan tetapi pemerintah harus memprioritaskan permasalahan keamanan nasional dalam hal ini kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia sehingga kedaulatan wilayah perairan dapat terjamin karena sebagai negara kepulauan wilayah perairan Indonesia berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat dan rakyat.

Terkait dengan keamanan perairan Indonesia tidak bisa terlepas dari peran TNI angkatan laut sebagai aktor utama dalam mengamankan kedaulatan perairan NKRI. Terbatasnya anggaran menyebabkan lemahnya kekuatan angkatan laut dalam menangkal berbagai potensi ancaman di wilayah perairan NKRI. Apalagi hal tersebut dihadapkan dengan luasnya wilayah perairan NKRI. Sejalan dengan pandangan Mahan yang menyebabkan wilayah laut telah menjadi jalan raya dalam melakukan aktivitas perdagangan antar negara. Apalagi, Indonesia harus memberikan wilayah airnya sebagai jalur lalu lintas laut internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia, ALKI). Dalam perspektif pertahanan murni, ALKI membuat Indonesia terbagi dalam empat kompartemen strategis. Ini tentu tidak akan mudah diatasi oleh Indonesia. Adanya aktivitas lalu lintas laut tersebut seharusnya diimbangi dengan kekuatan pengamanan wilayah laut yang tangguh agar berbagai ancaman potensial terhadap kedaulatan dan keamanan wilayah perairan NKRI diminimalkan bahkan dicegah lebih dini.

Dilihat dari faktor geografis dan sebagai salah satu negara kepulauan, Indonesia telah memenuhi berbagai syarat pendukung yang harus dipenuhi untuk memiliki kekuatan laut yang tangguh sesuai dengan teori Mahan dan Geoffrey Till diantaranya, posisi geografis, keadaan fisik wilayah, luas wilayah, jumlah penduduk, sifat rakyat, sumber daya dan sifat pemerintahan. Dengan mengedepankan teori Mahan dan Till tersebut walaupun anggaran Alutsista TNI AL sangat terbatas, maka dapat dikembangkan dan diberdayakan potensi lainnya dalam upaya mengamankan kedaulatan perairan NKRI salah satunya pemberdayaan Intelijen maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan harus segera memberdayakan intelijen maritim sebagai unsur pendukung bagi Alutsista TNI AL, karena jika dipandang dari unsur-unsur kekuatan angkatan laut teori Till, baik

merchant shipping, bases dan terutama *fighting instrumentnya* keadaan Alutsista TNI AL semakin kritis baik dari segi *sensing system, mobility, fire power* dan C4ISR (*Command, Control, Communication, Computer, Surveillance and Reconnaissance*)nya. Kondisi ini sangat membahayakan karena tidak mampu untuk memberikan pengamanan optimal terhadap seluruh wilayah yuridiksi perairan NKRI, memberikan dampak penangkalan, apalagi jika terjadi konflik terbuka yang mengharuskan untuk melakukan pertahanan berlapis apalagi untuk menghadapi perang berlarut.

Pemberdayaan intelijen maritim akan melibatkan semua komponen operasional intelijen, baik melalui *human intelligence, elektronik intelligence, imagery intelligence*, dan *open sources intelligence human* yang bergantung pada sumber daya manusia, arah teknologi, dan doktrin yang tepat. Keterbatasan anggaran tentu membatasi pengembangan teknologi, akan tetapi bukan berarti sumber daya manusia dan doktrin tidak dapat dikembangkan dengan mengedepankan pendekatan efisiensi dan efektifitas, dan berpegang teguh pada kepentingan nasional dengan perumusan yang jelas. Dalam intelijen yang terpenting adalah manusia, karena belum bisa digantikan oleh sistem apapun dimana manusia memiliki kemampuan dan kelebihan yaitu, berakal (*Inventive*), dapat berhubungan (*Communicative*), cerdik (*Manipulative*), memiliki daya imajinasi (*Imagination*), tangkas (*Dexterous*), abadi (*Self Perpetuating*), mandiri (*Need no Operator*), memiliki kemampuan daya nalar (*Common Sense*), cerdas (*Intelligence*), kemampuan melihat kedepan (*Foresee Problems*), dan kemampuan memecahkan masalah (*Solve Problems*) (Aa Kustia, *Intelijen : Dilema dan Tantangan*, Jakarta: CSICI, 2007).

Kemampuan SDM melalui intelijen dapat diarahkan untuk mencari niat, kemampuan, dan keadaan negara-negara lingkungan terdekat dalam usaha mengetahui potensi ancaman yang akan dihadapi. Dengan kemampuan metode dan teknik *human intelligence* dapat diketahui informasi mengenai niat secara akurat dan aktual tentang strategi yang sudah dirancang pihak lawan, niat para pemangku kebijakan, kebijakan tentang perumusan kekuatan, siapa pengendali operasi, satuan operasional angkatan laut mana yang akan pertama digerakkan

apabila terjadi konflik terbuka, dan Alutsista angkatan laut apa yang akan pertama kali digunakan. Pada sisi lain intelijen dapat digunakan untuk pengelabuan, propaganda, dan perang urat syaraf dalam memberikan informasi yang keliru kepada pihak lawan.

Pemberdayaan intelijen maritim tidak terlepas dari pemahaman intelijen itu sendiri sebagai pengetahuan, kegiatan untuk mencari informasi yang diinginkan, dan intelijen tersebut sebagai organisasi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi. Sebagai pengetahuan, intelijen maritim berkewajiban untuk menjawab unsur-unsur utama keterangan (*essential element of information*) dari pengguna. Indonesia dengan dua pertiganya adalah wilayah perairan maka domain intelijen maritim diarahkan secara fokus dan terarah untuk menjawab serta mengeksploitasi ancaman nasional terkait perairan Indonesia seperti, adakah potensi ancaman angkatan laut negara-negara lingkungan terdekat dilihat dari pembangunan kekuatan angkatan laut mereka, adakah potensi ancaman maritim terhadap jalur ALKI, bagaimanakah potensi ancaman maritim terhadap daerah-daerah kaya sumber daya di laut Natuna dan blok Ambalat, apakah ada potensi ancaman maritim terhadap distribusi bahan pokok dan distribusi BBM di perairan Indonesia, apakah Indonesia masih mampu mengendalikan (*sea control*) terhadap wilayah yuridiksi perairannya, dan adakah potensi konflik komunal di daerah perbatasan perairan Indonesia.

Setelah diketahui unsur-unsur utama keterangan maka dibutuhkan informasi tentang angkatan laut negara-negara lingkungan terdekat diantaranya data-data dasar yang meliputi, jumlah dan kemampuan satuan-satuan, jumlah dan kondisi peralatan dan perlengkapan teknis, karakteristik kapal-kapal, pesawat terbang, roket-roket pantai, dan alteleri pantai, kapal-kapal bantu dan kapal-kapal khusus, metode penggunaan taktis dari kapal-kapal dan pesawat terbang beserta perseniataanya, serta peralatan taktis komunikasi dan pengamatan. Data-data dinamik yang meliputi, struktur organisasi dan kegiatan kesatuan-kesatuan angkatan laut, kesatuan-kesatuan kelompok utama tentang penempatan dan kedudukannya, isi dan tujuan dari latihan operasional dan taktik, metode penggunaan taktik dan operasional dari kesatuan-kesatuan armada, perkiraan

rencana penggunaan dari kesatuan-kesatuan, metode dukungan logistik dan kemampuannya.

Data-data perkembangan dan pangkalan meliputi, kondisi dan sistem pangkalan serta pengembangan armada, pembangunan dan perkembangan armada, bantuan logistik dari kegiatan armada, potensi nasional yang dapat dikerahkan menjadi potensi armada. Data-data daerah meliputi, organisasi mandala laut, termasuk sistem-sistem pertahanan, perhubungan, pengamatan dan navigasinya, kondisi geografi militer dari daerah-daerah operasi yang akan datang, termasuk kondisi hydro dan oceanografinya. Data-data personil meliputi, jumlah kekuatan personil angkatan lautnya, tingkat latihan, pengalaman dan kemahiran para perwira dalam setiap kedinasan, sejarah militer seluruh personil, dan kondisi moril, moral serta disiplin dari seluruh personil. Untuk data-data dinamik setelah dianalisis diharapkan menghasilkan produk intelijen aktual, oleh karenanya untuk memperolehnya harus dikerahkan usaha-usaha semaksimal mungkin agar setiap waktu dapat diketahui adanya perubahan-perubahan atau pengelabuan informasi yang dilakukan.

Untuk menjawab semua pertanyaan diatas tentu diperlukan kegiatan pengumpulan informasi dengan mengikuti kaidah perputaran roda intelijen (*intelligence cycle*) yang berawal dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penyampaian. Kegiatan pengumpulan tersebut akan dilakukan secara terbuka, tertutup, dan semi terbuka/tertutup dengan metode positif dan negative (*counter intelligence*). Dalam pengumpulan informasi intelijen terdapat beberapa teknik pengumpulan informasi, diantaranya melalui *human intelligence*, *elektronik intelligence*, *imagery intelligence*, dan *open sources intelligence*, namun landasan/platform utama yang lebih tepat bagi intelijen maritim adalah dengan penggunaan *human intelligence* dan *elektronik intelligence*. Terkait dengan *elektronik intelligence* terutama penggunaan *sensing system* dapat difungsikan dalam kapal selam mini, kapal permukaan, kapal armada pelayaran rakyat (Pelra) dan kapal nelayan. Dalam pengumpulan informasi harus dilakukan dengan seksama, karena setiap tahap dari roda perputaran intelijen mempunyai kekuatan dan kelemahan yang bersifat laten yang perlu diwaspadai. Kesalahan salah satu

tahap dalam roda perputaran intelijen tersebut akan mengakibatkan kegagalan dalam pengambilan keputusan.

Untuk menggerakkan pengetahuan dan kegiatan intelijen tersebut tentunya dibutuhkan suatu organisasi intelijen maritim yang beroperasi secara rahasia. Seperti organisasi intelijen lainnya intelijen maritim harus menjalankan prinsip gunung es dan prinsip kompartementasi untuk melindungi berbagai data maritim dan keamanan nasional. Pemberdayaan organisasi intelijen maritim dilakukan dengan menata, menghimpun, membina, dan membangun semua potensi intelijen dalam satu platform manajemen intelijen maritim, membangun tatanan analisis yang akan bertugas untuk menilai, klarifikasi, menafsir, mengevaluasi hasil-hasil dari badan pengumpul sesuai dengan sektor dan posisinya, dan membangun *data base* beserta prosedur pemanfaatannya. Dengan adanya intelijen maritim yang baik maka diharapkan dapat dihasilkan produk intelijen maritim untuk mendukung kebutuhan Alutsista TNI AL sehingga dapat memberikan *warning*, *forecasting*, dan *problem solving* dalam mengantisipasi pendudukan strategis, serta memberikan dampak penangkalan dalam menjaga dan mengamankan kedaulatan perairan NKRI.

BAB 5 PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Indonesia adalah negara dengan posisi silang strategis di dunia, karena terletak diantara dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik juga terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Benua Australia. Selain berada di posisi silang dunia, pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia juga menyebabkan wilayah kedaulatan negara Indonesia menjadi sangat luas terutama di wilayah perairan yang memiliki banyak sumber daya minyak serta sumber daya kelautan dan perikanan .

Konsekuensi perairan yang sangat luas, mengandung sumber daya minyak, kekayaan laut dan perikanan serta letaknya yang strategis tersebut dalam kenyataannya tidak disesuaikan dengan sistem pertahanan yang berorientasi maritim dimana tercermin dari lemahnya Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI AL. Lemahnya Alutsista TNI AL ini berpotensi mengancam kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena negara lain yang diakomodasi menggunakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di wilayah yuridiksi perairan Indonesia berusaha melakukan intervensi dan inisiatif dalam memainkan peran di wilayah perairan Indonesia dan dengan negara lingkungan terdekat Asia Tenggara Indonesia masih mempunyai permasalahan wilayah perbatasan perairan.

Lemahnya Alutsista TNI AL saat ini tidak sebanding dengan peran dan tugas TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan mengamankan perairan NKRI, apalagi saat ini pemerintah hanya menyiapkan kebijakan menuju kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force/MEF*). Sedangkan, negara-negara lingkungan terdekat Malaysia, Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, dan Thailand terindikasi melakukan pembangunan kekuatan angkatan lautnya dalam usaha memainkan perannya di Asia Tenggara dan juga mengantisipasi potensi

ancaman dari Indonesia. Mengacu pada ancaman kedaulatan dan keamanan perairan NKRI serta pembangunan kekuatan angkatan laut di negara-negara sekitar lingkungan terdekat Indonesia saat ini, secara ideal dengan mempertimbangkan kondisi khas geografis Indonesia, kebijakan pertahanan Indonesia harus merespon secara proporsional berbagai kecenderungan kebijakan pertahanan negara lingkungan terdekat di kawasan Asia Tenggara, sehingga dapat menangkal dan menolak (*to deter and deny*) proyeksi ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan di wilayah perairan NKRI baik dalam masa damai maupun jika terjadi konflik terbuka dengan negara-negara lingkungan terdekat.

5.2 SARAN

Melihat lemahnya Alutsista TNI AL, maka untuk dapat menangkal dan menolak (*to deter and deny*) proyeksi ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan di wilayah perairan NKRI baik dalam masa damai maupun jika terjadi konflik terbuka dengan negara-negara lingkungan terdekat, perlu strategi yang tepat diantaranya:

1. Pembuatan kebijakan alternatif selain MEF yang saya terminologikan sebagai strategi *Archipelagic Essential Force* (AEF) dengan prioritas penambahan dan pergantian Alutsista TNI AL.
2. Pemberdayaan Intelijen maritim dengan menggunakan *human intelligence* dan *elektonik intelligence* sebagai platform utama.

Kedua strategi diatas, tidak mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, sesuai dengan teori strategi maritim perlu adanya *political will* dari eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan strategi tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Andi Arsana, I Made. (2007). *Batas Maritim Antar Negara, Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Yogyakarta: UGM Press.
- Anggoro, Kusnanto. (2005). *Konsolidasi Negara, Politik Transisi, dan Fungsi Intelijen* dalam Andi Widjajanto (ed.), *Reformasi Intelijen Negara*, Jakarta: PACIVIS UI dan FEST.
- Anggoro, Kusnanto. (2005). *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum*, Jakarta: PACIVIS UI dan FEST.
- Dewan Kelautan Indonesia. (2008). *Analisa Kebijakan Tentang Pembentukan Badan Penegakan Hukum, Keamanan dan Keselamatan Laut*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan. (2008). *Refleksi 2008 dan Outlook 2009*. Jakarta: DKP.
- Dispensal. (2004). *TNI AL yang besar, kuat dan Profesional*, Jakarta: Dispensal.
- Greton, Sir P. (1965). *Maritim Strategy, A Study of British Defence Problem*, London: Cassel.
- Groshkov, Sergie. (1979). *The Sea Power of the State*, Oxford: Pergamon Press.
- Haryono. (1995). *Peperangan Laut Pada Abad XXI dan Antisipasi Bagi Armada RI*, Jakarta: Sesko AL.
- Hatmodjo, Jono. (2003). *Intelijen Sebagai Ilmu*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ihza, Yosron. (2009). *Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional*, Jakarta:
- Kirbiantoro, H.S. dan Rudianto, Dody. (2010). *Rekontruksi Pertahanan Indonesia, Potensi, Tantangan, dan Prospek*, Jakarta: Golden Terayon Press.
- Kissinger, Henry. (1994). *Diplomacy*, New York: Simon & Schuster.
- Kusumaatmadja, Muchtar. (1978). *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Binacipta.

- Kustia, AA. (2007). *Intelijen : Dilema dan Tantangan*, Jakarta: CSICI.
- La Ode, M.D. (2006) *Peran Militer Dalam Ketahanan Nasional: Studi Kasus Bidang Hankam di Indonesia tahun 1967-2000*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mahan, Alfred Thayer. (2004). *The Influence Of Sea Power Upon History 1660-1783*, Boston:
- Manullang, A.C. (2001). *Menguak Tabu Intelijen. Teror, Motif dan Regim*, Jakarta:
- May Rudy, Teuku. (1997). *Studi Kawasan: Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia*, Bandung: Bina Budhaya.
- Misbach Muhjiddin, Atje. (1993). *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Bandung: Alumni.
- Paul, T.V. (2003). *States, Security Function and the New Global Forces*, dalam T.V. Paul, G. John Ikenberry and John A. Hall (eds), *The Nation-State in Question*, Princeton: Princeton University Press.
- Pramono, Djoko. (2005). *Budaya Bahari*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Praserto, Edy. (2006). *Masalah Perbatasan, Keamanan Maritim, Dan Pembangunan Kekuatan Maritim Yang Komprehensif*, Jakarta: Universitas Indonesia dan IODAS.
- Rahakundini Bakrie, Connie. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- S. K, Wahyono. (2009). *Indonesia Negara Maritim*, Jakarta: Teraju.
- Sarjadi, Soegeng et al. (2006). *Memahami Indonesia*, Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS).
- Saronto, Y.Wahyu, dkk. (2004). *Intelijen Teori, Aplikasi, dan Modernisasi*, Jakarta: PT Ekalaya Saputra.
- Soewarso. (1981). *Tinjauan umum tentang ketahanan nasional*, Jakarta: STTAL.
- Soewarso. (1998). *Evolusi Pemikiran Masalah keangkatan lautan*, Jakarta: Sesko AL.

- Suradinata, Ermaya dan Dinuth, Alex ,Ed. (2002). *Geopolitik dan Konsep Ketahanan Nasional ; Pemikiran awal, Pengembangan, dan Prospek*, Jakarta: PT Paradigma Cipta Yatsigama, Cet. I.
- Starke, J.G. (2008). *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tangredi, Sam J. (2002). *Globalization and Maritime Power*, Ft. Mc. Nair: INSS-NDU.
- Usman, Wan. (2003). *Daya Tahan Bangsa*, Jakarta: PKN UI.
- Wibisono, Ali A. Wardoyo ,Broto, K. Kasim ,Yandry; editor: Alexandra R. Wulan. (2008). *Satu Dekade Reformasi Militer di Indonesia*, Jakarta: Pacivis & FES Indonesia Office.
- Widjajanto, Andi (ed.). (2005). *Reformasi Intelijen Negara*, Jakarta: PACIVIS UI dan FEST.
- Widjajanto, Andi, Wardhani, Artanti. (2008). *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, Jakarta: PACIVIS UI dan FEST.
- Widjajanto, Andi, Lay, Cornelis, Keliat, Makmur. (2008). *Intelijen: Velox et Exactus*, Jakarta: PACIVIS UI dan FEST.
- Wirawan, Hariyadi. (2005). *Evolusi Intelijen Indonesia* dalam Andi Widjajanto (ed.), *Reformasi Intelijen Negara*, Jakarta: PACIVIS dan FES.
- W.Kegley JR, Charles dan Eugene R.Wittkopf. (1995). *The Global Agenda Issues and Perspectives*, New York:

Jurnal :

- Cotton, James, *East Timor in 2004: It Is All about Oil*, Source: Asian Survey, Vol. 45, No. 1 (Jan. - Feb., 2005)
- Djoko Said, Budiman. *Menuju Konsep Strategi*, FKPM, Jakarta, 2009
- Hadi, Syamsul. *Memajukan Budaya ASEAN sebagai Landasan Kerjasama Regional*, Analisis CSIS Tahun XXV No. 5 (September-Oktober 1996)
- Helvas Ali, Alman. *Pembangunan Kekuatan Laut Malaysia: Implikasi dan Respon Indonesia*, FKPM, Jakarta, 2009

- Helvas Ali, Alman. *Analisis Terhadap Kebijakan Pertahanan Singapura*, FKM, Jakarta, 2010
- Helvas Ali, Alman. *Pembangunan Kekuatan Kapal Selam Australia*, FKPM, Jakarta, 2010
- Heo, UK, and Eger III, Robert J. *Paying for Security: The Security-Prosperty Dilemma in the United States*, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 49, No. 5 (Oct., 2005)
- Jurnal Intelijen dan kontra Intelijen. Volume II, No.7. Agustus 2005. Jakarta: CSICI.
- Mangindaan, Robert. *Suatu Wacana Tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara*, dalam Dharma Wiratama No. DW/119/2003
- Mangindaan, Robert. *Keamanan Maritim: New Era Requirement*, FKPM, Jakarta, 2010
- Quackenbush, Stephen L. *National Missile Defense and Deterrence*, Political Research Quarterly, Vol. 59, No. 4 (Dec., 2006)
- Reisman, W. Michael and Armstrong, Andrea. *The Past and Future of the Claim of Preemptive Self-Defense*, The American Journal of International Law, Vol. 100, No. 3 (Jul., 2006)
- Soeharto. *Suatu Pemikiran Tentang Strategi Hankam Matra Laut Indonesia dan Implementasinya Menjelang Tahun 2000*, SeskoAL, Jakarta, 1987
- Soewarso. dalam *Cipta Selecta Masalah Pertahanan*, Jakarta, 1982
- Sumakul, Willy F. *Strategi Maritim, Postur Angkatan laut Ri dan Tantangan Masa Kini*, FKPM, Jakarta, 2010
- Sumakul, Willy F. *Seni Operasi Dalam Praktek di Indonesia*, FKPM, Jakarta, 2009
- Sumakul, Willy F. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Menyusun Strategi Maritim Di Indonesia*, FKPM, Jakarta, 2010

Penelitian/Riset :

Fitri M. Hatta, Aidil. *Pemanfaatan Industri Pertahanan Di Masa Damai Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional (Studi Kasus PT Pindad)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

Hasibuan, Rosmi, SH. MH. *Hak Lintas Damai ("Right Of Innocent Passage") Dalam Pengaturan Hukum Laut Internasional, Fakultas Hukum USU, 2003*

Heryaman, Oman. *Postur Militer Negara-Negara Asia Tenggara Dinamika Persenjataan dan Pergeseran Lingkungan Strategis Internasional dari Era ke Pasca Perang Dingin, Bagaimana Supremasi dan Postur Kekuatan Pertahanan Indonesia (TNI)?*, Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2001

Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara PACIVIS-UI. *Naskah Akademik RUU Intelijen Negara* (Jakarta: PACIVIS-UI, 2005).

Walid, Chairul. *Analisis Anggaran Pertahanan Negara Periode 2001-2005 dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Nasional*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006

Perundang-undangan:

UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI

UU No.32 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan

Website/Artikel :

Dephankam, *Sistem Nasional di Laut dalam rangka Implementasi Wanus*, Jakarta, 1980

Disarikan dari Sri Bintang Pamungkas, *Konsep Negara Kesatuan RI dengan Otonomi Daerah Secara Penuh Dan Luas dalam Kerangka Reformasi Total*, makalah.

- KKP, <http://www.dkp.go.id/index.php/archives/c/33/51/peta-batas-negara-kepulauan-republik-indonesia/>
- Parapat, F.M ,PhD. *Pandangan Umum dan Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pengembangan Industri Hankam Bidang Maritim*, TNI AL, Jakarta, 1980
- Plotnikov, Vladimir Headquarter of Russian Airborne Troop dalam *Use of Force in Resolving Military Conflict: Ways to Increase Efficiency*
- Praptono, Anton S.H. *Teori Kedaulatan* (<http://click-gtg.blogspot.com/search/label/hukum>), diakses pada 16 Maret 2009
- Prasetyono, Edy. *Seminar Pertahanan: Analisa dan Persepsi Ancaman Terhadap NKRI*, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 29 Agustus 2006
- Rabadi, Aprio. *Perang Dingin (1949-1989).*" <http://www.revantio.blog.friendster.com/> Diakses 20 Maret 2009.
- Rovicky. *Ingat 13 Desember, Hari Deklarasi Djoeanda*, <http://rovicky.wordpress.com/2010/09/02/ingat-13-desember-hari-deklarasi-djoeanda/> Diakses 2 September 2010
- Subianto, Ratimin. *Geografis dan Penduduk Asia Tenggara*, Program Studi Geografi, Universitas Kanjuruhan, Malang, 2010
- Majalah/Koran:**
- "*Arogansi Asing akibat Pemerintah Abaikan Aturan*", Media Indonesia, 19 Agustus 2010
- "*China Panaskan Kawasan*", Media Indonesia, 29 Oktober 2010
- "*Koordinasi di Laut Amburadul*", Media Indonesia, 24 Agustus 2010
- Megaputri, Dian, "*Indonesia-Malaysia, Perbatasan Tanpa Batas*", Media Indonesia, 31 Agustus 2010.
- "*Sebuah 'jalur' Teroris dan Perdagangan*" kompas, 28 April 2010
- "*Was was karena Konvensi Perbatasan tidak Jelas*", Media Indonesia, 24 Agustus 2010